

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP) TAHUN 2023



**DINAS KESEHATAN
PEMERINTAH KOTA DUMAI**



PEMERINTAH KOTA DUMAI
DINAS KESEHATAN

Jl. Tuanku Tambusai, Bagan Besar, Bukit Kapur Dumai, Riau 28882
Telepon 0811 7771 256 Laman: dinkesdumaikota@gmail.com

SURAT PERNYATAAN
KEBENARAN DATA LAPORAN LKj-IP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. Syaiful, M.K.M
NIP : 197107242001121004
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda/IV c
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan
Unit Organisasi : Dinas Kesehatan Kota Dumai

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKj-IP) yang dikirim melalui link sesuai dengan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dan benar berdasarkan *un audit* per tanggal 19 Januari 2024 yang bersumber pada:

1. Laporan kinerja Sekretariat Dinas Kesehatan Kota Dumai
2. Laporan kinerja Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Dumai
3. Laporan kinerja Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Dumai
4. Laporan kinerja Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Dumai
5. Laporan kinerja Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Dumai
6. Laporan kinerja UPT Dinas Kesehatan Kota Dumai
7. Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023
8. Badan Pusat Statistik Tahun 2024 didownload melalui website <https://bps.go.id> pada tanggal 15 Januari 2024

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dumai, 22 Januari 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA DUMAI
dr. SYAIFUL, M.K.M
Pembina Utama Muda/IV c
NIP 197107242001121004

KATA PENGANTAR



Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 telah mengamanatkan seluruh OPD di lingkungan Instansi Pemerintah untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) kepada Kepala Daerah. LKj-IP dimaksudkan sebagai wujud pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate serta berfokus kepada kinerja dan secara terpadu mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta misi organisasi.

Dengan berakhirnya pelaksanaan tahun anggaran 2023 berarti Dinas Kesehatan Kota Dumai telah menyelesaikan kegiatannya dalam upaya memenuhi visi dan misinya. Selama tahun 2023, sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam rencana kinerja tahun 2023 telah berhasil dicapai. Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Dumai untuk tahun 2023 ini kemudian dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023. Sebagai bentuk pengejawantahan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Kesehatan Kota Dumai kepada Pemerintah Kota Dumai, DPRD dan masyarakat.

Akhir kata, diharapkan agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi Dinas Kesehatan Kota Dumai

Dumai, 22 Januari 2024



WALIAIFUL, M.K.M
Pemuda Utama Muda/IV c
NIP 197107242001121004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pembangunan Kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan Kota Dumai bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan program-program kesehatan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kota Dumai. Untuk mewujudkan kehidupan masyarakat dengan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dengan kreativitas dan produktivitas serta mampu bersaing dan berkiprah menuju masyarakat yang madani, maka kesehatan merupakan modal dasar pembangunan yang perlu mendapatkan prioritas dalam pembangunan daerah Kota Dumai.

Visi Pembangunan Pemerintah Kota Dumai Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri Yang Unggul dan Bertumpu pada Budaya Melayu. Dinas Kesehatan Kota Dumai sebagai pelaksana sebagian tugas Pemerintah Kota Dumai dalam bidang kesehatan telah merencanakan dan melaksanakan berbagai program kegiatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam rangka mendukung pencapaian misi kedua Pemerintah Kota Dumai yakni mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berjati diri Melayu.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023, dapat dilihat program-program yang telah dilaksanakan untuk mencapai Visi dan Misi Pembangunan Pemerintah Kota Dumai, peningkatan kinerja organisasi dan pencapaian-pencapaian sasaran sampai dengan tahun 2023. Secara umum dapat disimpulkan bahwa Dinas Kesehatan Kota Dumai telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, terlihat dari pencapaian sasaran maupun pengukuran kinerja yang telah ditetapkan yaitu tercapainya (1). Angka Kematian Bayi sebesar 11.36/1.000 KH, (2). Angka Kematian Balita 13.42/1.000 KH, (3). Angka Kematian Ibu 103.23/100.000 KH, (4). Umur Harapan Hidup 71.67 tahun, (5). Angka Kesakitan Malaria: API = 0,01/1.000 penduduk, (6). Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA+ 72%, (7). Prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko 0.18%, (8). Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) 198.03/100.000, (9). Persentase balita dengan gizi buruk 0,07, (10). Persentase balita dengan gizi kurang 1.10%, dan (11). Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Dumai 100.02%.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Grafik	v
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Gambar.....	ix
Daftar Lampiran.....	x

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	4
1.3 Maksud Dan Tujuan	8
1.4 Isu Strategis	8
1.5 Cascading Kinerja	10
1.6 Peta Proses Bisnis.....	12
1.7 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI	16
2.1 Rencana Strategis : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program untuk Pencapaian Sasaran.....	16
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2023.....	21
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	26
3.1 Analisis Capaian Kinerja Perangkat Daerah	27
3.1.1 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021-2026	27
3.1.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023.....	29

3.2 Akuntabilitas Keuangan	70
BAB IV PENUTUP	81
Lampiran	

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 3.1 Pencapaian Angka Kematian Bayi Kota Dumai dari Tahun 2020 s/d 2023.	34
Grafik 3.2 Jumlah Kematian Bayi Berdasarkan Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2023	34
Grafik 3.3 Pencapaian Angka Kematian Balita Kota Dumai dari Tahun 2020 s/d 2023.	36
Grafik 3.4 Jumlah Kematian Balita Berdasarkan Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2023	37
Grafik 3.5 Pencapaian Angka Kematian Ibu Kota Dumai Dari Tahun 2020 s/d 2023.....	39
Grafik 3.6 Jumlah Kematian Ibu Berdasarkan Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2023.....	39
Grafik 3.7 Jumlah Kematian Ibu Berdasarkan Jenis Kematian Ibu dan Kelompok Umur di Kota Dumai Tahun 2023.	40
Grafik 3.8 Pencapaian Umur Harapan Hidup Kota Dumai Dari Tahun 2020 s/d Tahun 2023.	42
Grafik 3.9 Pencapaian Angka Kesakitan Malaria Kota Dumai dari Tahun 2020 s/d 2023.	43
Grafik 3.10 Jumlah Kasus Malaria Berdasarkan Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2023.....	44
Grafik 3.11 Pencapaian Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA + Kota Dumai dari Tahun 2020 s/d 2023.....	46
Grafik 3.12 Jumlah kasus TB Paru BTA + Berdasarkan Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2023.....	46
Grafik 3.13 Prevalensi Penderita HIV Terhadap Penduduk Beresiko Kota Dumai Dari Tahun 2020 s/d 2023	49

Grafik 3.14 Data Kumulatif Kasus HIV/AIDS Kota Dumai Dari Tahun 2020 s/d 2023	50
Grafik 3.15 Pencapaian Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue Kota Dumai dari Tahun 2020 s/d 2023.....	52
Grafik 3.16 Jumlah Kasus DBD Berdasarkan Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2023.....	53
Grafik 3.17 Pencapaian Persentase Balita Dengan Gizi Buruk Kota Dumai dari Tahun 2020 s/d 2023.	56
Grafik 3.18 Jumlah Kasus Balita Dengan Gizi Buruk Berdasarkan Kecamatan Kota di Dumai Tahun 2023.....	56
Grafik 3.19 Pencapaian Persentase Balita Dengan Gizi Kurang Kota Dumai dari Tahun 2020 s/d 2023.....	59
Grafik 3.20 Jumlah Kasus Balita Dengan Gizi Kurang Berdasarkan Kecamatan Kota di Dumai Tahun 2023.....	59
Grafik 3.21 Pencapaian Prevalensi Stunting Pada Balita Kota Dumai Dari Tahun Tahun 2020 s/d 2023.....	62
Grafik 3.22 Jumlah Kasus Balita Stunting Berdasarkan Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2023.....	63
Grafik 3.23 Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kota Dumai dari Tahun 2020 sampai dengan 2023.....	65

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Status Kepegawaian dan Golongan serta Unit Kerja Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023 7
Tabel 1.2	Kelemahan/Kekurangan dan Saran/Rekomendasi Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Internal Dinas Kesehatan Tahun 2023 13
Tabel 1.3	Rencana Tindak Lanjut terhadap Saran/Rekomendasi Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Internal Dinas Kesehatan Tahun 2023 15
Tabel 2.4	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021-2026..... 18
Tabel 2.5	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023 s/d 2026 19
Tabel 2.6	Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2022 s/d 2026 20
Tabel 2.7	Rencana Sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Dumai dan Target Tahun 2023 22
Tabel 3.8	Skala Nilai Perangkat Kinerja 27
Tabel 3.9	Atribut Capaian Indikator Kinerja 27
Tabel 3.10	Evaluasi Pencapaian Indikator Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021 s/d 2026 29
Tabel 3.11	Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023 30
Tabel 3.12	Pencapaian Sasaran IKU Dinas Kesehatan Kota Dumai Dari Tahun 2020 s/d 2023 dan Proyeksi Tahun 2024 dan 2025..... 32

Tabel 3.13	Umur Harapan Hidup (UHH) di Indonesia, Propinsi Riau dan Kota Dumai dari Tahun 2020 s/d 2023.	42
Tabel 3.14	Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk menurut Jenis Kepesertaan Kota Dumai dari tahun 2020-2023.....	65
Tabel 3.15	Pagu Dan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Berdasarkan Uraian Belanja dan Unit Kerja Tahun 2023.	70
Tabel 3.16	Pencapaian Realisasi Keuangan Berdasarkan Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan dan UPT Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023.....	71
Tabel 3.17	Pencapaian Realisasi Keuangan Berdasarkan Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023.....	73
Tabel 3.18	Pencapaian Realisasi Keuangan Berdasarkan Uraian UPT Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023.....	76
Tabel 3.19	Pencapaian Realisasi Keuangan Berdasarkan Sumber Anggaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023	77
Tabel 3.20	Pencapaian Realisasi Keuangan Berdasarkan Unit Kerja Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023.....	78
Tabel 3.21	Efisiensi Kinerja dan Anggaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023	79
Tabel 3.22	Prestasi dan Penghargaan Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023.	80

DAFTAR LAMPIRAN

1. Matriks Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021-2026
2. Keputusan Walikota Dumai Nomor 11/Dinkes/2024 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2022-2026
3. Keputusan Walikota Dumai Nomor 106/Dinkes/2023 tentang Penetapan Peta Proses Bisnis Pada Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023
4. Pohon Kinerja Dinas Kesehatan Kota Dumai
5. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023
6. Perubahan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023
7. Perjanjian Kinerja (PK) dan Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023
8. Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023
9. Target dan Realisasi Anggaran berdasarkan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023
10. Penghargaan Yang Diterima Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023



B A B I P E N D A H U L U A N

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pembangunan Kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan Kota Dumai bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan program-program kesehatan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kota Dumai. Untuk mewujudkan kehidupan masyarakat dengan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dengan kreativitas dan produktivitas serta mampu bersaing dan berkiprah menuju masyarakat yang madani, maka kesehatan merupakan modal dasar pembangunan yang perlu mendapatkan prioritas dalam pembangunan daerah Kota Dumai.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah telah mengatur bahwa semua instansi pemerintah diamanatkan untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh tersebut dikomunikasikan kepada para stakeholder dalam wujud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP).

Dinas Kesehatan Kota Dumai sebagai pelaksana sebagian tugas pemerintah daerah di bidang kesehatan telah menyusun suatu rencana strategis bidang kesehatan sebagai kerangka perencanaan dan pengelolaan pembangunan daerah di bidang kesehatan. Sejalan dengan pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), maka akuntabilitas kinerja periode tahunan merupakan perwujudan kewajiban Dinas Kesehatan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan RKT dan sejalan dengan Renstra, guna memberikan masukan dan umpan balik bagi

pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan Kota Dumai.

Esensi dari sistem AKIP bagi Dinas Kesehatan Kota Dumai adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik di sektor kesehatan di Kota Dumai. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategis Dinas Kesehatan Kota Dumai dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Atas dasar tersebut, siklus sistem AKIP diawali dengan penyusunan rencana strategis yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan/sasaran strategis Dinas Kesehatan Kota Dumai. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi dan tujuan/sasaran strategis tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Dumai.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders (Walikota Dumai, DPRD dan masyarakat). Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Dumai sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Dua fungsi utama LKj-IP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKj-IP oleh setiap instansi pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023 merupakan suatu media pertanggungjawaban yang memuat informasi mengenai evaluasi dan analisa pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Dumai yang bertujuan untuk mengetahui keberhasilan dan kendala-kendala yang dihadapi pada pelaksanaan program-program kesehatan di Kota Dumai pada tahun 2023.

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023 adalah sebagai berikut

1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2016.
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 6. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E)
 7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 tanggal 20 September 2023 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 7 Seri A)
 8. Peraturan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D)
 9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 1 Seri E)
 10. Peraturan Walikota Dumai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 1 Seri D)

11. Peraturan Walikota Dumai Nomor 75 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan Kota Dumai;
12. Peraturan Walikota Dumai Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 3 Seri D)
13. Peraturan Walikota Dumai Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 tanggal 20 September 2023 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 8 Seri A)
14. Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021-2026

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kesehatan Kota Dumai dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor 717 tanggal 22 Mei 1999 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai. Dalam perjalanannya Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Dumai telah beberapa kali mengalami perubahan. Sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, sehingga Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Dumai yang sebelumnya ditetapkan melalui Peraturan Walikota Dumai Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Dumai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Dumai terbaru ditetapkan melalui Peraturan Walikota Dumai Nomor 17 Tahun 2023.

Mengacu pada peraturan tersebut, Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan

kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

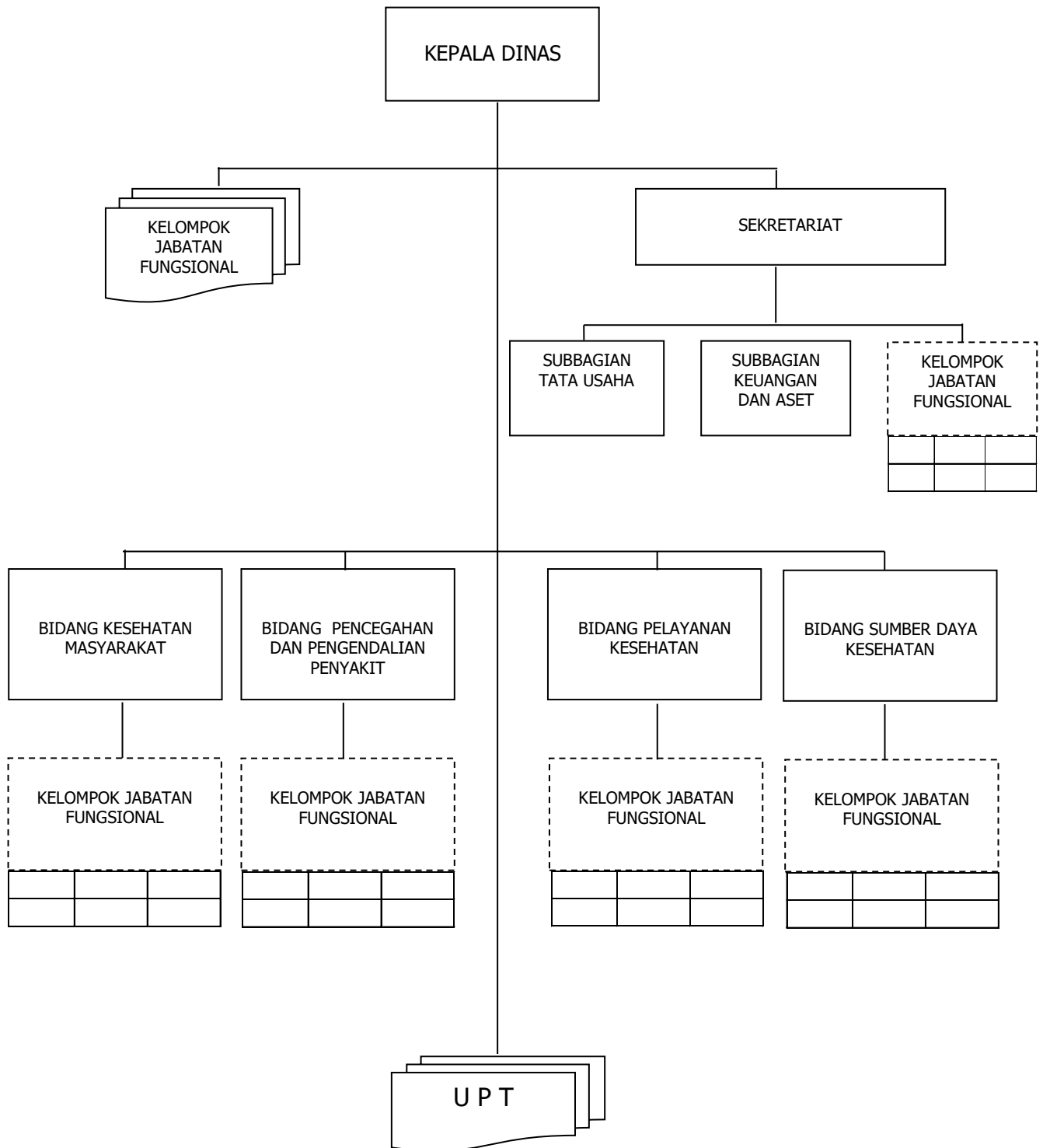
1. Perumusan kebijakan dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan;
3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan lingkup fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Dumai dan Unit Pelaksana Teknis ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 17 Tahun 2023, Peraturan Walikota Dumai Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Walikota Dumai Nomor 75 Tahun 2020 yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
 1. Subbagian Tata Usaha
 2. Subbagian Keuangan dan Aset
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Kesehatan Masyarakat
Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit
Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Pelayanan Kesehatan
Kelompok Jabatan Fungsional
6. Bidang Sumber Daya Kesehatan
Kelompok Jabatan Fungsional
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan
 - a. UPT Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A
 - b. UPT Instalasi Farmasi Kelas A
 - c. UPT Puskesmas

d. UPT RSUD Kota Dumai

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Dumai
 (Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 17 Tahun 2023)



Sampai dengan Desember 2024, jumlah ASN di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Dumai sebanyak 531 orang, terdiri dari ASN sebanyak 490 orang (92.28%) dan P3K sebanyak 41 orang (7.72%). ASN tersebut tersebar di Dinas Kesehatan Kota Dumai sebanyak 45 orang dan sebanyak 486 orang tersebar di 12 UPT yakni Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A sebanyak 8 orang, Instalasi Farmasi Kesehatan (IFK) sebanyak 5 orang, dan 10 puskesmas se Kota Dumai sebanyak 473 orang. Dari total 531 ASN tersebut, berdasarkan golongan terbanyak adalah PNS golongan III sebanyak 326 (61.39%), disusul dengan PNS golongan II sebanyak 168 orang (31.64%). Sedangkan jumlah PNS golongan IV sebanyak 37 orang (6.97%).

Tabel 1.1
Distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN)
Berdasarkan Status Kepegawaian dan Golongan serta Unit Kerja
Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023

NO.	URAIAN UNIT KERJA	PNS					P3K					TOTAL ASN
		GOL . I	GOL . II	GOL . III	GOL . IV	TOTAL	GOL . I	GOL . II	GOL . III	GOL . IV	TOTAL	
1	Dinas Kesehatan	0	2	29	9	40	0	1	4	0	5	45
2	Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A	0	0	8	0	8	0	0	0	0	0	8
3	Instalasi Farmasi Kesehatan	0	0	4	1	5	0	0	0	0	0	5
4	Puskesmas Dumai Kota	0	10	42	2	54	0	3	0	0	3	57
5	Puskesmas Dumai Barat	0	11	30	4	45	0	1	1	0	2	47
6	Puskesmas Bukit Kapur	0	11	32	2	45	0	4	0	0	4	49
7	Puskesmas Sungai Sembilan	0	23	27	2	52	0	3	0	0	3	55
8	Puskesmas Bumi Ayu	0	14	22	5	41	0	2	1	0	3	44
9	Puskesmas Bukit Timah	0	8	27	2	37	0	3	0	0	3	40
10	Puskesmas Jaya Mukti	0	15	29	6	50	0	2	1	0	3	53
11	Puskesmas Purnama	0	15	23	0	38	0	3	1	0	4	42
12	Puskesmas Medang Kampai	0	16	19	3	38	0	5	1	0	6	44
13	Puskesmas Bukit Kayu Kapur	0	13	23	1	37	0	3	2	0	5	42
	TOTAL	0	138	315	37	490	0	30	11	0	41	531

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023

1.3 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023 ini merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Dumai periode 2021-2026. Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023 adalah untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan kinerja penyelenggaraan pemerintahan urusan kesehatan yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023 memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Kesehatan Kota Dumai selama tahun anggaran 2023.
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kota Dumai khususnya urusan kesehatan pada tahun 2023.
3. Hasil evaluasi yang berupa kritik saran diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Kota Dumai khususnya urusan kesehatan di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kota Dumai khususnya urusan kesehatan dengan menerapkan azas transparansi, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.4 Isu Strategis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Kesehatan Kota Dumai tidak terlepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Perumusan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Dumai, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan, dan tantangan yang harus diminimalisir dampaknya dalam pelaksanaan pencapaian program.

Isu strategis terkait dengan urusan kesehatan yang perlu ditangani sebagai berikut:

1. Akses terhadap pelayanan kesehatan belum merata di seluruh Kota Dumai, terutama di wilayah kerja puskesmas yang memiliki daerah sulit dijangkau karena kondisi geografis, terbatasnya transportasi dan infrastruktur (jalan, jembatan dan listrik) seperti wilayah kerja Puskesmas Sungai Sembilan, Bukit Kapur, Bukit Kayu Kapur dan Medang Kampai.
2. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan serta pelayanan medis yang bermutu dan merata di setiap puskesmas. Sarana dan prasarana kesehatan yang ada belum memenuhi standar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
3. Pelayanan kesehatan ibu dan anak belum optimal yang ditunjukkan dengan pencapaian Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita dan Kematian Ibu yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
4. Adanya tripple burden penyakit akibat adanya transisi epidemiologi penyakit yang signifikan dimana penyakit tidak menular telah menjadi beban utama, meskipun beban penyakit menular masih berat juga seperti Malaria, TB Paru, HIV/AIDS dan DBD.
5. Masih belum terkendalinya status gizi balita dimana jumlah kasus balita dengan gizi kurang mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan masih ditemukannya kasus balita dengan gizi buruk dan kasus balita stunting.
6. Penggunaan Obat Rasional dan Pengawasan Obat dan Makanan belum optimal.
7. Masih rendahnya peran serta aktif masyarakat (PHBS) dalam pembangunan kesehatan.
8. Masih belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM kesehatan sesuai kompetensi serta ketersediaan SDM Kesehatan belum sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

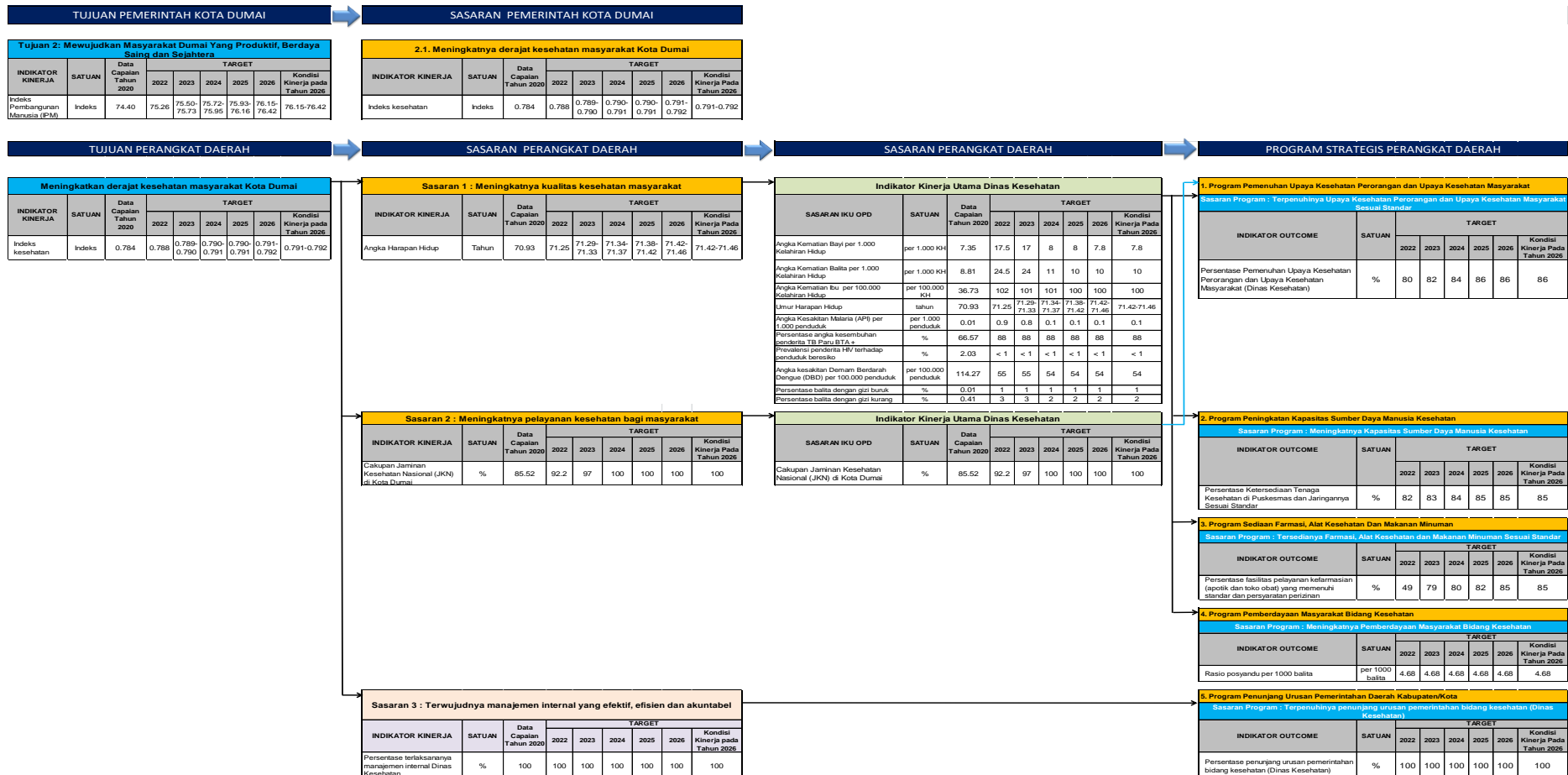
1.5 Cascading Kinerja

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertical dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Setiap perangkat daerah dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Dinas Kesehatan dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar 1.2
Cascading Kinerja Dinas Kesehatan Kota Dumai

Visi : "Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri Yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu"

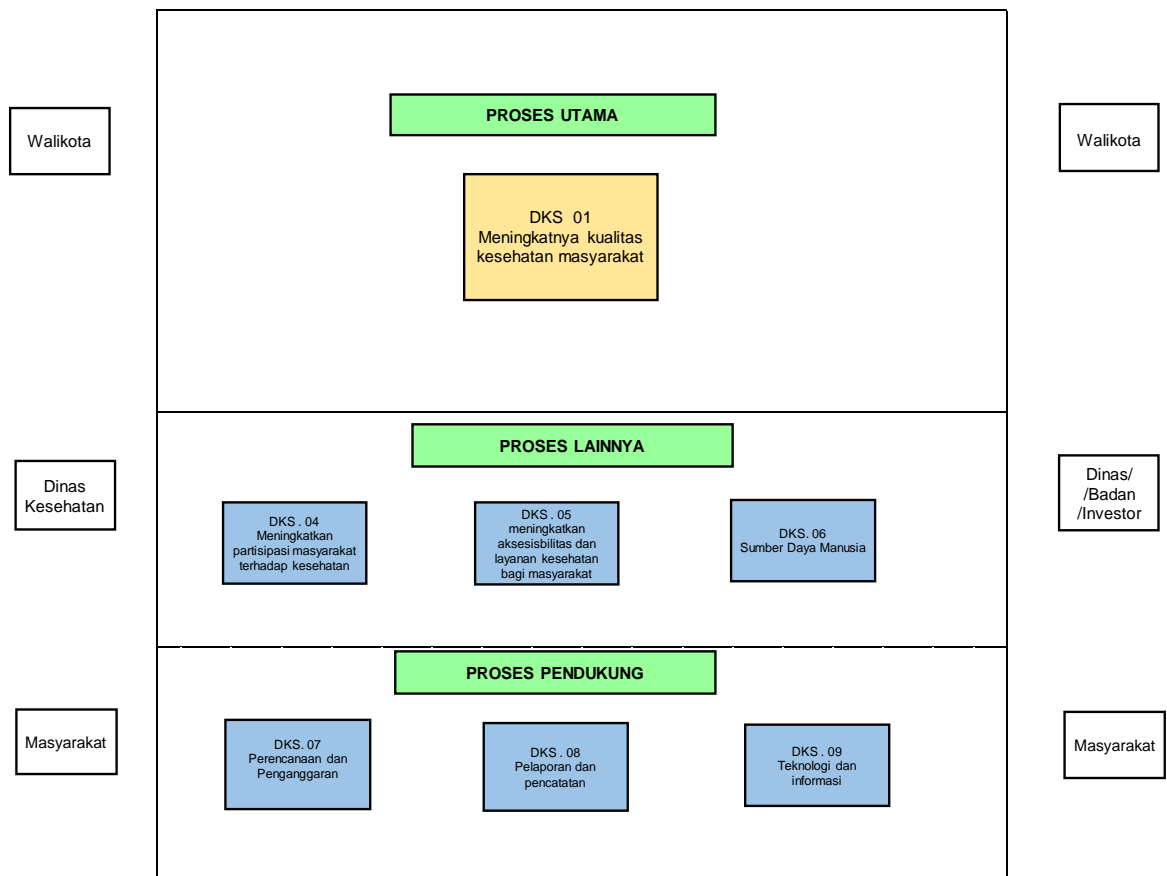
MISI II : MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERATI DIRI MELAYU



1.6 Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Peta Proses Bisnis Dinas Kesehatan Kota Dumai ditetapkan melalui Keputusan Walikota Dumai Nomor 106/Dinkes/2023 tanggal 21 September 2023 dengan skema sebagaimana berikut:

Gambar 1.3
Peta Proses Bisnis Dinas Kesehatan Kota Dumai



1.7 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023

Berdasarkan Berita Acara Pembahasan Evaluasi SAKIP tanggal 25 Oktober 2023 dan laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Dumai sebagaimana tertuang dalam surat Walikota Dumai Nomor 700/1307.1/INSP-S tanggal 08 Desember 2023 hal Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Internal Dinas Kesehatan Tahun 2023, telah disampaikan saran/rekomendasi antara lain:

Tabel 1.2
Kelemahan/Kekurangan dan Saran/Rekomendasi
Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Internal
Dinas Kesehatan Tahun 2023

No.	Kelemahan/Kekurangan	Saran/Rekomendasi
1.	Belum menemukan Pimpinan selalu teribat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja.	Agar melengkapi data dukung atas kriteria Pimpinan selalu teribat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja.
2.	Belum menemukan Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.	Agar melengkapi data dukung atas kriteria Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.
3.	Belum menemukan Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).	Agar melengkapi data dukung atas kriteria Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).
4.	Belum menemukan Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.	Agar melengkapi data dukung atas kriteria Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.
5.	Sebahagian Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.	Agar melengkapi data dukung atas kriteria Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.
6.	Sebahagian Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.	Agar melengkapi data dukung atas kriteria Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.

7.	Sebahagian Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.	Agar melengkapi data dukung atas kriteria Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.
8.	Sebahagian Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.	Agar melengkapi data dukung atas kriteria Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.
9.	Belum menemukan Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti.	Agar melengkapi data dukung atas kriteria Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti.
10.	Belum menemukan Peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal.	Agar melengkapi data dukung atas kriteria Peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal.
11.	Belum menemukan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.	Agar melengkapi data dukung atas kriteria Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
12.	Belum menemukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.	Agar melengkapi data dukung atas kriteria Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.
13.	Belum menemukan Perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.	Agar melengkapi data dukung atas kriteria Perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Sebagai tindaklanjut terhadap rekomendasi yang diberikan, telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

Tabel 1.3
Rencana Tindak Lanjut terhadap Saran/Rekomendasi Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Internal Dinas Kesehatan Tahun 2023

No.	Rekomendasi Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Internal Tahun 2023	Rencana Aksi Tindak Lanjut				
		Uraian	Output	Target Waktu Selesai	Penanggung Jawab	Praktik-Pratik yang Sudah Dilakukan Tapi Belum Optimal
1	Agar melengkapi data dukung atas kriteria Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja	bahwa dinas kesehatan telah melakukan evaluasi pencapaian IKU dan Program (SPM) di Triwulan ke 3 Tahun 2023	melakukan monitoring secara berkala	bulan november 2023	Bagian perencanaan Dinas Kesehatan	pertemuan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
2	Agar melengkapi data dukung atas kriteria Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan	dokumentasi laporan akan kami publikasikan melalui website Dinas Kesehatan	Dokumentasi ke dalam Website Dinkes	bulan februari 2024	Kasubbag TU	belum semua dokumen yg di publikasikan ke Website
3	Agar melengkapi data dukung atas kriteria Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (bertanggung jawab);	bahwa Kepala Dinas Kesehatan telah melakukan penilaian terhadap kinerja seluruh pegawai dinas kesehatan	semua pegawai membuat Ekinerja	bulan januari 2023	Kasubbag TU	Ekinerja sudah di buat dan dinilai oleh Pimpinan Langsung
4	Agar melengkapi data dukung atas kriteria Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai	bahwa seluruh pegawai sudah membuat laporan kinerja	semua pegawai membuat Ekinerja	bulan januari 2023	Kasubbag TU	Ekinerja sudah di buat dan dinilai oleh Pimpinan Langsung
5	Agar melengkapi data dukung atas kriteria Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja	bahwa dinas kesehatan telah membuat dan melaporkan pencapaian minitoring dan evaluasi kinerja setiap triwulan ke bappeda melalui emonev	laporan emonev dan rencana aksi per triwulan	triwulan	perencanaan	emonev sudah di buat dan di sampaikan secara berkala ke Bappeda dan Inspektorat
6	Agar melengkapi data dukung atas kriteria Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja	bahwa dinas kesehatan telah membuat dan melaporkan pencapaian minitoring dan evaluasi kinerja setiap triwulan ke bappeda melalui emonev	laporan emonev dan rencana aksi per triwulan	triwulan	perencanaan	emonev sudah di buat dan di sampaikan secara berkala ke Bappeda dan Inspektorat
7	Agar melengkapi data dukung atas kriteria Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja	bahwa dinas kesehatan telah membuat dan melaporkan pencapaian minitoring dan evaluasi kinerja setiap triwulan ke bappeda melalui emonev	laporan emonev dan rencana aksi per triwulan	triwulan	perencanaan	laporan emonev dan rencana aksi sudah di buat dan di sampaikan secara berkala ke Bappeda dan Inspektorat
8	Agar melengkapi data dukung atas kriteria Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi	bahwa dinas kesehatan telah melaksanakan kegiatan apel pagi sebagai budaya kerja organisasi	pelaksanaan apel	hari kerja	kabag TU	pelaksanaan apel pagi di lingkungan dinas kesehatan
9	Agar melengkapi data dukung atas kriteria Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti	bahwa dinas kesehatan telah membuat dan melaporkan pencapaian minitoring dan evaluasi kinerja setiap triwulan ke bappeda melalui emonev	laporan emonev dan rencana aksi per triwulan	triwulan	perencanaan	laporan emonev dan rencana aksi sudah di buat dan di sampaikan secara berkala ke Bappeda dan Inspektorat
10	Agar melengkapi data dukung atas kriteria Peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal	bahwa dinas kesehatan telah membuat dan melaporkan pencapaian minitoring dan evaluasi kinerja setiap triwulan ke bappeda melalui emonev	laporan emonev dan rencana aksi per triwulan	triwulan	perencanaan	laporan emonev dan rencana aksi sudah di buat dan di sampaikan secara berkala ke Bappeda dan Inspektorat
11	Agar melengkapi data dukung atas kriteria Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja	bahwa dinas kesehatan telah membuat dan melaporkan pencapaian minitoring dan evaluasi kinerja setiap triwulan ke bappeda melalui emonev	laporan emonev dan rencana aksi per triwulan	triwulan	perencanaan	laporan emonev dan rencana aksi sudah di buat dan di sampaikan secara berkala ke Bappeda dan Inspektorat
12	Agar melengkapi data dukung atas kriteria Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja	bahwa dinas kesehatan telah membuat dan melaporkan pencapaian minitoring dan evaluasi kinerja setiap triwulan ke bappeda melalui emonev	laporan emonev dan rencana aksi per triwulan	triwulan	perencanaan	laporan emonev dan rencana aksi sudah di buat dan di sampaikan secara berkala ke Bappeda dan Inspektorat
13	Agar melengkapi data dukung atas kriteria Perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal	bahwa dinas kesehatan telah membuat dan melaporkan pencapaian minitoring dan evaluasi kinerja setiap triwulan ke bappeda melalui emonev	laporan emonev dan rencana aksi per triwulan	triwulan	perencanaan	laporan emonev dan rencana aksi sudah di buat dan di sampaikan secara berkala ke Bappeda dan Inspektorat



BAB II
PERENCANAAN KINERJA
DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

2.1 Rencana Strategis

Visi

Visi Walikota/Wakil Walikota Dumai :

**“ Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul
Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu “**

maka Dinas Kesehatan Kota Dumai menyusun Rencana Strategis untuk merealisasikan hal tersebut diatas melalui Misi yang lebih spesifik di bidang kesehatan.

Misi

Misi Pemerintah Kota Dumai yang berkaitan dengan bidang kesehatan yakni **Misi Kedua :**

**“Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berjati Diri
Melayu“**

Terkait dengan Visi dan Misi tersebut Dinas Kesehatan Kota Dumai sebagai salah satu perangkat daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan

Tujuan pembangunan Kota Dumai tahun 2021-2026 dalam rangka mencapai misi 2 mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berjati diri

melayu adalah membangun masyarakat Dumai yang produktif, berdaya saing dan sejahtera, dengan sasaran terkait kesehatan adalah **“Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai”**. Sasaran pembangunan Kota Dumai Tahun 2021-2026 terkait kesehatan tersebut menjadi tujuan pembangunan Dinas Kesehatan pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021-2026 yakni **“Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai”**

Sasaran

Sasaran Pembangunan Dinas Kesehatan pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021-2026 adalah:

1. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
2. Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat

Strategi

Strategi pembangunan Dinas Kesehatan pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021-2026 dalam rangka mencapai sasaran 1 meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Kesehatan adalah: 1) meningkatkan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat sesuai standar; 2) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kesehatan sesuai standar, 3) Meningkatkan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar, 4) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan gerakan masyarakat hidup sehat serta pembangunan berwawasan kesehatan. Sedangkan strategi pembangunan Dinas Kesehatan pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021-2026 dalam rangka mencapai sasaran 2 meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat adalah meningkatkan aksesibilitas dan layanan kesehatan bagi masyarakat

Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan Dinas Kesehatan pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021-2026 adalah:

1. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
2. Penyediaan layanan kesehatan menggunakan siklus hidup (continuum of care)

3. Peningkatan kualitas, kuantitas dan pendayagunaan tenaga kesehatan
4. Peningkatan pengendalian dan pengawasan perizinan dan penerbitan sertifikat sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman
5. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan melalui kemitraan dan partisipasi lintas sektor, lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan, swasta dan pemangku kepentingan terkait lainnya
6. Peningkatan cakupan Universal Health Coverage (UHC)

Rumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Kesehatan Kota Dumai dalam 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Rencana Strategis
Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021-2026

VISI : Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu			
MISI II : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berjati Diri Melayu			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Dumai	1. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1. Meningkatkan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat sesuai standar	1. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat 2. Penyediaan layanan kesehatan menggunakan siklus hidup (continuum of care)
		2. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	3. Peningkatan kualitas, kuantitas dan pendayagunaan tenaga kesehatan
		3. Meningkatkan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar	4. Peningkatan pengendalian dan pengawasan perizinan dan penerbitan sertifikat sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman

		4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan gerakan masyarakat hidup sehat serta pembangunan berwawasan kesehatan	5. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan melalui kemitraan dan partisipasi lintas sektor, lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan, swasta dan pemangku kepentingan terkait lainnya
	2. Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	5. Meningkatkan aksesibilitas dan layanan kesehatan bagi masyarakat	6. Peningkatan cakupan Universal Health Coverage (UHC)

Untuk mewujudkan Visi dan Misi pembangunan Kota Dumai yang hendak diwujudkan pada tahun 2026 maka dirumuskan Tujuan selanjutnya dijabarkan dalam sasaran. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kota Dumai sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2022 s/d 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Capaian Setiap Tahun					
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Dumai		Indeks Kesehatan	0.788	0.789-0.790	0.790-0.791	0.790-0.791	0.791-0.792	
		1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	71.25 tahun	71.29-71.33 tahun	71.34-71.37 tahun	71.38-71.42 tahun	71.42-71.46 tahun
		2	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Dumai	92.2%	97%	100%	100%	100%

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan kesehatan diukur melalui pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Ada 11 indikator yang ditetapkan sebagai indikator Indikator Kinerja Utama (IKU) bidang kesehatan yang harus dicapai mulai tahun 2022 s/d 2026. Sesuai Keputusan Walikota Dumai Nomor 11/DINKES/2024 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2022-2026, maka Perubahan IKU seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 2.6
Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Dumai
Tahun 2022 s/d 2026

No	Sasaran Strategis	Sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1 Menurunnya Mortalitas (Angka Kematian)	%	100	100	100	100	100
		1.1 Angka Kematian Bayi per 1.000 KH	per 1.000 KH	17.5	17	8	8	7.8
		1.2 Angka Kematian Balita per 1.000 KH	per 1.000 KH	24.5	24	11	10	10
		1.3 Angka Kematian Ibu per 100.000 KH	per 100.000 KH	101.5	101	100.5	100	100
		1.4 Umur Harapan Hidup	Tahun	71.25	71.29-71.33	71.34-71.37	71.38-71.42	71.42-71.46
		2 Menurunnya Morbiditas (Angka Kesakitan)	%	100	100	100	100	100
		2.1 Angka Kesakitan Malaria (API) per 1.000 penduduk	per 1.000 penduduk	0.9	0.8	0.1	0.1	0.1
		2.2 Persentase Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA +	%	88	88	88	88	88
		2.3 Prevalensi Penderita HIV Terhadap Penduduk Beresiko	%	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
		2.4 Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk	per 100.000 penduduk	55	55	54	54	54
		2	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	3 Meningkatnya Status Gizi Balita	%	100	100	100
3.1 Persentase Balita dengan Gizi Buruk	%			1	1	1	1	1
3.2 Persentase Balita dengan Gizi Kurang	%			3	3	2	2	2
		4 Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Dumai	%	92.2	97	100	100	100

Program Untuk Pencapaian Sasaran

Untuk mewujudkan Visi dan Misi pembangunan Kota Dumai pada tahun 2026 serta memperhatikan pencapaian hasil pembangunan bidang kesehatan di Kota Dumai, maka dalam periode 2021-2026 akan dilaksanakan strategi dengan fokus pada prioritas pembangunan bidang kesehatan Kota Dumai yang dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kesehatan Kota Dumai. Program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kesehatan 2021-2026 disusun dengan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah dan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021-2026, terdiri dari 5 program, 24 kegiatan dan 109 sub kegiatan dengan perincian: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebanyak 1 program, 9 kegiatan dan 42 Sub Kegiatan; dan Program Urusan Wajib terdiri dari 4 program, 15 kegiatan dan 67 Sub Kegiatan. Uraian program adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2023

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Dinas Kesehatan 2021–2026, Rencana Kinerja disusun setiap tahunnya. Rencana Kinerja ini menjabarkan target yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini mempresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan dan merupakan benchmark bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian Rencana Kinerja Tahun 2023 Dinas Kesehatan Kota Dumai

merupakan dokumen yang menyajikan target kinerja untuk tahun 2023. Dalam rangka terwujudnya komitmen penerima dan pemberi amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah.

Tabel 2.7
Rencana Sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) dan
Target Tahun 2023 Dinas Kesehatan Kota Dumai

No	Sasaran Strategis	Sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	
1.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1.	Menurunnya Mortalitas (Angka Kematian)	%	100
		1.1	Angka Kematian Bayi per 1.000 KH	per 1.000 KH	17
		1.2	Angka Kematian Balita per 1.000 KH	per 1.000 KH	24
		1.3	Angka Kematian Ibu per 100.000 KH	per 100.000 KH	101
		1.4	Umur Harapan Hidup	Tahun	71,29-71.33
		2.	Menurunnya Morbiditas (Angka Kesakitan)	%	100
		2.1	Angka Kesakitan Malaria (API) per 1.000 penduduk	per 1.000 penduduk	0.8
		2.2	Persentase Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA +	%	88
		2.3	Prevalensi Penderita HIV Terhadap Penduduk Beresiko	%	< 1
		2.4	Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk	per 100.000 penduduk	55
		3.	Meningkatnya Status Gizi Balita	%	100
		3.1	Persentase Balita dengan Gizi Buruk	%	1
		3.2	Persentase Balita dengan Gizi Kurang	%	3
2.	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	4.	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Dumai	%	97

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan Keputusan Walikota Dumai Nomor 973/764/2023 tanggal 11 Agustus 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023, maka Dinas Kesehatan Kota Dumai menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dengan pagu anggaran sebesar Rp 157.102.544.027,00, bertambah sebanyak Rp 60.209.266.294,00 dari pagu APBD Murni sebesar Rp 96.893.277.733,-. Namun, dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Dumai Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 tanggal 20 September 2023 terjadi pengurangan pagu perubahan APBD Dinas Kesehatan Kota Dumai sebesar Rp 50.000.000,-, sehingga total pagu Perubahan APBD Dinas Kesehatan menjadi sebesar Rp 157,102,544,027.00.

Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023 disusun mengacu pada Peraturan Walikota Dumai Nomor 58 Tahun 2023 tersebut dengan pagu sebesar Rp 157,102,544,027.00. Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023 adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi (Walikota Dumai) kepada pimpinan instansi yang lebih rendah (Kepala Dinas Kesehatan Kota Dumai) untuk melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan. Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023 ini memuat sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target kinerja dan anggaran. Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023 adalah sebagai berikut:



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. SYAIFUL, MKM

Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : H. PAISAL, SKM, MARS

Jabatan : WALIKOTA DUMAI

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 25 September 2023

Pihak Kedua,
WALIKOTA DUMAI



H. PAISAL, SKM, MARS

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA DUMAI



dr. SYAIFUL, MKM
NIP. 19710724 200112 1 001

Lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahun 2023
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Indeks	0.788-0.789
		Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	71.31
		1.1. Angka Kematian Bayi	per 1.000 Kelahiran Hidup	17
		1.2. Angka Kematian Balita	per 1.000 Kelahiran Hidup	24
		1.3. Angka Kematian Ibu	per 100.000 Kelahiran Hidup	101
		1.4. Umur harapan hidup	Tahun	71.31
		1.5. Angka Kesakitan Malaria (API)	per 1.000 Penduduk	0.8
		1.6. Persentase Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA +	%	88
		1.7. Prevalensi Penderita HIV Terhadap Penduduk Beresiko	%	1
		1.8. Angka kesakitan demam berdarah (DBD)	per 100.000 Penduduk	55
		1.9. Persentase Balita Dengan Gizi Buruk	%	1
1.10. Persentase Balita Dengan Gizi Kurang	%	3		
2	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	2. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Dumai	%	97

1 Sasaran 1 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp	75,298,856,561.00
2 Sasaran 2 Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp	864,829,200.00
	3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Rp	964,820,492.00
	4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp	1,716,066,700.00
	Jumlah	Rp	78,844,572,953.00

Dumai, 25 September 2023





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan, seberapa jauh efektifitas penggunaan anggaran untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan, serta seberapa jauh tingkat efisiensi pemanfaatan sumberdaya yang ada. Pengukuran kinerja dalam rangka mengetahui tingkat keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan dan diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja.

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri dari:

- a. Indikator bermakna positif, artinya : jika semakin besar realisasi berarti semakin baik kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin buruk kinerjanya, maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Indikator bermakna negatif, artinya : jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya, maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Nilai capaian kinerja masing-masing indikator dianggap mempunyai bobot yang sama, sehingga digunakan rumus rata rata. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, maka pencapaian kinerja dikategorikan dengan menggunakan skala penilaian kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 3.8
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	≥ 90	Sangat Tinggi
2.	76 s.d ≤ 90	Tinggi
3.	66 s.d ≤ 75	Sedang
4.	51 s.d ≤ 65	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria sebagaimana berikut:

Tabel 3.9
Atribut Capaian Indikator Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja		Atribut
	Persentase (%)	Keterangan Persentase	
1.	85% s.d 100%	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Sangat Berhasil
2.	70% s.d < 85%	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3.	55% s.d < 70%	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4.	< 55%	Di bawah lima puluh persen	Tidak Berhasil

3.1 Analisis Capaian Kinerja Perangkat Daerah

3.1.1 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021-2026

Pada tahun 2023, pencapaian indikator tujuan Dinas Kesehatan Kota Dumai yang ditunjukkan dengan pencapaian Indeks Kesehatan adalah sebesar 0.778. Bila dibandingkan dengan target Indeks Kesehatan pada tahun 2023 yakni sebesar 0.789-0.790, maka persentase capaian kinerja adalah sebesar 98.61% yang berarti pencapaian indikator tujuan Dinas Kesehatan Kota Dumai sangat tinggi dengan atribut capaian indikator kinerja sangat berhasil. Bila

dibandingkan dengan pencapaian Indeks Kesehatan pada tahun 2022 yakni sebesar 0.771, maka terlihat ada peningkatan pencapaian Indeks Kesehatan sebesar 0.007 point pada tahun 2023. Bila dibandingkan persentase capaian kinerja Indeks Kesehatan pada tahun 2022 yakni sebesar 98.22%, maka terlihat ada peningkatan persentase capaian kinerja Indeks Kesehatan sebesar 0.39 point pada tahun 2023 (98.61%).

Pencapaian Sasaran Strategis 1 yakni meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat yang ditunjukkan dengan indikator Angka Harapan Hidup (AHH), terlihat pencapaian AHH Kota Dumai pada tahun 2023 sebesar 71,67 tahun. Bila dibandingkan dengan target AHH Kota Dumai pada tahun 2023 yakni sebesar 71,29-71.33 tahun, maka persentase capaian kinerja adalah sebesar 100% yang berarti pencapaian indikator Sasaran Strategis 1 yakni meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat sangat tinggi dengan atribut capaian indikator kinerja sangat berhasil. Bila dibandingkan dengan AHH pada tahun 2022 yakni sebesar 71.25, maka terlihat ada peningkatan pencapaian AHH Kota Dumai sebesar 0.42 point pada tahun 2023. Lebih lanjut, bila dibandingkan persentase capaian AHH pada tahun 2022 yakni sebesar 100%, maka terlihat persentase capaian kinerja AHH pada tahun 2023 (100%) statis.

Sedangkan untuk Pencapaian Sasaran Strategis 2 yakni meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang ditunjukkan dengan indikator Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), terlihat pencapaian Cakupan JKN pada tahun 2023 sebesar 100.02%. Bila dibandingkan dengan target Cakupan JKN pada tahun 2023 yakni sebesar 97%, maka persentase capaian kinerja adalah sebesar 100% yang berarti pencapaian indikator Sasaran Strategis 2 yakni meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat sangat tinggi dengan atribut capaian indikator kinerja sangat berhasil. Bila dibandingkan dengan Cakupan JKN pada tahun 2022 yakni sebesar 95.80%, maka terlihat ada peningkatan pencapaian Cakupan JKN sebesar 4.22 point pada tahun 2023. Lebih lanjut, bila dibandingkan persentase capaian Cakupan JKN pada tahun 2022 yakni sebesar 100%, maka terlihat persentase capaian kinerja Cakupan JKN pada tahun 2023 (100%) statis.

Tabel 3.10
Evaluasi Pencapaian Indikator Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Kesehatan Kota Dumai 2021-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target, Realisasi dan Persentase Pencapaian Indikator Kinerja								
					2021			2022			2023		
					Target	Realisasi	% Pencapaian	Target	Realisasi	% Pencapaian	Target	Realisasi	% Pencapaian
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan			0.79	0.77	97.47	0.785	0.771	98.22	0.789-0.790	0.778	98.61
			1 Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	71.04	70.98	99.92	71.10	71.25	100.00	71.29-71.33	71.67	100.00
			2 Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Di Kota Dumai	92	87.55	95.16	92.2	95.8	100.00	97	100.02	100.00

3.1.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023

Untuk pengukuran tingkat capaian kinerja IKU Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya. Penilaian pencapaian indikator sasaran IKU menggunakan Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagaimana dimuat dalam Bab II.

Tabel 3.11
Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Dumai
Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Realisasi	% Pencapaian Kinerja	Kategori Nilai
1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1 Menurunnya Mortalitas (Angka Kematian)	%	100	99.45	99.45	Sangat Tinggi
		1.1 Angka Kematian Bayi per 1.000 KH	per 1.000 KH	17	11.36	100	Sangat Tinggi
		1.2 Angka Kematian Balita per 1.000 KH	per 1.000 KH	24	13.42	100	Sangat Tinggi
		1.3 Angka Kematian Ibu per 100.000 KH	per 100.000 KH	101	103.23	97.79	Sangat Tinggi
		1.4 Umur Harapan Hidup	Tahun	71,29-71.33	71.67	100	Sangat Tinggi
		2 Menurunnya Morbiditas (Angka Kesakitan)	%	100	30.44	30.44	Sangat Rendah
		2.1 Angka Kesakitan Malaria (API) per 1.000 penduduk	per 1.000 penduduk	0.8	0.01	100	Sangat Tinggi
		2.2 Persentase Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA +	%	88	72	81.82	Tinggi
		2.3 Prevalensi Penderita HIV Terhadap Penduduk Beresiko	%	< 1	0.18	100	Sangat Tinggi
		2.4 Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk	per 100.000 penduduk	55	198.03	-160.06	Sangat Rendah
		3 Meningkatnya Status Gizi Balita	%	100	100	100	Sangat Tinggi
		3.1 Persentase Balita dengan Gizi Buruk	%	1	0.07	100	Sangat Tinggi
		3.2 Persentase Balita dengan Gizi Kurang	%	3	1.10	100	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	4 Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Dumai	%	97	100.02	100	Sangat Tinggi

Berdasarkan data di atas, secara umum Dinas kesehatan cukup berhasil melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai diwujudkan dalam keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2023 ini. Dari 11 Indikator Kinerja Utama (IKU), ada sebanyak 9 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang nilai pencapaian kinerjanya sangat tinggi (8 IKU tercapai 100% dan 1 IKU tercapai 97.79%), dan sebanyak 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang nilai pencapaian kinerjanya tinggi. Namun, masih ada sebanyak 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang nilai pencapaian kinerjanya sangat rendah yakni Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD).

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang pencapaian kinerjanya sangat rendah tersebut merupakan tantangan bagi Dinas Kesehatan Kota Dumai mengingat dampak pasca pandemik COVID 19 mobilitas penduduk kembali tinggi. Ditambah lagi dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi COVID 19 di Indonesia, maka penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 dan penetapan satus bencana non alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional secara resmi dicabut. Disamping itu, potensi Kota Dumai sebagai Kota Jasa dan Industri, daerah yang memiliki pelabuhan internasional dan sebagai pintu gerbang keluar masuknya bagi wisatawan asing maupun pelaut asing, sebagai daerah transit baik dalam negeri maupun luar negeri, tingginya kepadatan penduduk di daerah perkotaan. Kondisi tersebut berpengaruh pada penyebaran penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) yang berdampak pada tidak tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan tersebut.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat dilihat dari pemenuhan indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk masing-masing sasaran tersebut. Dari 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan, Dinas Kesehatan Kota Dumai cukup berhasil mewujudkan hampir seluruh sasaran tersebut. Perumusan keberhasilan pencapaian sasaran jika indikator keberhasilannya dapat diwujudkan adalah 74.50% dengan kategori nilai **sedang** dan atribut capaian indikator kinerja **berhasil**. Bila dibandingkan dengan pencapaian sasaran IKU Dinas Kesehatan tahun 2022 yakni sebesar 94.92% (kategori nilai sangat tinggi dan atribut capaian indikator kinerja sangat berhasil), maka terlihat ada penurunan pencapaian sasaran IKU Dinas Kesehatan tahun 2023.

Pencapaian sasaran IKU Dinas Kesehatan Kota Dumai dari tahun 2020 s.d 2023 dan proyeksi tahun 2024 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12
Pencapaian sasaran IKU Dinas Kesehatan dari tahun 2020 s.d 2023 dan proyeksi tahun 2024 dan 2025

No	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian				Proyeksi	
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Angka Kematian Bayi	IKU	IKK	SDG's	19 per 1.000 KH	18 per 1.000 KH	17.5 per 1.000 KH	17 per 1.000 KH	7.35 per 1.000 KH	8.26 per 1.000 KH	9.96 per 1.000 KH	11.36 per 1.000 KH	8 per 1.000 KH	8 per 1.000 KH
				Renstra Kes										
2	Angka Kematian Balita	IKU	IKK	SDG's	26 per 1.000 KH	25 per 1.000 KH	24.5 per 1.000 KH	24 per 1.000 KH	8.81 per 1.000 KH	9.82 per 1.000 KH	11.13 per 1.000 KH	13.42 per 1.000 KH	11 per 1.000 KH	10 per 1.000 KH
				Renstra Kes										
3	Angka Kematian Ibu	IKU	IKK	SDG's	102 per 100.000 KH	102 per 100.000 KH	101.5 per 100.000 KH	101 per 100.000 KH	36.73 per 100.000 KH	263.41 per 100.000 KH	58.56 per 100.000 KH	103.23 per 100.000 KH	100.5 per 100.000 KH	100 per 100.000 KH
				Renstra Kes										
4	Angka Harapan Hidup Waktu Lahir (Umur)	IKU	-	RPJMD	71.04 tahun	71.04 tahun	71.10 tahun	71.71-71.29-71.33 tahun	70.93 tahun	70.98 tahun	71.25 tahun	71.67 tahun	71.34-71.37 tahun	71.38-71.42 tahun
				Renstra Kes										
5	Angka Kesakitan Malaria	IKU	IKK	SDG's	1 per 1.000 penduduk	1 per 1.000 penduduk	0.9 per 1.000 penduduk	0.8 per 1.000 penduduk	0.01 per 1.000 penduduk	0.003 per 1.000 penduduk	0.02 per 1.000 penduduk	0.01 per 1.000 penduduk	0.1 per 1.000 penduduk	0.1 per 1.000 penduduk
				Renstra Kes										
6	Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA +	IKU	IKK	Renstra Kes	88%	88%	88%	88%	66.57%	9.35%	41.42%	72.00%	88%	88%
7	Prevalensi Penderita HIV Terhadap Penduduk Beresiko	IKU	-	Renstra Kes	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	2.03%	0.17%	0.16%	0.18%	< 1%	< 1%
8	Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD)	IKU	IKK	SDG's	2 per 100.000 penduduk	55 per 100.000 penduduk	55 per 100.000 penduduk	55 per 100.000 penduduk	114.27 per 100.000 penduduk	15.56 per 100.000 penduduk	56.64 per 100.000 penduduk	198.03 per 100.000 penduduk	54 per 100.000 penduduk	54 per 100.000 penduduk
				Renstra Kes										
9	Persentase Balita dengan Gizi Buruk	IKU	-	Renstra Kes	2%	1%	1%	1%	0.01%	0.03%	0.12%	0.07%	1%	1%
10	Persentase Balita dengan Gizi Kurang	IKU	IKK	SDG's	5%	3%	3%	3%	0.41%	0.38%	0.69%	1.10%	2%	2%
				Renstra Kes										
11	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Dumai	IKU	-	RPJMD	90%	92%	92.2%	97.0%	85.52%	87.55%	95.80%	100.02%	100%	100%
				SDG's										
				Renstra Kes										

Rincian capaian kinerja masing-masing sasaran strategis dapat dilihat dari pencapaian sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Dumai sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

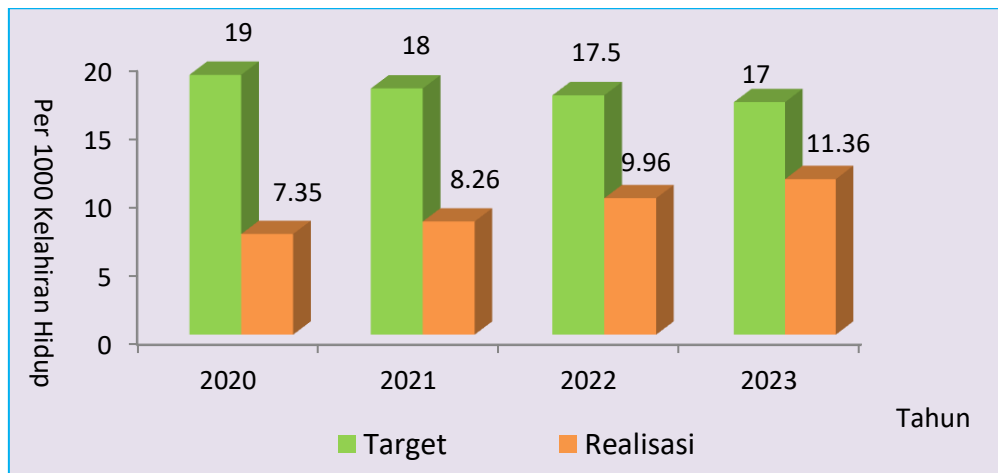
1.1 Menurunnya Mortalitas (Angka Kematian)

Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi mencerminkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan terhadap perinatal. Pada tahun 2023 jumlah kasus kematian bayi yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 99 kasus dari 8.718 kelahiran hidup. Dengan demikian angka kematian bayi di Kota Dumai sebesar 11.36 per 1.000 kelahiran hidup. Target indikator angka kematian bayi tahun 2023 yakni 17 per 1.000 kelahiran hidup, sehingga persentase pencapaian kerjanya 100% yang berarti pencapaian indikator angka kematian bayi sangat tinggi dengan atribut capaian indikator kinerja sangat berhasil.

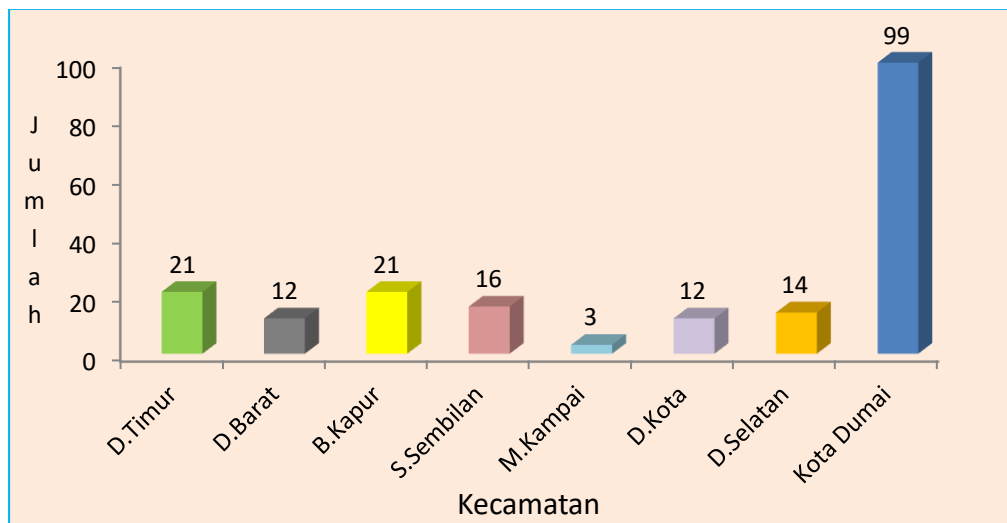
Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2022 dimana angka kematian bayi sebesar 9.96 per 1000 kelahiran hidup, terlihat angka kematian bayi pada tahun 2023 mengalami peningkatan. Bila dibandingkan dengan target indikator Kota Dumai tahun 2023 yakni 17 per 1.000 kelahiran hidup, maka pencapaian angka kematian bayi di Kota Dumai masih di bawah target. Demikian juga bila dibandingkan dengan target Nasional sebesar 17.6 per 1.000 kelahiran hidup, maka pencapaian angka kematian bayi di Kota Dumai masih di bawah target Target Nasional. Hal ini menggambarkan kualitas kuantitas pelayanan kesehatan terhadap perinatal di Kota Dumai masih baik. Pencapaian Angka Kematian Bayi Kota Dumai dari Tahun 2020 sampai dengan 2023 menunjukkan peningkatan, seperti terlihat pada grafik 3.1 berikut ini :

Grafik 3.1
Pencapaian Angka Kematian Bayi Kota Dumai dari Tahun 2020 sampai dengan 2023



Berdasarkan kecamatan, jumlah kasus kematian bayi terbanyak berada di Kecamatan Dumai Timur dan Kecamatan Bukit Kapur masing-masing sebanyak 21 kasus (21.21%), disusul dengan Kecamatan Sungai Sembilan sebanyak 16 kasus (16.16%), seperti terlihat pada grafik 3.2 berikut ini :

Grafik 3.2
Jumlah Kematian Bayi Berdasarkan Kecamatan di Kota Dumai tahun 2023



Penyebab kematian bayi didominasi oleh kasus Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan Asfiksia

Faktor pendukung/pendorong capaian indikator Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran Hidup adalah sebagai berikut:

- a. Merupakan komitmen global (SDG's), komitmen Nasional, Provinsi Riau dan Pemerintah Kota Dumai karena merupakan prioritas dalam RPJMN dan RPJMD Provinsi dan RPJMD Kota Dumai
- b. Inovasi oleh puskesmas, rumah sakit dan Dinas Kesehatan dalam pengelolaan pelayanan kesehatan bayi.
- c. Tersedianya pelayanan ambulance PSC gratis dan pelayanan OPLET SIPAI di Kota Dumai

Faktor penghambat capaian indikator Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran Hidup adalah sebagai berikut:

- a. Puskesmas yang ada di Kota Dumai belum merupakan puskesmas PONED
- b. Belum optimalnya pelayanan PONEK di RSUD kota Dumai karena keterbatasan sarana dan prasarana
- c. Keterlambatan identifikasi komplikasi pada pertumbuhan dan perkembangan janin dan rendahnya pengetahuan keluarga dalam perawatan bayi baru lahir
- d. Kemampuan tenaga kesehatan yang tidak merata di fasilitas pelayanan kesehatan primer dalam penanganan kegawatdaruratan neonatal

Tindak lanjut capaian indikator Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran Hidup adalah sebagai berikut:

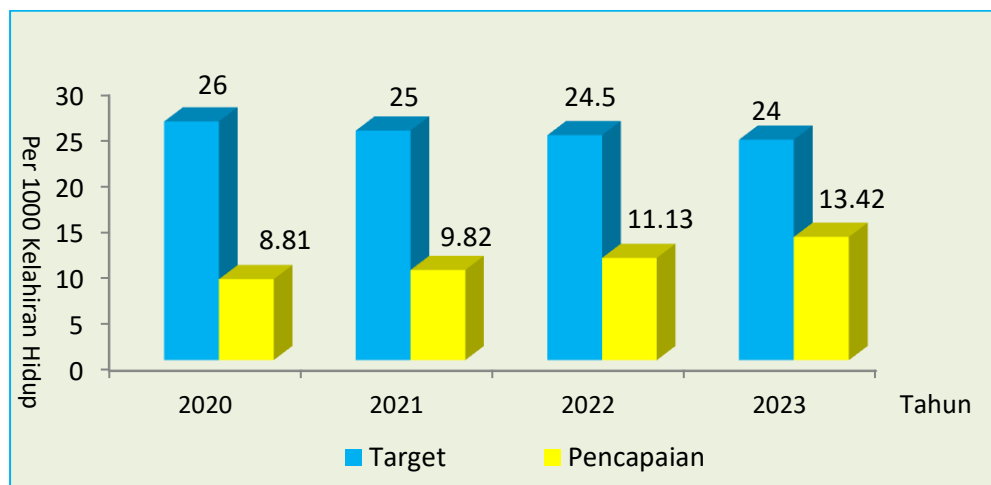
- a. Memperkuat sistem rujukan neonatal resti dan komplikasi
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat melalui program dan keterpaduan lintas program seperti program pencegahan penyakit melalui imunisasi pada bayi dan program perbaikan gizi masyarakat
- c. Meningkatkan edukasi dan promosi kesehatan kepada masyarakat agar menerapkan PHBS salah satunya pentingnya memperhatikan status gizi ibu dan anak, pentingnya memeriksakan kesehatan bayi baru lahir sebanyak 3 kali (usia 0-28 hari) dan pentingnya pengetahuan perawatan bayi baru lahir.
- d. Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan neonatal esensial melalui peningkatan kapasitas dan pelatihan petugas

Angka Kematian Balita

Angka kematian balita menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi dan penyakit infeksi. Pada tahun 2023 jumlah kasus kematian balita yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 117 kasus dari 8.718 kelahiran hidup. Dengan demikian angka kematian balita tahun 2023 di Kota Dumai sebesar 13.42 per 1.000 kelahiran hidup. Target kinerja angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup Kota Dumai pada tahun 2023 adalah sebesar 24 per 1.000 kelahiran hidup, sehingga persentase pencapaian kinerjanya 100% yang berarti pencapaian indikator angka kematian balita sangat tinggi dengan atribut capaian indikator kinerja sangat berhasil.

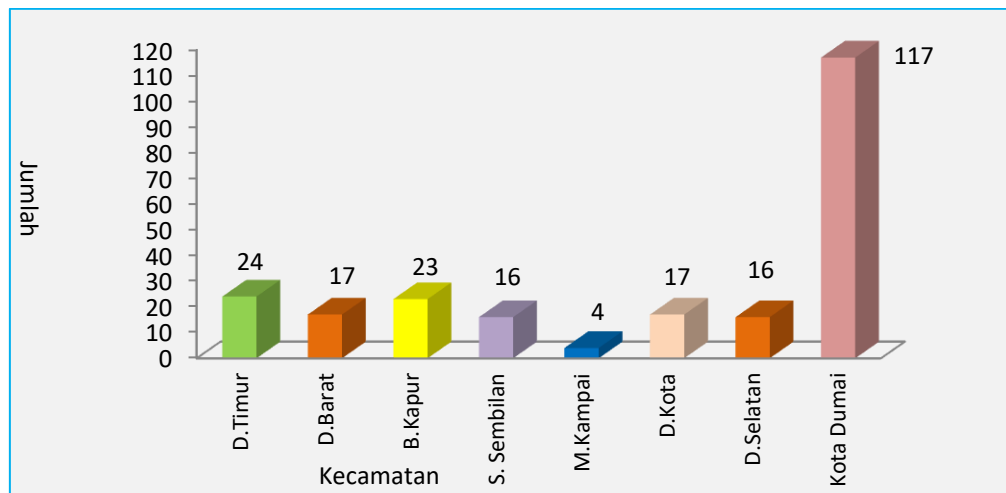
Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2022 dimana angka kematian balita sebesar 11.13 per 1000 kelahiran hidup, maka angka tersebut mengalami peningkatan. Lebih lanjut, bila dibandingkan dengan target indikator Kota Dumai tahun 2023 yakni 24 per 1.000 kelahiran hidup, maka pencapaian angka kematian balita ini masih di bawah target. Pencapaian Angka Kematian Balita Kota Dumai dari Tahun 2020 sampai dengan 2023 menunjukkan peningkatan, seperti terlihat pada grafik 3.3 berikut ini :

Grafik 3.3
Pencapaian Angka Kematian Balita Kota Dumai
dari Tahun 2020 sampai dengan 2023



Berdasarkan Kecamatan, jumlah kasus kematian balita terbanyak berada di Kecamatan Dumai Timur sebanyak 24 kasus (20.51%), Kecamatan Bukit kapur sebanyak 23 kasus (19.66%), disusul Kecamatan Dumai Barat Dan Kecamatan Dumai Kota masing-masing sebanyak 17 kasus (14.53%) seperti terlihat pada grafik 3.4 berikut ini :

Grafik 3.4
Jumlah kematian Balita Berdasarkan Kecamatan
di Kota Dumai Tahun 2023



Penyebab kematian balita masih didominasi oleh BBLR dan Asfiksia.

Faktor pendukung/pendorong capaian indikator Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran Hidup adalah sebagai berikut:

- Merupakan komitmen global (SDG's), komitmen Nasional, Provinsi Riau dan Pemerintah Kota Dumai karena merupakan prioritas dalam RPJMN dan RPJMD Provinsi dan RPJMD Kota Dumai
- Inovasi oleh puskesmas, rumah sakit dan Dinas Kesehatan dalam pengelolaan pelayanan kesehatan balita.
- Tersedianya pelayanan ambulance PSC gratis dan pelayanan OPLET SIPAI di Kota Dumai

Faktor penghambat capaian indikator Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran Hidup adalah sebagai berikut:

- Masih belum kuatnya komitmen masyarakat seperti masih ada ibu yang enggan membawa anaknya ke posyandu untuk dilakukan pemantauan tumbuh kembang balitanya dan masih ada ketua RT yang tidak mendukung kegiatan posyandu.

- b. Kemampuan tenaga kesehatan yang tidak merata di fasilitas pelayanan kesehatan primer dalam penanganan pelayanan kesehatan balita

Tindak lanjut capaian indikator Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran Hidup adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan peran serta masyarakat melalui program dan keterpaduan lintas program seperti program pencegahan penyakit melalui imunisasi pada bayi dan program perbaikan gizi masyarakat
- b. Meningkatkan edukasi dan promosi kesehatan khususnya kepada masyarakat agar menerapkan PHBS salah satunya pentingnya pentingnya memperhatikan status gizi ibu dan anak, pentingnya membawa balita ke posyandu untuk dilakukan pemantauan tumbuh kembang balitanya dan pentingnya pengetahuan gizi ibu dan anak.
- c. Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan balita melalui peningkatan kapasitas dan pelatihan petugas

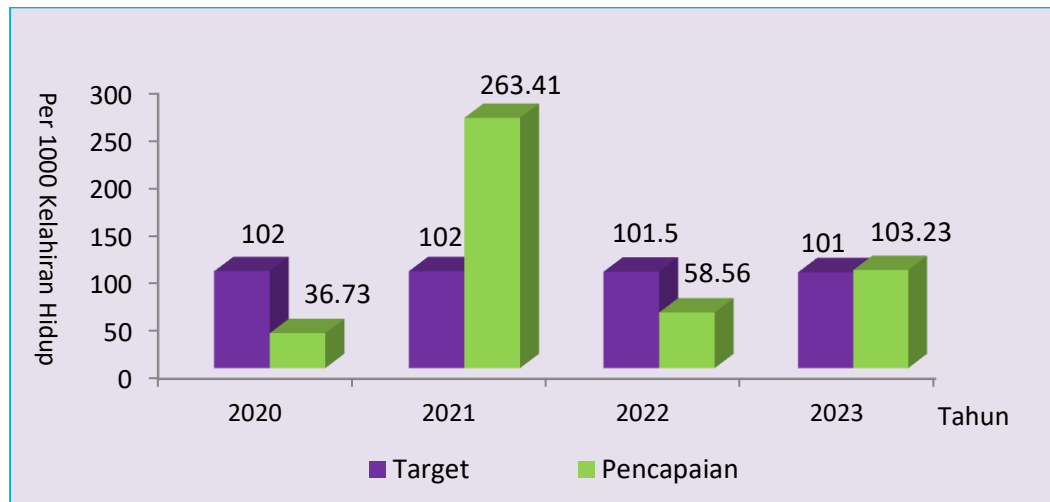
Angka Kematian Ibu

Angka kematian ibu berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kondisi ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, waktu melahirkan dan masa nifas. Pada tahun 2023 jumlah kasus kematian ibu dengan penyebab langsung yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 9 kasus dari 8.718 kelahiran hidup. Dengan demikian angka kematian ibu tahun 2023 di Kota Dumai sebesar 103.23 per 100.000 kelahiran hidup. Target kinerja angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup Kota Dumai pada tahun 2023 adalah sebesar 101 per 100.000 kelahiran hidup, sehingga persentase pencapaiannya 97.79% yang berarti pencapaian indikator angka kematian ibu sangat tinggi dengan atribut capaian indikator kinerja sangat berhasil.

Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2022, di mana angka kematian ibu sebesar 58.56 per 100.000 kelahiran hidup, maka terlihat adanya peningkatan angka kematian ibu pada tahun 2023. Bila dibandingkan dengan target indikator Kota Dumai tahun 2023 yakni 101 per 100.000 kelahiran hidup, maka pencapaian angka kematian ibu ini telah melebihi target (yang berarti tingkat pencapaiannya tidak baik). Namun bila dibandingkan dengan target Nasional sebesar 194 per 100.000

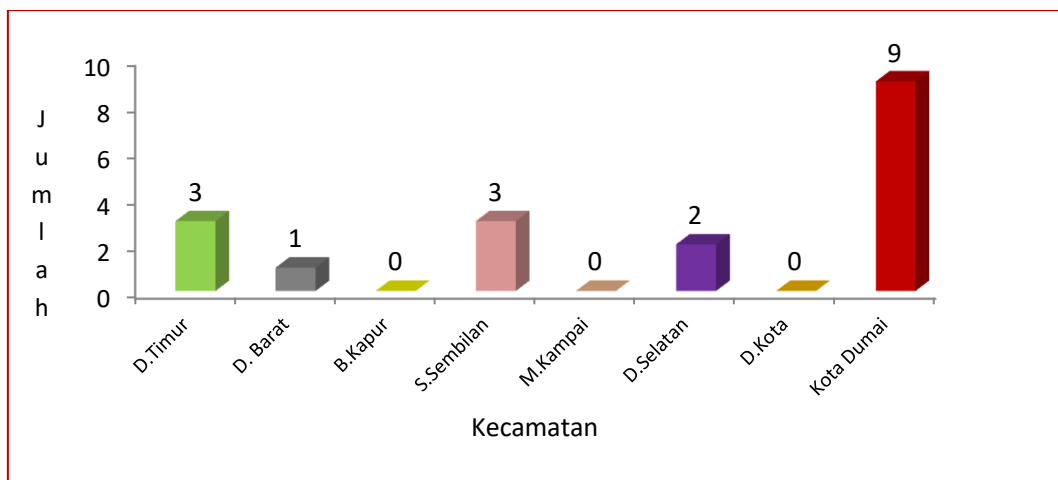
kelahiran hidup, maka pencapaian angka kematian ibu di Kota Dumai masih di bawah Target Nasional. Pencapaian Angka Kematian Ibu Kota Dumai dari Tahun 2020 sampai dengan 2023 menunjukkan fluktuasi dan cenderung meningkat seperti terlihat grafik 3.5 berikut ini :

Grafik 3.5
Pencapaian Angka Kematian Ibu di Kota Dumai
dari Tahun 2020 sampai dengan 2023



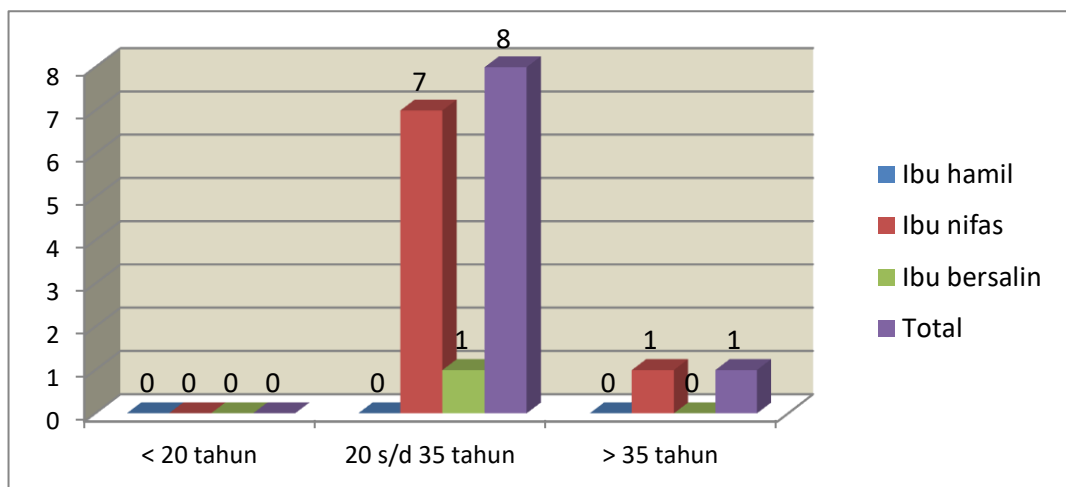
Berdasarkan kecamatan, jumlah kasus kematian ibu terbanyak di Kecamatan Dumai Timur dan Kecamatan Sungai Sembilan masing-masing sebanyak 3 kasus (33.33%), disusul dengan Kecamatan Dumai Selatan sebanyak 2 kasus (22.22%) seperti terlihat pada grafik 3.6 berikut ini :

Grafik 3.6
Jumlah Kematian Ibu Berdasarkan Kecamatan
di Kota Dumai Tahun 2023



Penyebab kematian ibu adalah karena perdarahan sebanyak 4 kasus, gangguan hipertensi sebanyak 3 kasus dan lainnya sebanyak 2 kasus. Berdasarkan kelompok umur, kasus kematian ibu terbanyak terjadi pada kelompok umur 20-35 tahun yakni sebanyak 8 kasus, sedangkan berdasarkan kelompok kematian, mayoritas kasus kematian ibu seluruhnya terjadi pada kelompok ibu nifas sebanyak 8 kasus seperti terlihat pada grafik berikut ini :

Grafik 3.7
Jumlah Kematian Ibu Berdasarkan Jenis Kematian Ibu dan Kelompok Umur di Kota Dumai Tahun 2023



Berdasarkan tempat meninggal, sebanyak 7 kasus atau sebesar 77.78% kematian ibu merupakan kasus rujukan yang meninggal di RSUD Kota Dumai, dan sisanya sebanyak 2 kasus (22.22%) meninggal di rumah pasien. Hal tersebut menunjukkan masih belum optimalnya pelayanan ibu bersalin dan ibu nifas di Kota Dumai.

Faktor pendukung/pendorong capaian indikator Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran Hidup adalah sebagai berikut:

- a. Merupakan komitmen global (SDG's), komitmen Nasional, Provinsi Riau dan Pemerintah Kota Dumai karena merupakan prioritas dalam RPJMN dan RPJMD Provinsi dan RPJMD Kota Dumai
- b. Inovasi oleh puskesmas, rumah sakit dan Dinas Kesehatan dalam pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil hingga ibu nifas.
- c. Tersedianya pelayanan ambulance PSC gratis dan pelayanan OPLET SIPAI di Kota Dumai

Faktor penghambat capaian indikator Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran Hidup adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah tenaga kesehatan yang menangani kesehatan ibu khususnya bidan sudah relatif tersebar ke seluruh wilayah Kota Dumai, namun kompetensi masih belum memadai.
- b. Masih rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) ibu pada masa kehamilan dan persalinan serta adanya keterlambatan dalam mengambil keputusan, keterlambatan dalam mengidentifikasi faktor resiko dan kegawatdaruratan maternal
- c. Masih belum optimalnya pelaksanaan rujukan kasus maternal resti dan komplikasi
- d. Puskesmas yang ada belum merupakan puskesmas PONED
- e. Belum optimalnya kualitas pelayanan kegawat darurat PONEK di RSUD Kota Dumai karena terbatasnya kuantitas dan kualitas/kompetensi serta terbatasnya kapasitas tempat tidur ruang kebidanan sehingga tidak semua rujukan kasus maternal resti dan komplikasi dapat ditangani.

Tindak lanjut capaian indikator Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran Hidup adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas melalui peningkatan kapasitas dan pelatihan petugas
- b. Meningkatkan edukasi dan promosi kesehatan kepada masyarakat agar menerapkan PHBS salah satunya pentingnya memperhatikan status gizi ibu dan anak, pentingnya memeriksakan kehamilan sebanyak 6 kali selama masa kehamilan dan pentingnya pengetahuan perawatan pasca bersalin
- c. Memperkuat sistem rujukan maternal resti dan komplikasi

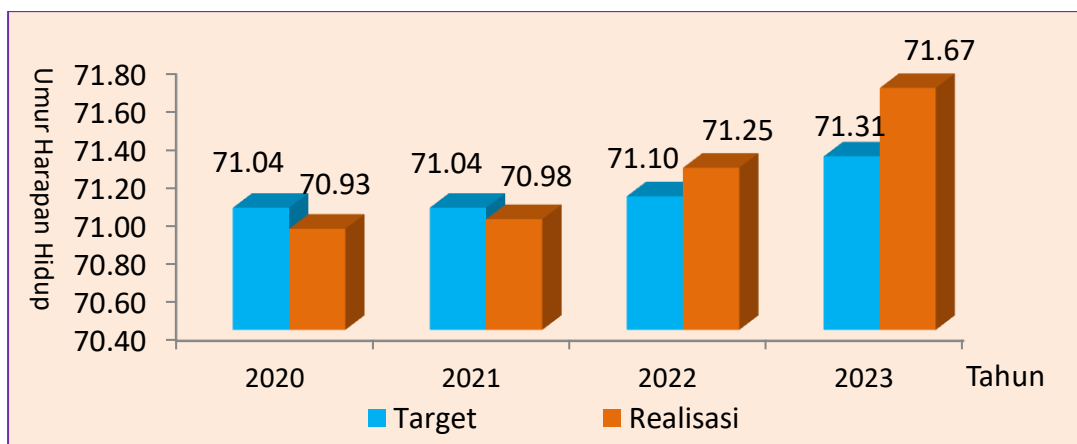
Umur Harapan Hidup

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau pencapaian kinerja Umur Harapan Hidup untuk Kota Dumai pada tahun 2023 adalah sebesar 71,67 tahun. Target kinerja Umur Harapan Hidup

Kota Dumai pada tahun 2023 adalah sebesar 71.29-71,33 tahun, sehingga persentase pencapaian kinerjanya 100% yang berarti pencapaian indikator Umur Harapan Hidup sangat tinggi dengan atribut capaian indikator kinerja sangat berhasil.

Pencapaian Umur Harapan Hidup Kota Dumai dari Tahun 2020 sampai dengan 2023 menunjukkan peningkatan seperti terlihat pada grafik 3.8 berikut ini :

Grafik 3.8
Pencapaian Umur Harapan Hidup Kota Dumai
dari Tahun 2020 sampai dengan 2023



Tabel 3.13
Umur Harapan Hidup (UHH)
di Indonesia, Provinsi Riau dan Kota Dumai
dari Tahun 2020 sampai dengan 2023

No	Tahun	Indonesia	Provinsi Riau	Kota Dumai
1.	2020	71,47	71,60	70,93
2.	2021	71.57	71.67	70.98
3.	2022	71.85	71.95	71.25
4.	2023	73.93	72.24	71.67

Sumber : Badan Pusat Statistik Pusat Tahun 2023

Bila dibandingkan dengan pencapaian Umur Harapan Hidup Provinsi Riau pada tahun 2023 yakni sebesar 71,24 dan pencapaian Umur Harapan Hidup Indonesia pada tahun 2023 yakni sebesar 73.93, terlihat capaian Umur Harapan Hidup Kota Dumai masih di bawah angka Provinsi Riau dan angka Nasional.

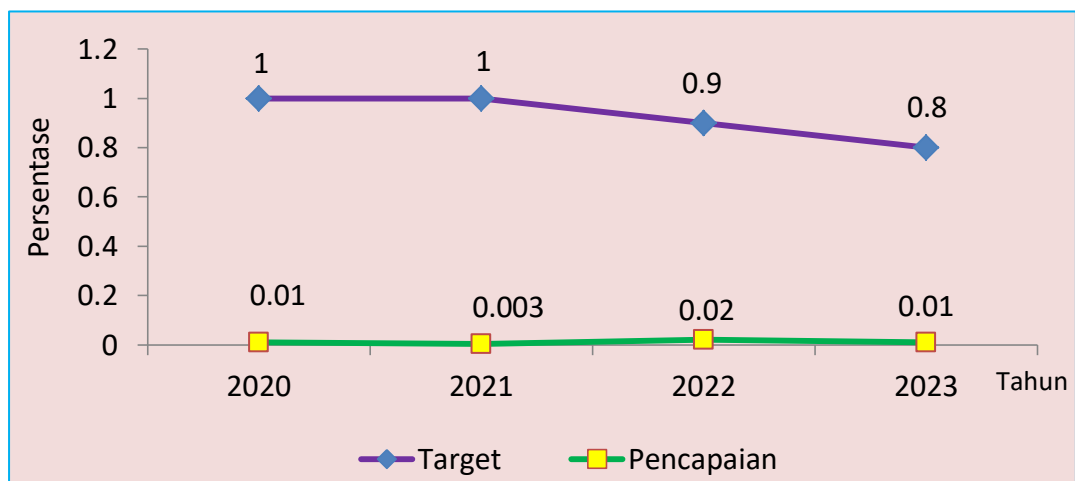
1.2 Menurunnya Morbiditas (Angka Kesakitan)

Angka Kesakitan Malaria

Upaya kegiatan pengendalian vektor melalui penyemprotan rumah (IRS) dapat dinilai belum efektif bila dilihat dari dampak terhadap peningkatan angka malaria klinis. Pada tahun 2023 ditemukan sebanyak 155 kasus malaria klinis. Dari 155 kasus yang ada terdapat 5 kasus penderita malaria positif sehingga didapatkan *Annual Parasite Incidence* (API) sebesar 0.01 per 1.000 penduduk. Target kinerja Angka Kesakitan Malaria atau API (*Annual Parasite Incidence*) Kota Dumai pada tahun 2023 adalah sebesar 0.8 per 1.000 penduduk, sehingga persentase pencapaian kinerjanya 100% yang berarti pencapaian indikator Angka Kesakitan Malaria (API) sangat tinggi dengan atribut capaian indikator kinerja sangat berhasil.

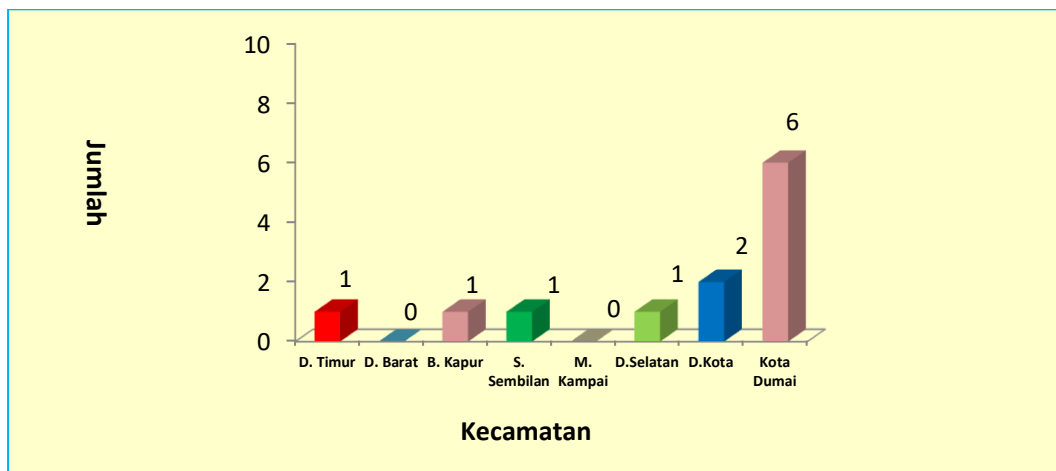
Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2022 di mana *Annual Parasite Incidence* (API) sebesar 0.02 per 1.000 penduduk, terlihat ada sedikit penurunan angka *Annual Parasite Incidence* (API) pada tahun 2023. Bila dibandingkan dengan target indikator Kota Dumai tahun 2023 yakni 0.8 per 1.000 penduduk maka pencapaian *Annual Parasite Incidence* (API) ini masih di bawah target (yang berarti tingkat pencapaiannya masih baik). Seluruh penderita Malaria (100%) telah mendapat pengobatan standar di puskesmas. Pencapaian Angka Kesakitan Malaria Kota Dumai dari Tahun 2020 sampai dengan 2023 berfluktuasi dan cenderung menurun seperti terlihat pada grafik 3.9 dibawah ini :

Grafik 3.9
Pencapaian Angka Kesakitan Malaria
Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2023



Berdasarkan kecamatan, jumlah kasus Malaria positif ditemukan di 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Dumai Kota sebanyak 2 kasus, Kecamatan Dumai Timur sebanyak 1 kasus (kasus import), Kecamatan Dumai Selatan sebanyak 1 kasus, Kecamatan Bukit Kapur sebanyak 1 kasus dan Kecamatan Sungai Sembilan sebanyak 1 kasus seperti terlihat pada grafik 3.10 berikut ini:

Grafik 3.10
Jumlah Kasus Malaria Berdasarkan Kecamatan
Di Kota Dumai Tahun 2023



Faktor pendukung/pendorong capaian indikator Angka Kesakitan Malaria adalah sebagai berikut:

- Adanya komitmen global (SDG's), komitmen Pusat maupun Provinsi Riau terkait eliminasi AIDS, Tuberkulosis dan Malaria (ATM) yang merupakan salah satu sasaran prioritas dalam RPJMN 2020-2024 .
- Kondisi dan situasi kehidupan di masyarakat pasca pandemic COVID 19 mulai berangsur normal, sehingga masyarakat sudah mau berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk memeriksakan kesehatannya.
- Kota Dumai termasuk daerah endemis malaria dan berstatus bebas Malaria. Sejak tahun 2014 Kota Dumai dinyatakan telah eliminasi Malaria oleh Kementerian Kesehatan RI

Faktor penghambat capaian indikator Angka Kesakitan Malaria per 1000 kelahiran Hidup adalah sebagai berikut:

- a. Kota Dumai sebagai Kota Jasa dan Industri, daerah yang memiliki pelabuhan internasional dan sebagai pintu gerbang keluar masuknya penduduk dan tingginya mobilitas penduduk dari dan keluar Kota Dumai
- b. Tingginya tingkat kepadatan penduduk di wilayah perkotaan
- c. Faktor perilaku masyarakat yang belum melaksanakan PHBS dan rendahnya peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan sarang nyamuk
- d. Sebagian besar penduduk Kota Dumai masih menggunakan bak/drum sebagai tempat penampungan air.
- e. Belum tersedianya sarana dan prasarana sanitasi dan sarana air bersih yang layak dan memadai di Kota Dumai

Tindak lanjut capaian indikator Angka Kesakitan Malaria per 1000 kelahiran Hidup adalah sebagai berikut:

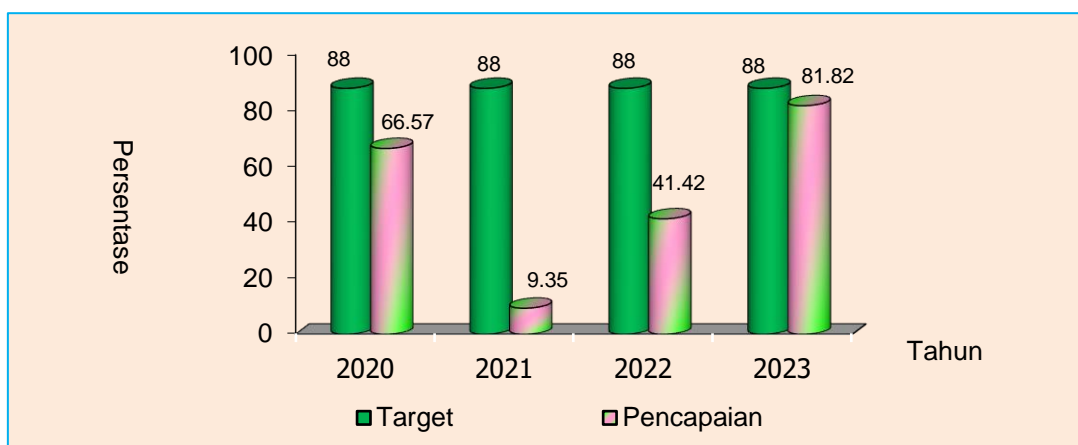
- a. Memperkuat Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) melalui pelaksanaan surveilans malaria, supervisi dan pengendalian vector.
- b. Penguatan upaya pemberantasan sarang nyamuk secara serentak oleh seluruh warga masyarakat secara terus menerus
- c. Penguatan promosi dan edukasi kesehatan di masyarakat agar masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dengan melibatkan lintas sektor, LSM dan tokoh masyarakat.
- d. Puskesmas dan lintas sektor berkolaborasi dalam melakukan pemantauan kegiatan larvasidasi massal yang dilaksanakan secara berkala oleh kader.

Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA +

Pada tahun 2023 dari total 450 penderita TB Paru BTA+ yang ditemukan (12-15 bulan yang lalu) dan diberikan pengobatan dengan OAT selama 6 bulan, hasil evaluasi pengobatan menunjukkan sebanyak 324 orang dinyatakan sembuh (hasil pemeriksaan dahaknya menunjukkan 2 kali negatif). Dengan demikian pencapaian angka kesembuhan penderita TB Paru BTA+ adalah sebesar 72%. Target kinerja Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA+ Kota Dumai pada tahun 2023 adalah sebesar 88%, sehingga persentase pencapaian kinerjanya sebesar 81.82%, yang berarti pencapaian indikator Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA+ tinggi dengan atribut capaian indikator kinerja berhasil.

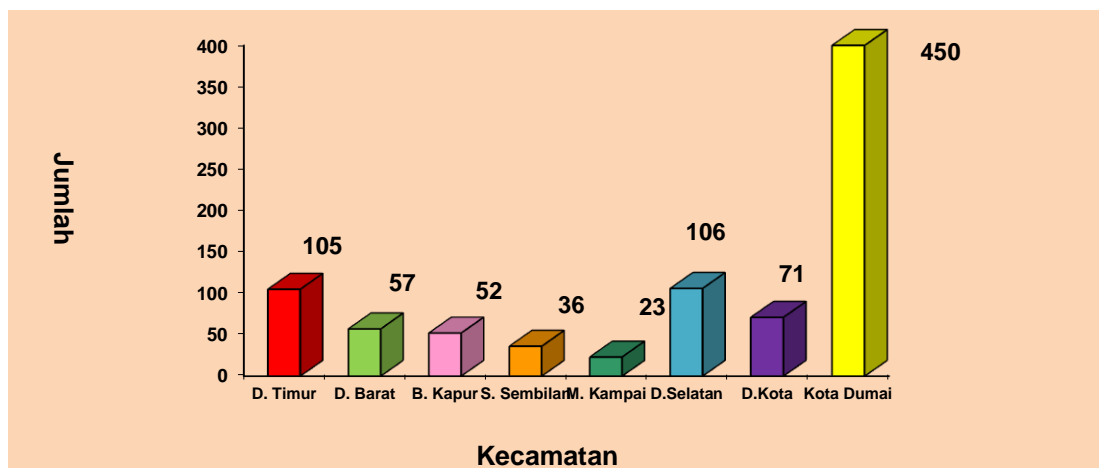
Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2022 sebesar 41.42%, maka terlihat ada peningkatan angka kesembuhan penderita TB Paru BTA+. Bila dibandingkan dengan target Kota Dumai sebesar 88%, maka pencapaian angka kesembuhan penderita TB Paru BTA+ tahun 2023 belum mencapai target. Pencapaian angka kesembuhan penderita TB Paru BTA+ dari tahun 2020 sampai dengan 2023 berfluktuasi dan cenderung meningkat seperti terlihat pada grafik 3.11 berikut ini :

Grafik 3.11
Pencapaian Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA + Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2023



Berdasarkan kecamatan, kasus TB Paru BTA+ banyak terjadi di Kecamatan Dumai Selatan (106 kasus) disusul dengan Kecamatan Dumai Timur (105 kasus) dan Kecamatan Dumai Kota (58 kasus), seperti terlihat pada grafik 3.12 berikut ini :

Grafik 3.12
Jumlah Kasus TB Paru BTA+ Berdasarkan Kecamatan Di Kota Dumai Tahun 2023



Tingginya kasus TB Paru BTA+ di 3 (tiga) kecamatan tersebut disebabkan ke tiga kecamatan tersebut merupakan kecamatan dengan padat penduduk yang memudahkan penularan penyakit TB Paru BTA+.

Dari sebanyak 126 pasien TB Paru BTA+ yang dinyatakan belum sembuh, sebanyak 90 orang atau sebesar 71.43% tetap melakukan pengobatan hingga akhir pengobatan dengan status pengobatan lengkap, sebanyak 0 orang dinyatakan gagal, sebanyak 22 orang atau sebesar 17.46% meninggal dunia, sebanyak 10 orang atau sebesar 7.94% Lost Follow Up (LFU) dan sebanyak 4 orang atau sebesar sebesar 3.17% pindah domisili.

Faktor pendukung/pendorong capaian indikator angka kesembuhan penderita TB Paru BTA + sebagai berikut:

- a. Adanya komitmen global (SDG's), komitmen Pusat maupun Provinsi Riau terkait eliminasi AIDS, Tuberkulosis dan Malaria (ATM) yang merupakan salah satu sasaran prioritas dalam RPJMN 2020-2024 dan merupakan indikator SPM.
- b. Kondisi dan situasi kehidupan di masyarakat pasca pandemic COVID 19 mulai berangsur normal, sehingga masyarakat sudah mau berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk memeriksakan kesehatannya.
- c. Adanya dukungan anggaran dari Pusat melalui APBN (dana transfer) yakni Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik berupa Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

Faktor penghambat capaian indikator angka kesembuhan penderita TB Paru BTA + adalah sebagai berikut:

- a. Kota Dumai sebagai Kota Jasa dan Industri, daerah yang memiliki pelabuhan internasional dan sebagai pintu gerbang keluar masuknya penduduk dan tingginya mobilitas penduduk dari dan keluar Kota Dumai
- b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatannya ke fasilitas pelayanan kesehatan
- c. Masih rendahnya tingkat kepatuhan penderita TB Paru selama masa pengobatan dengan OAT selama 6 bulan
- d. Masih belum optimalnya petugas TB puskesmas melakukan follow up langsung kepada pasien

Tindak lanjut capaian indikator angka kesembuhan penderita TB Paru BTA + adalah sebagai berikut:

- a. Memperkuat promosi kesehatan kepada masyarakat melalui edukasi PHBS khususnya terkait penyakit Tuberkulosis dengan melibatkan lintas sektor, LSM dan tokoh masyarakat.
- b. Meningkatkan edukasi dan promosi kesehatan terkait pengobatan penyakit Tuberkulosis kepada penderita Tuberkulosis
- c. Petugas TB puskesmas melakukan follow up langsung kepada pasien melalui kunjungan rumah

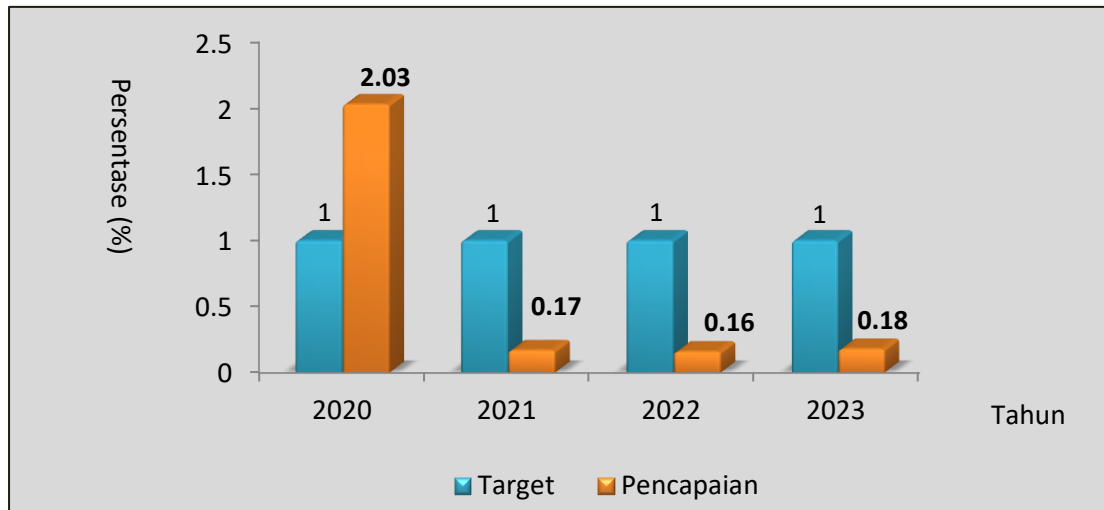
Prevalensi Penderita HIV terhadap Penduduk Beresiko

Sampai dengan akhir tahun 2023, jumlah kumulatif kasus HIV yang dijumpai di Kota Dumai sebanyak 595 kasus yang terdiri dari 547 kasus lama dan 48 kasus baru yang ditemukan tahun 2023. Dari 595 kasus HIV yang ditemukan, jumlah penderita HIV yang meninggal sebanyak 121 kasus, Lost Follow Up (LFU) sebanyak 98 kasus (hilang kontak) dan sebanyak 8 kasus berhenti minum obat ARV, sehingga jumlah penderita HIV yang hidup sampai saat ini adalah 368 orang terdiri penderita HIV Laki-laki sebanyak 191 orang (51.90%) dan penderita HIV Perempuan sebanyak 177 orang (48.10%). Dengan demikian prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko (sasaran kelompok usia produktif usia 15-59 tahun sebanyak 209.297 orang) pada tahun 2023 adalah sebesar 0.18%. Target kinerja Prevalensi Penderita HIV terhadap Penduduk Beresiko Kota Dumai pada tahun 2023 adalah sebesar <1%, sehingga persentase capaian kinerja adalah sebesar 100%, yang berarti pencapaian indikator Prevalensi Penderita HIV terhadap Penduduk Beresiko sangat tinggi dengan atribut capaian indikator kinerja sangat berhasil.

Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2022 dimana prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko sebesar 0.16%, maka terlihat ada peningkatan angka prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko pada tahun 2023. Lebih lanjut, bila dibandingkan dengan target Kota Dumai tahun 2023 sebesar <1%, maka pencapaian tersebut masih dibawah target.

Pencapaian Prevalensi Penderita HIV terhadap Penduduk Beresiko dari tahun 2020 sampai dengan 2023 menunjukkan bahwa Prevalensi Penderita HIV terhadap Penduduk Beresiko Kota Dumai berfluktuasi dan cenderung meningkat seperti terlihat pada grafik 3.13 berikut ini :

Grafik 3.13
Prevalensi Penderita HIV Terhadap Penduduk Beresiko
Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2023

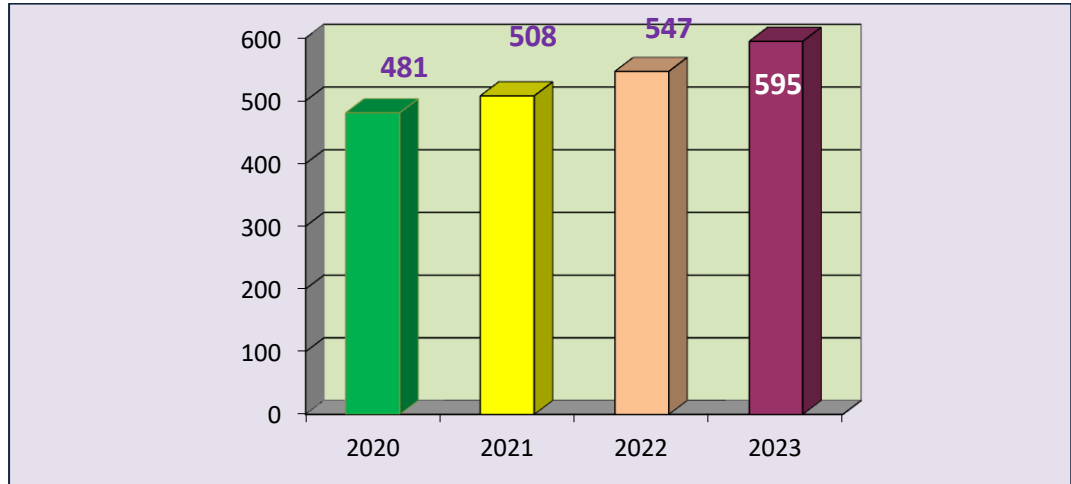


Melihat potensi Kota Dumai sebagai Kota Jasa dan Industri, daerah yang memiliki pelabuhan internasional dan sebagai pintu gerbang keluar masuknya bagi wisatawan asing maupun pelaut asing, serta mobilisasi penduduk dari dan ke kabupaten/kota yang memiliki angka prevalensi HIV/AIDS cukup tinggi seperti Kota Batam, Tanjung Balai Karimun, serta Kepulauan Riau, maka tidak tertutup besar kemungkinannya penyakit HIV/AIDS akan menjadi permasalahan di Kota Dumai. Meskipun pencapaian angka prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko Kota Dumai rendah, hal tersebut perlu tetap diwaspadai karena kasus HIV merupakan fenomena gunung es.

Pada tahun 2023 pencapaian angka insidensi HIV per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV di Kota Dumai sebesar 0.14 per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2022 dimana angka insidensi HIV per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV di Kota Dumai sebesar 0.10 per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV, maka terlihat ada peningkatan angka insidensi HIV per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV pada tahun 2023. Bila dibandingkan

dengan target Kota Dumai tahun 2023 sebesar 0.13 per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV, maka pencapaian tersebut telah melebihi target.

Grafik 3.14
Data Kumulatif Kasus HIV Kota Dumai Dari Tahun 2020 s/d 2023



Faktor pendukung/pendorong capaian indikator Prevalensi Penderita HIV Terhadap Penduduk Beresiko adalah sebagai berikut:

- Adanya komitmen global (SDG's), komitmen Pusat maupun Provinsi Riau terkait eliminasi AIDS, Tuberkulosis dan Malaria (ATM) yang merupakan salah satu sasaran prioritas dalam RPJMN 2020-2024 dan merupakan indikator SPM.
- Kondisi dan situasi kehidupan di masyarakat pasca pandemic COVID 19 mulai berangsur normal, sehingga masyarakat sudah mau berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk memeriksakan kesehatannya.
- Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Dumai sudah kembali aktif pada tahun 2023 dengan dukungan dana Hibah dari Pemerintah Kota Dumai

Faktor penghambat capaian indikator Prevalensi Penderita HIV Terhadap Penduduk Beresiko adalah sebagai berikut:

- Kota Dumai sebagai Kota Jasa dan Industri, daerah yang memiliki pelabuhan internasional dan sebagai pintu gerbang keluar masuknya penduduk dan tingginya mobilitas penduduk dari dan keluar Kota Dumai
- Adanya dogma di masyarakat terhadap penderita HIV/AIDS sehingga mereka dikucilkan

- c. Masih minimnya anggaran untuk penanganan HIV/AIDS di Kota Dumai sehingga penanganan HIV/AIDS belum optimal
- d. Masih ada beberapa pengusaha tempat-tempat hiburan dan hotel/penginapan yang tidak mengizinkan petugas kesehatan untuk melakukan skrining pemeriksaan HIV/AIDS di tempat usahanya

Tindak lanjut capaian indikator Prevalensi Penderita HIV Terhadap Penduduk Beresiko adalah sebagai berikut:

- a. Memperkuat layanan voluntary counseling & testing (VCT) dan layanan care, support & treatment (CST) di fasilitas pelayanan kesehatan Kota Dumai
- b. Memperkuat kerjasama multisektor dalam menyelesaikan permasalahan HIV/AIDS baik itu Pemerintah, swasta, LSM, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat melalui upaya yang terkoordinasi, terencana, terarah dan berkesinambungan.
- c. Meningkatkan edukasi dan promosi kesehatan tentang HIV/AIDS terutama pada semua populasi kunci dalam rangka upaya pencegahan HIV/AIDS
- d. Meminta dukungan regulasi dan anggaran dari Pemerintah Kota Dumai untuk melakukan skrining pemeriksaan HIV/AIDS di tempat-tempat hiburan dan hotel/penginapan

Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD)

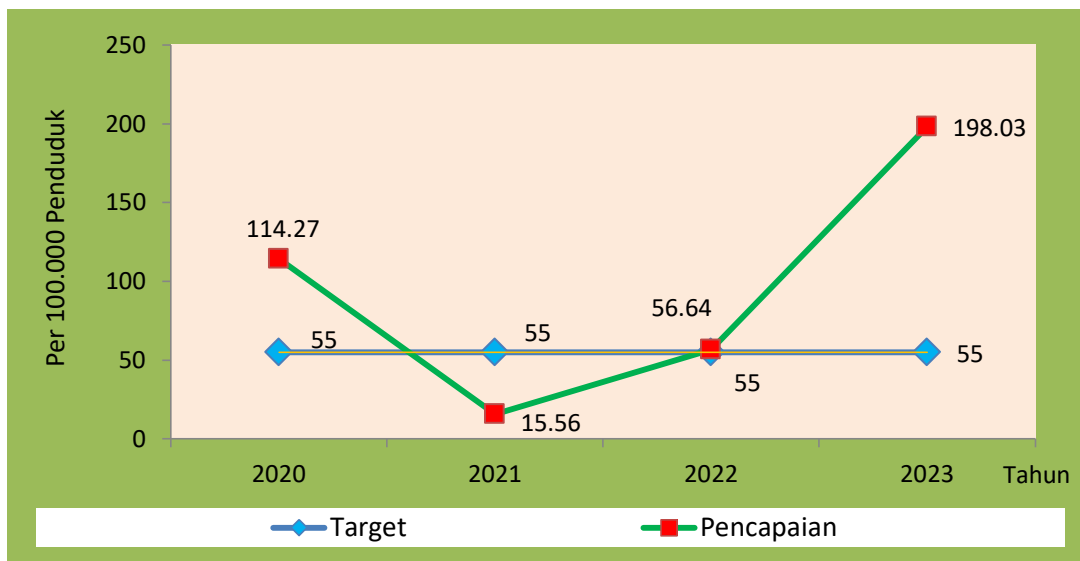
Kota Dumai merupakan daerah endemis Demam Berdarah Dengue (DBD). Pada tahun 2023 di Kota Dumai ditemukan kasus DBD sebanyak 664 kasus atau Incidence Rate (IR) = 198.03 per 100.000 penduduk dengan angka kematian sebanyak 9 orang atau CFR = 1.37%. Target kinerja Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) Kota Dumai pada tahun 2023 adalah sebesar 55 per 100.000 penduduk, sehingga persentase capaian kinerja adalah sebesar -160.06%, yang berarti pencapaian indikator Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) sangat rendah dengan atribut capaian indikator kinerja tidak berhasil.

Bila dibandingkan dengan tahun 2022 dimana ditemukan kasus DBD sebanyak 186 kasus atau IR = 56.64 per 100.000 penduduk dengan

kematian sebanyak 0 orang atau CFR = 0 %, maka ada peningkatan angka kesakitan Demam Berdarah Dengue yang signifikan pada tahun 2023. Lebih lanjut, bila dibandingkan dengan target Kota Dumai tahun 2023 sebesar 55 per 100.000 penduduk, maka pencapaian tersebut telah melebihi target.

Pencapaian angka kesakitan DBD Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2023 menunjukkan fluktuasi dan cenderung meningkat seperti terlihat pada grafik 3.15 berikut ini

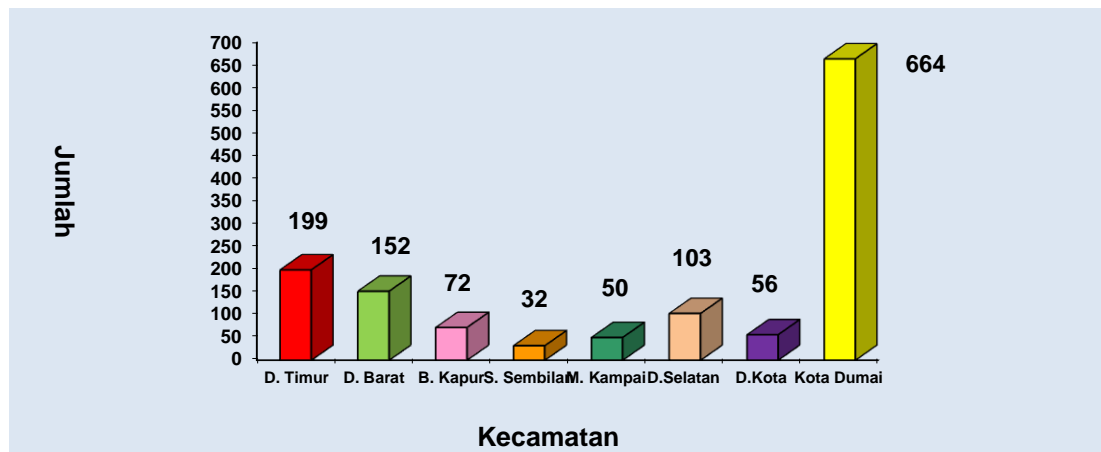
Grafik 3.15
Pencapaian Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue
Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2023



Tingginya angka kesakitan DBD terutama disebabkan oleh faktor perilaku, lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat yang masih mendukung sebagai tempat berkembang biaknya nyamuk vektor DBD seperti ±80% penduduk Dumai masih menggunakan bak-bak penampung air hujan (PAH) dalam memenuhi kebutuhan air bersih, serta tingginya mobilitas penduduk. Di samping itu, dampak dari global warming juga memicu meningkatnya angka kesakitan DBD. Dari hasil pengamatan data jumlah kasus DBD dalam kurun waktu tertentu menunjukkan grafik naik turun. Berdasarkan pengamatan tersebut, ada suatu masa yang menunjukkan pola jumlah kasus DBD yang lebih tinggi di banding waktu-waktu lainnya, yang biasanya muncul setiap lima tahun. Inilah yang kemudian di sebut dengan siklus lima tahunan DBD.

Berdasarkan kecamatan, jumlah kasus DBD terbanyak ditemukan di Kecamatan Dumai Timur yakni sebanyak 199 kasus (29.97%), disusul dengan Kecamatan Dumai Barat sebanyak 152 kasus (22.89%) dan Kecamatan Dumai Selatan sebanyak 103 kasus (15.51%), seperti terlihat pada grafik 3.16 berikut ini :

Grafik 3.16
Jumlah Kasus DBD Berdasarkan Kecamatan
Di Kota Dumai Tahun 2023



Untuk meminimalisir dan mencegah penularan kasus DBD dilakukan dengan metode fogging focus. Fogging atau pengasapan dilakukan untuk memutuskan rantai penularan dengan cara membunuh nyamuk dewasa yang telah Infektif (terinfeksi Virus Dengue). Nyamuk yang telah menggigit penderita akan menjadi infektif dan apabila tidak dibunuh maka selama hidup nyamuk tersebut akan menjadi sumber penyebaran penyakit DBD. Kegiatan fogging focus dilakukan setiap ditemukan kasus tersangka DBD berdasarkan rekomendasi hasil penyelidikan epidemiologi (PE) dengan luas daerah penyemprotan atau radius 200 M² dan dilakukan di 250 fokus sebanyak 2 siklus dengan interval 1 (satu) minggu. Namun demikian, fogging/ pengasapan bukanlah solusi dalam upaya pengendalian penyakit demam berdarah, upaya yang paling efektif adalah dengan pemberantasan sarang nyamuk secara serentak oleh seluruh warga masyarakat dan secara terus menerus.

Faktor pendukung/pendorong capaian indikator Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue adalah sebagai berikut:

- a. Kondisi dan situasi kehidupan di masyarakat pasca pandemic COVID 19 mulai berangsur normal, sehingga masyarakat sudah mau berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk memeriksakan kesehatannya.

Faktor penghambat capaian indikator Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue adalah sebagai berikut:

- a. Kota Dumai sebagai Kota Jasa dan Industri, daerah yang memiliki pelabuhan internasional dan sebagai pintu gerbang keluar masuknya penduduk dan tingginya mobilitas penduduk dari dan keluar Kota Dumai
- b. Faktor iklim, yakni perubahan cuaca yang ekstrim yang berakibat adanya banjir dan Kota Dumai merupakan daerah endemis DBD
- c. Tingginya tingkat kepadatan penduduk di wilayah perkotaan
- d. Faktor perilaku masyarakat yang belum melaksanakan PHBS dan rendahnya peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan sarang nyamuk serta adanya paradigma di masyarakat dalam pencegahan DBD masih berorientasi pada fogging
- e. Sebagian masyarakat penduduk Kota Dumai masih menggunakan bak/drum sebagai tempat penampungan air.
- f. Belum tersedianya sarana dan prasarana sanitasi dan sarana air bersih yang layak dan memadai di Kota Dumai

Tindak lanjut capaian indikator Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan upaya pemberantasan sarang nyamuk secara serentak oleh seluruh warga masyarakat secara terus menerus
- b. Penguatan promosi dan edukasi kesehatan di masyarakat agar masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dengan melibatkan lintas sektor, LSM dan tokoh masyarakat.
- c. Puskesmas dan lintas sektor berkolaborasi dalam melakukan pemantauan kegiatan larvasidasi massal yang dilaksanakan secara berkala oleh kader.
- d. Permasalahan DBD baru bisa teratasi apabila tersedianya sarana dan prasarana sanitasi yang layak juga tersedianya sarana air bersih yang layak. Permasalahan DBD tidak bisa diselesaikan hanya oleh Dinas

Kesehatan sendiri, tapi memerlukan kolaborasi dan koordinasi dengan OPD terkait lainnya seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Pemukiman dan Dinas Lingkungan Hidup.

1.3 Meningkatnya Status Gizi Balita

Persentase Balita Dengan Gizi Buruk

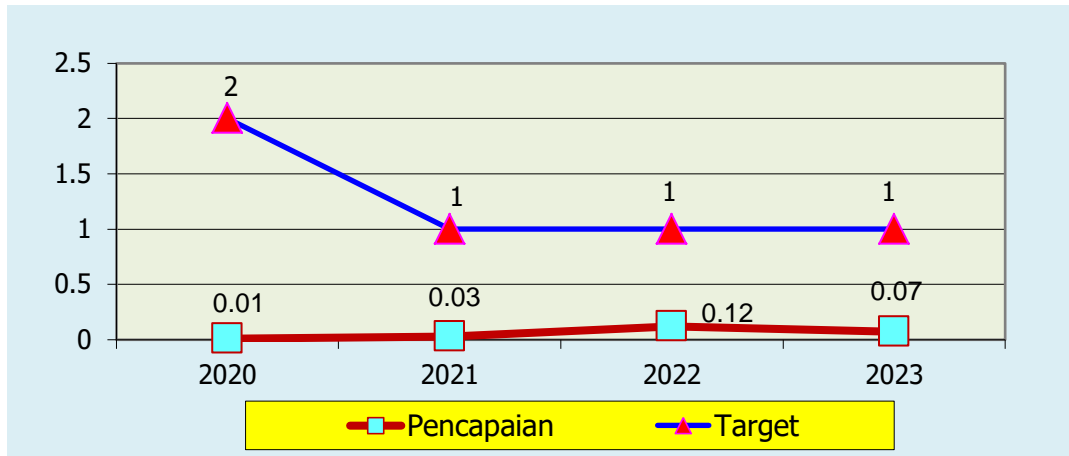
Status gizi sangat erat kaitannya dengan permasalahan kesehatan secara umum, karena disamping merupakan faktor predisposisi yang dapat memperparah penyakit infeksi secara langsung dan juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan individual. Bahkan status gizi janin yang masih berada dalam kandungan dan bayi yang sedang menyusui sangat dipengaruhi oleh status gizi ibu hamil dan ibu menyusui. Pengukuran gizi pada balita difokuskan pada tingkat kecukupan gizinya yang diukur melalui berat badan terhadap umur atau berat badan terhadap tinggi badan yang dilakukan di posyandu. Menurut Departemen Kesehatan RI (2008), gizi buruk adalah suatu keadaan kurang gizi tingkat berat pada anak berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) ≤ 3 standar deviasi WHO-NCHS dan ditemukan tanda-tanda klinis marasmus, kwashiorkor, dan marasmus-kwashiorkor.

Pada tahun 2023 ditemukan kasus balita dengan gizi buruk sebanyak 13 kasus dari 19.267 balita yang ditimbang. Dengan demikian persentase balita dengan gizi buruk di Kota Dumai adalah sebesar 0,07%. Target kinerja persentase balita dengan gizi buruk Kota Dumai pada tahun 2023 adalah sebesar 1%, sehingga persentase capaian kinerja adalah sebesar 100%, yang berarti pencapaian indikator persentase balita dengan gizi buruk sangat tinggi dengan atribut capaian indikator kinerja sangat berhasil.

Bila dibandingkan dengan tahun 2022 dimana ditemukan kasus gizi buruk sebanyak 23 kasus dengan persentase balita dengan gizi buruk sebesar 0.12%, maka ada penurunan kasus gizi buruk pada tahun 2023. Lebih lanjut, bila dibandingkan dengan target Kota Dumai Tahun 2023 yakni sebesar 1%, maka pencapaian tersebut masih di bawah target. Pencapaian persentase balita dengan gizi buruk Kota Dumai dari tahun 2020 sampai

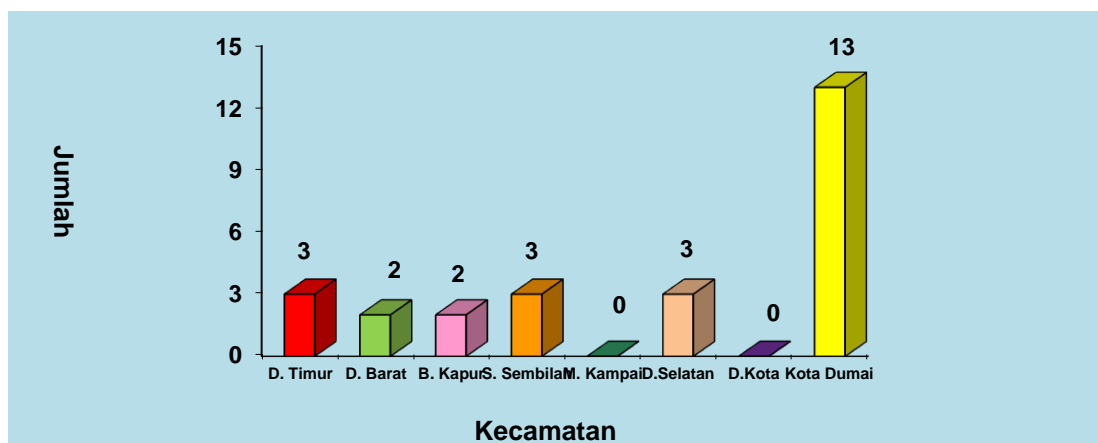
dengan 2023 menunjukkan bahwa persentase balita dengan gizi buruk mengalami fluktuasi seperti terlihat pada grafik 3.17 berikut ini

Grafik 3.17
Pencapaian Persentase Balita Dengan Gizi Buruk Kota Dumai dari Tahun 2020 sampai dengan 2023



Berdasarkan kecamatan, kasus balita dengan gizi buruk terbanyak ditemukan di Kecamatan Dumai Timur, Kecamatan Dumai Selatan dan Kecamatan Sungai Sembilan masing-masing sebanyak 3 kasus, seperti terlihat pada grafik 3.18 berikut ini :

Grafik 3.18
Jumlah Kasus Balita dengan Gizi Buruk Berdasarkan Kecamatan Di Kota Dumai Tahun 2023



Terhadap 13 kasus gizi buruk tersebut telah dilakukan intervensi berupa pemberian PMT pemulihan berupa susu bubuk formula 100 kkal/100 ml atau 150 gram per hari dan biskuit) selama 90 hari, pemberian larutan F100 dan pemantauan setiap minggunya oleh Tim Pemantau Gizi (TPG)

puskesmas dengan cara melakukan pengukuran antropometri yaitu menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan balita, pemeriksaan klinis oleh dokter puskesmas, dan pemberian konseling serta penyuluhan gizi kepada ibu atau pengasuhnya. Dari 13 balita gizi buruk yang diintervensi sampai akhir tahun 2023, tinggal sebanyak 4 balita yang masih berstatus gizi buruk karena balita tersebut juga menderita penyakit penyerta. Agar status gizi balita tersebut dapat ditingkatkan menjadi gizi baik, maka penyakit penyertanya harus disembuhkan terlebih dahulu.

Faktor pendukung/pendorong capaian indikator persentase balita dengan gizi buruk adalah sebagai berikut:

- a. Merupakan komitmen global (SDG's), adanya komitmen dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kota Dumai
- b. Adanya dukungan dari Tim Penggerak PKK Kota Dumai serta lintas sektor lainnya
- c. Adanya dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat melalui APBN yakni DAK Non Fisik berupa Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk Puskesmas dan Dinas Kesehatan dan Hibah dari Pemerintah Provinsi Riau (Dinas Kesehatan Provinsi Riau) melalui pendistribusian PMT untuk balita dan ibu hamil ke puskesmas se Kota Dumai berupa biskuit dan susu.

Faktor penghambat capaian indikator persentase balita dengan gizi buruk adalah sebagai berikut:

- a. Tingginya mobilitas penduduk Kota Dumai dan penduduk pendatang yang tidak mempunyai kartu identitas KTP Kota Dumai
- b. Faktor social budaya masyarakat seperti pola asuh balita
- c. Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pelayanan posyandu pasca pandemic COVID 19 yakni masih ada masyarakat yang enggan untuk membawa anaknya ke posyandu untuk dilakukan pemantuan pertumbuhan dan perkembangan balita dan pemberian pelayanan kesehatan lainnya seperti imunisasi dan pemberian vitamin A. Pada tahun 2023 persentase balita ditimbang di Kota Dumai sebesar 42.88%.

Tindak lanjut capaian indikator persentase balita dengan gizi buruk adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kolaborasi antara petugas puskesmas dan kader posyandu dalam melakukan sweeping ke rumah-rumah penduduk yang memiliki balita dan memberikan edukasi pentingnya membawa balita ke posyandu agar status kesehatannya terpantau terutama status gizinya.
- b. Optimalisasi implementasi kegiatan perawatan kesehatan masyarakat (perkesmas) salah satunya melalui pelacakan kasus balita dengan masalah gizi di masyarakat dan penguatan penyuluhan gizi.
- c. Penguatan fungsi posyandu melalui penguatan peran kader posyandu serta peran PKK

Persentase Balita Dengan Gizi Kurang

Gizi Kurang adalah gangguan kesehatan akibat kekurangan atau ketidakseimbangan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan, aktivitas berfikir dan semua hal yang berhubungan dengan kehidupan. Kekurangan zat gizi adaptif bersifat ringan sampai dengan berat. Gizi kurang banyak terjadi pada anak usia kurang dari 5 tahun. Menurut Departemen Kesehatan RI (2008), gizi kurang adalah suatu keadaan kurang gizi tingkat berat pada anak berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) < 2 s/d -3 standar deviasi WHO-NCHS.

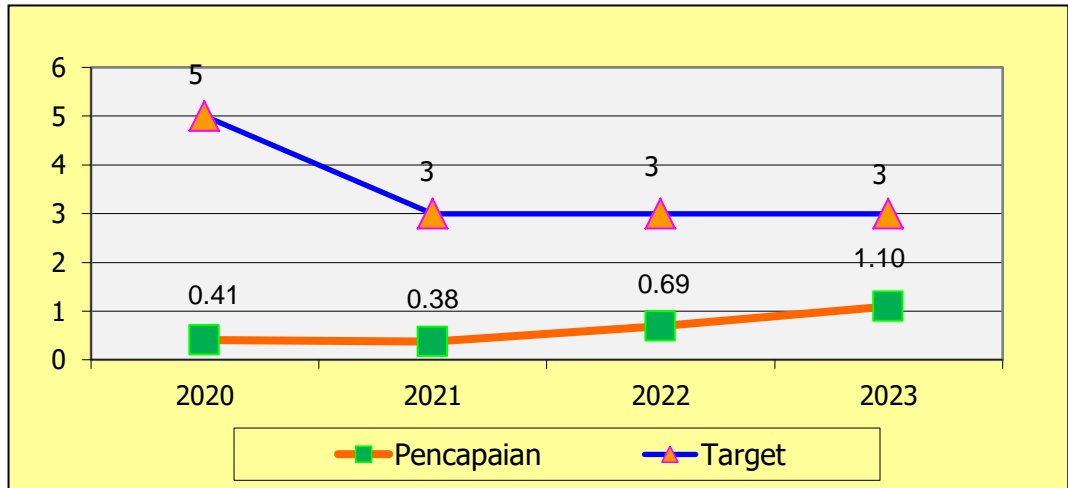
Pada tahun 2023 ditemukan kasus balita dengan gizi kurang sebanyak 212 kasus dari 19.267 balita yang ditimbang. Dengan demikian persentase balita dengan gizi kurang di Kota Dumai adalah sebesar 1.10%. Target kinerja persentase balita dengan gizi kurang Kota Dumai pada tahun 2023 adalah sebesar 3%, sehingga persentase capaian kinerja adalah sebesar 100%, yang berarti pencapaian indikator persentase balita dengan gizi kurang sangat tinggi dengan atribut capaian indikator kinerja sangat berhasil.

Bila dibandingkan dengan tahun 2022 dimana kasus balita dengan gizi kurang yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 133 kasus dengan persentase balita dengan gizi kurang sebesar 0.69%, terlihat ada peningkatan kasus balita dengan gizi kurang pada tahun 2023. Lebih lanjut,

bila dibandingkan dengan target Kota Dumai Tahun 2023 yakni sebesar 3%, maka pencapaian tersebut masih di bawah target.

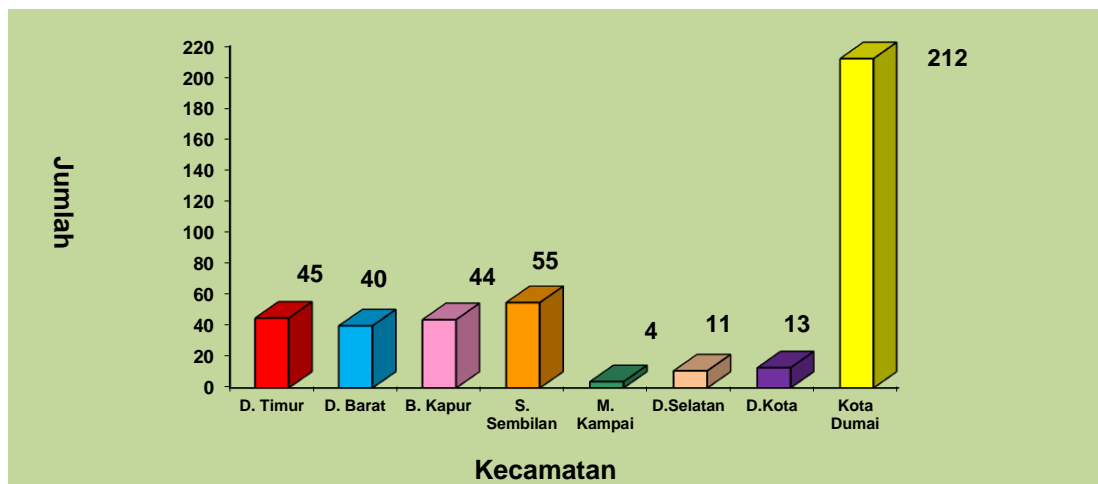
Pencapaian Persentase Balita Dengan Gizi Kurang Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2023 menunjukkan fluktuasi dan cenderung meningkat seperti terlihat pada grafik 3.19 berikut ini:

Grafik 3.19
Pencapaian Persentase Balita Dengan Gizi Kurang Kota Dumai dari Tahun 2020 sampai dengan 2023



Berdasarkan kecamatan, kasus balita dengan gizi kurang terbanyak ditemukan di Kecamatan Sungai Sembilan sebanyak 55 kasus (25.94%) disusul dengan Kecamatan Dumai Timur sebanyak 45 kasus (21.23%), dan Kecamatan Bukit Kapur sebanyak 44 kasus (20.75%) seperti terlihat pada grafik 3.20 berikut ini :

Grafik 3.20
Jumlah Kasus Balita dengan Gizi Kurang Berdasarkan Kecamatan Di Kota Dumai Tahun 2023



Terhadap balita gizi kurang tersebut dilakukan intervensi berupa pemberian PMT pemulihan berupa pemberian makanan tambahan lokal dan pabrikan dan pemantauan setiap minggunya dengan cara melakukan pengukuran antropometri yaitu menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan balita. Dari 212 balita gizi kurang yang diintervensi sampai akhir tahun 2023, sebanyak 92 balita mengalami peningkatan status gizi menjadi gizi baik dan hanya 120 balita yang tetap dalam keadaan status gizi kurang.

Ada beberapa faktor penyebab kasus balita gizi kurang antara lain karena pola makan balita yang salah, ketidaktepatan pola asuh, faktor sosial dan ekonomi yang mempengaruhi terhadap kemampuan membeli pangan keluarga, serta adanya penyakit penyerta yang diderita balita. Dengan demikian dalam upaya mencapai target penurunan persentase gizi kurang tersebut, perlu adanya penanganan intensif terhadap permasalahan gizi kurang yang ada di Kota Dumai. Selain itu, untuk menekan agar potensi terjadinya kasus balita dengan gizi kurang tidak menjadi lebih besar tetap perlu diperlukan upaya- upaya yang strategis. Upaya yang sudah dilaksanakan adalah dengan pemberian makanan tambahan, konseling dan pengobatan di puskesmas, serta perawatan di Kota Dumai.

Faktor pendukung/pendorong capaian indikator persentase balita dengan gizi kurang adalah sebagai berikut:

- a. Merupakan komitmen global (SDG's), adanya komitmen dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kota Dumai
- b. Adanya dukungan dari Pemerintah Kota Dumai dan Tim Penggerak PKK Kota Dumai serta lintas sektor lainnya
- c. Adanya dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat melalui APBN yakni DAK Non Fisik berupa Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk Puskesmas dan Dinas Kesehatan dan Hibah dari Pemerintah Provinsi Riau (Dinas Kesehatan Provinsi Riau) melalui pendistribusian PMT untuk balita dan ibu hamil ke puskesmas se Kota Dumai berupa biskuit dan susu.

Faktor penghambat capaian indikator persentase balita dengan gizi kurang adalah sebagai berikut:

- a. Tingginya mobilitas penduduk Kota Dumai dan penduduk pendatang yang tidak mempunyai kartu identitas KTP Kota Dumai
- b. Faktor social budaya masyarakat seperti pola asuh balita
- c. Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pelayanan posyandu pasca pandemic COVID 19 yakni masih ada masyarakat yang enggan untuk membawa anaknya ke posyandu untuk dilakukan pemantuan pertumbuhan dan perkembangan balita dan pemberian pelayanan kesehatan lainnya seperti imunisasi dan pemberian vitamin A. Pada tahun 2023 persentase balita ditimbang di Kota Dumai sebesar 42.88%.

Tindak lanjut capaian indikator persentase balita dengan gizi buruk adalah sebagai berikut:

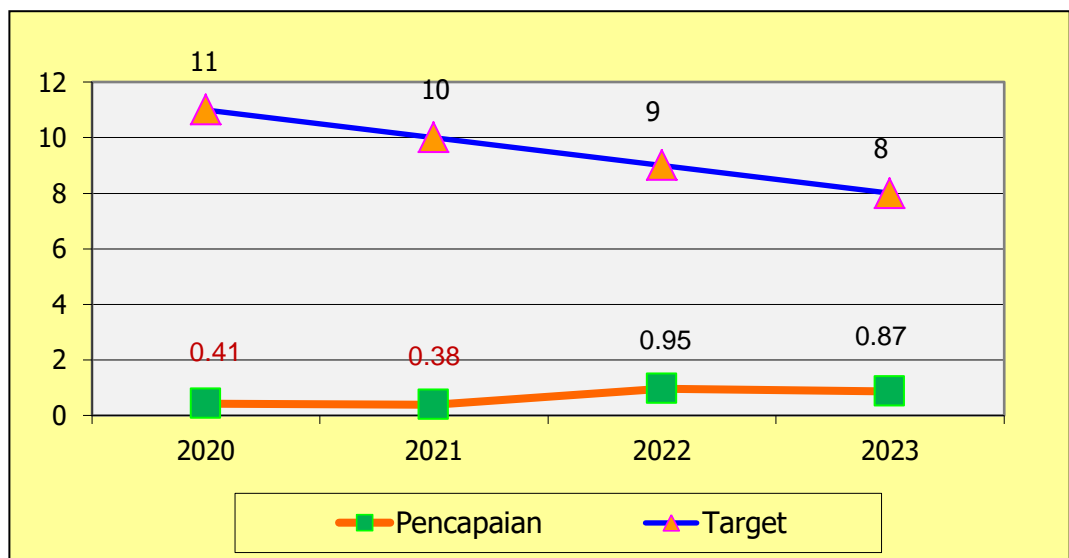
- a. Pelaksanaan kolaborasi antara petugas puskesmas dan kader posyandu dalam melakukan sweeping ke rumah-rumah penduduk yang memiliki balita dan memberikan edukasi pentingnya membawa balita ke posyandu agar status kesehatannya terpantau terutama status gizinya.
- b. Optimalisasi implementasi kegiatan perawatan kesehatan masyarakat (perkesmas) salah satunya melalui pelacakan kasus balita dengan masalah gizi di masyarakat dan penguatan penyuluhan gizi
- c. Penguatan fungsi posyandu melalui penguatan peran kader posyandu serta peran PKK

Perbaikan status gizi masyarakat merupakan salah satu prioritas baik oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah. Salah satu kondisi gizi kurang yang menjadi issue strategis baik Goblal, Nasional maupun Provinsi adalah balita pendek atau stunting. Menurut WHO (2015), stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi bdannya berada di bawah standar. Selanjutnya menurut WHO (2020), stunting adalah pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang/tinggi badan menurut usia yang kurang dari -2 standar deviasi (SD) pada kurva pertumbuhan WHO yang terjadi dikarenakan kondisi irreversible akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan/atau infeksi berulang / kronis yang terjadi dalam 1000 HPK.

Berdasarkan data e-PPGBM per Desember Tahun 2023 diperoleh status gizi balita stunting (pendek dan sangat pendek) di Kota Dumai sebanyak 168 orang dari 19.267 balita yang ditimbang (prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita sebesar 0.87%). Bila dibandingkan dengan data e-PPGBM tahun 2022 dimana status gizi balita stunting (pendek dan sangat pendek) di Kota Dumai sebanyak 185 orang dari 19.381 balita yang ditimbang (prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita sebesar 0.95%), maka terlihat ada penurunan kasus stunting pada Tahun 2023. Adanya penurunan jumlah kasus stunting pada tahun 2023 karena ada balita stunting yang mengalami peningkatan panjang badan/tinggi badan dan ada balita yang sudah tidak berada pada umur 0-60 bulan. Target kinerja prevalensi stunting pada balita Kota Dumai pada tahun 2023 adalah sebesar 8%, sehingga persentase capaian kinerja adalah sebesar 100%, yang berarti pencapaian indikator prevalensi stunting pada balita sangat tinggi dengan atribut capaian indikator kinerja sangat berhasil.

Pencapaian prevalensi stunting pada balita Kota Dumai dari tahun 2020 sampai dengan 2023 menunjukkan fluktuasi dan cenderung meningkat seperti terlihat pada grafik 3.21 berikut ini:

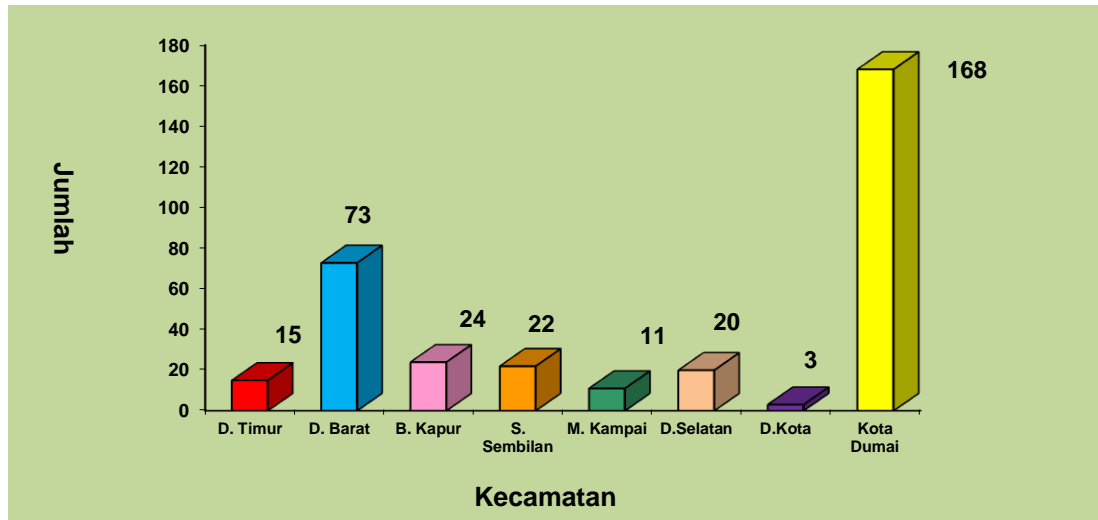
Grafik 3.21
Pencapaian Prevalensi Stunting Pada Balita
Kota Dumai dari Tahun 2020 sampai dengan 2023



Berdasarkan kecamatan, kasus balita stunting banyak ditemukan di Kecamatan Dumai Barat sebanyak 73 kasus (43.45%) disusul dengan

Kecamatan Bukit Kapur sebanyak 24 kasus (14.29%), dan Kecamatan Sungai Sembilan sebanyak 22 kasus (13.10%) seperti terlihat pada grafik 3.22 berikut ini :

Grafik 3.22
Jumlah Kasus Balita Stunting Berdasarkan Kecamatan
Di Kota Dumai Tahun 2023



Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat

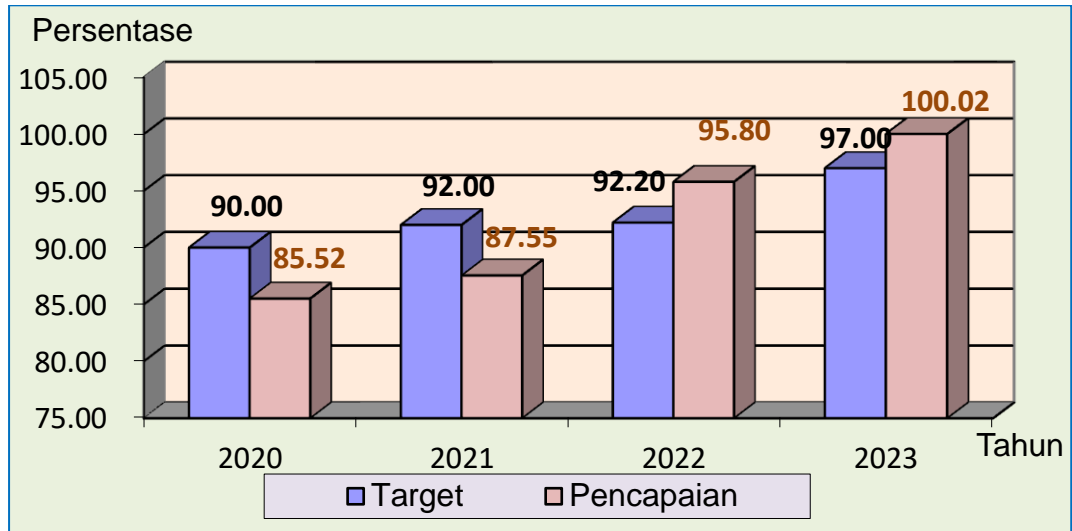
2.1 Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Dumai.

Selain merupakan salah satu indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Dumai, indikator Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional juga merupakan salah satu indikator “Sustainable Development Goal’s” (SDG’s). Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berupa jaminan perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Peserta JKN terdiri dari:

- Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN : Masyarakat miskin dan tidak mampu yang iurannya dibiayai oleh Pemerintah Pusat melalui APBN
- Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD : Peserta JKN yang iurannya dibiayai oleh Pemerintah Daerah melalui APBD.
- Pekerja Penerima Upah (PPU) : Peserta JKN yang terdiri dari PNS, TNI/ POLRI, Pejabat Negara, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang iurannya dibiayai oleh pemberi kerja dan peserta yang bersangkutan.
- Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/Mandiri : Peserta JKN yang bekerja mandiri dan iurannya dibiayai oleh peserta yang bersangkutan.
- Bukan Pekerja (BP) : Peserta JKN yang terdiri dari investor, pemberi pajak, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan dan bukan pekerja lainnya yang iurannya dibiayai oleh peserta yang bersangkutan.

Sampai dengan tahun 2023 jumlah penduduk Kota Dumai yang telah mempunyai jaminan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS baik itu sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI APBN dan PBI APBD) ada sebanyak 213.513 orang, dan Non PBI (pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah/mandiri dan bukan pekerja) ada sebanyak 124.618 orang, sehingga total peserta Jaminan Kesehatan Kota Dumai ada sebanyak 338.131 dari 338.064 orang penduduk Kota Dumai berdasarkan Data Agregat Kependudukan (DAK) semester I Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai. Dengan demikian pencapaian cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kota Dumai sebesar 100.02%. Target kinerja persentase Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Dumai pada tahun 2023 sebesar 97%, sehingga persentase capaian kinerja adalah sebesar 100%, yang berarti pencapaian indikator cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN) di Kota Dumai sangat tinggi dengan atribut capaian indikator kinerja sangat berhasil.

Grafik 3.23 Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Kota Dumai Tahun 2020 – 2023



Tabel 3.14 Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk
Menurut Jenis Kepesertaan Kota Dumai Tahun 2020 – 2023

No	Jenis Kepesertaan	Peserta Jaminan Kesehatan			
		2020	2021	2022	2023
Penerima Bantuan Iuran (PBI)					
1	PBI APBN	74,766	75,857	85.175	103.498
2	PBI APBD	84,057	89,238	108.456	110.015
Sub Jumlah PBI		158,823	165,095	193.631	213.513
Non PBI					
1	Pekerja Penerima Upah (PPU)	82,728	86,623	94.250	97.128
2	Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri	26,429	26,350	26.479	22.846
3	Bukan Pekerja (BP)	702	3,188	3.159	4.644
Sub Jumlah Non PBI		109,859	116,161	123.888	124.618
Total Peserta Kota Dumai		268,682	281,256	317.519	338.131
Jumlah Penduduk Kota Dumai		314,166	321,238	331.445	338.064
% JKN di Kota Dumai		85.52	87.55	95.80	100.02
% JKN PBI		50.55	51.39	58.42	63.16

Berdasarkan jenis kepesertaan JKN, terlihat peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebanyak 63.14% lebih banyak jumlahnya daripada Non PBI (36.86%). Hal ini menunjukkan beban Pemerintah pusat maupun

pemerintah Kota Dumai masih besar dalam menyediakan jaminan kesehatan bagi masyarakat.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2022 dimana jumlah penduduk Kota Dumai yang telah mempunyai jaminan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebanyak 317.519 orang atau sebesar 95.80%, maka jumlah penduduk Kota Dumai yang telah mempunyai jaminan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mengalami peningkatan pada tahun 2023. Bila dibandingkan dengan target Kota Dumai yakni sebesar 97%, maka angka tersebut telah mencapai target Kota Dumai. Pada tahun 2022, BPJS Indonesia telah menetapkan target bahwa kabupaten/kota dinyatakan mencapai Universal Health Coverage (UHC) apabila persentase penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 95%. Dengan pencapaian UHC Kota Dumai tersebut, berarti Kota Dumai sudah mencapai UHC.

Dinas Kesehatan Kota Dumai telah menetapkan kebijakan untuk lebih memfokuskan perhatian pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat dengan persyaratan peserta mau dirawat di kelas III terutama penduduk miskin dan tidak mampu. Dasar pemikirannya adalah bukan saja memenuhi kewajiban pemerintah tetapi juga berdasarkan kajian dan pengalaman bahwa akan terjadi percepatan perbaikan indikator kesehatan apabila lebih memperhatikan dan fokus pada pelayanan kesehatan masyarakat.

Pada tahun 2023 jumlah penduduk miskin dan tidak mampu yang mendapatkan akses pelayanan kesehatan gratis melalui kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) baik sebagai peserta PBI APBN (KIS) sebanyak 103.498 orang atau sebesar 30.61% dan peserta PBI APBD sebanyak 110.015 orang atau sebesar 32.54%, sehingga total penduduk miskin dan tidak mampu yang mendapat akses pelayanan kesehatan gratis (menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran/PBI) sebanyak 213.513 orang. Bila dibandingkan dengan target Kota Dumai pada tahun 2023 yakni sebanyak 188.500 orang, maka telah terealisasi sebesar 113.27% yang artinya telah melebihi target. Apabila

dibandingkan dengan tahun 2022 dimana jumlah penduduk miskin yang mendapat akses pelayanan kesehatan gratis (menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran/PBI) sebanyak 193.631 orang, maka jumlah penduduk miskin dan tidak mampu yang mendapat akses pelayanan kesehatan gratis mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut sebagai dampak dari pandemi COVID 19 dimana penduduk yang sebelumnya menjadi peserta BPJS secara mandiri (PBU), karena kehilangan mata pencahariannya menjadi tidak mampu membayar iuran bulanan BPJS yang mengakibatkan banyak peserta BPJS PBU menunggak. Dengan kebijakan Walikota Dumai yakni mengalihkan kepesertaan peserta BPJS dari PBU menjadi PBI baik PBI APBN maupun PBI APBD, sehingga terjadi peningkatan kepesertaan JKN PBI pada tahun 2023.

Sesuai metadata indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Pilar Pembangunan Sosial (Bappenas, 2017) proporsi penduduk miskin dan tidak mampu dari total penduduk adalah sebesar 40% yang dibayar oleh pemerintah sebagai peserta program jaminan kesehatan. Sejak tahun 2017 pencapaian persentase kepesertaan JKN PBI Kota Dumai sudah melebihi 40% dan angka tersebut terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2023 persentase kepesertaan JKN PBI Kota Dumai mencapai angka 63.16% yang artinya sudah melampaui target Nasional.

Faktor pendukung/pendorong capaian indikator Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Dumai adalah sebagai berikut:

- a. Merupakan komitmen global (SDG's), sasaran prioritas Nasional, Provinsi Riau dan Pemerintah Kota Dumai di dalam RPJMN, RPJMD Provinsi Riau dan RPJMD Kota Dumai
- b. Adanya dukungan anggaran dan regulasi dari Pusat (PBI APBN), Provinsi Riau (budget sharing PBI APBD) dan Pemerintah Kota Dumai (PBI APBD)
- c. Kota Dumai telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) sejak tahun 2022

Faktor penghambat capaian indikator Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Dumai adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kebijakan dari Pusat di tengah tahun untuk pengalihan kepesertaan PBPU dan BP Pemda Kota Dumai menjadi peserta PBI JK (Pusat) sebanyak 10.571 jiwa, yang berdampak pada berkurangnya pembayaran iuran peserta PBPU dan BP Pemda Kota Dumai. Hal tersebut mengakibatkan realisasi anggaran tidak optimal.
- b. BPJS Kesehatan kesulitan dalam mendorong kepesertaan pekerja sektor informal dan kelompok muda
- c. Penyebaran fasilitas kesehatan yang belum merata sehingga peserta kesulitan mengakses pelayanan kesehatan

Tindak lanjut capaian indikator Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Dumai adalah sebagai berikut:

- a. Optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi data kepesertaan JKN PBI APBN/KIS segmen PBPU dan BP Pemda Kota Dumai dengan melibatkan ketua RT dan pihak kelurahan.
- b. Memperkuat edukasi dan promosi kesehatan tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) khususnya dengan sasaran pekerja sektor informal dan kelompok muda
- c. Melengkapi ketersediaan sarana dan prasarana dan ketenagaan di fasilitas kesehatan milik Pemerintah Kota Dumai sesuai standar dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas

4 Evaluasi dan Analisis Capaian Indikator Kinerja Program Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023

Untuk mewujudkan Visi dan Misi pembangunan Kota Dumai serta tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Dumai khususnya pada tahun 2023, maka telah diimplementasikan strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang kesehatan yang dijabarkan dalam 5 program, sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada tahun 2023, pencapaian indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang ditunjukkan dengan pencapaian indikator persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan

(Dinas Kesehatan) adalah sebesar 100%. Bila dibandingkan dengan target program pada tahun 2023 yakni sebesar 100%, maka persentase capaian kinerja adalah sebesar 100% yang berarti pencapaian indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sangat tinggi.

2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Pada tahun 2023, pencapaian indikator Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat yang ditunjukkan dengan pencapaian indikator persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (Dinas Kesehatan) adalah sebesar 89.67%. Bila dibandingkan dengan target program pada tahun 2023 yakni sebesar 80%, maka persentase capaian kinerja adalah sebesar 100% yang berarti pencapaian indikator Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat sangat tinggi.

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Pada tahun 2023, pencapaian indikator Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditunjukkan dengan pencapaian indikator persentase ketersediaan tenaga kesehatan di puskesmas dan jaringannya sesuai standar adalah sebesar 100%. Bila dibandingkan dengan target program pada tahun 2023 yakni sebesar 82%, maka persentase capaian kinerja adalah sebesar 100% yang berarti pencapaian indikator Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan sangat tinggi.

4) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

Pada tahun 2023, pencapaian indikator Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman yang ditunjukkan dengan pencapaian indikator persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotik dan toko obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan adalah sebesar 77.95%. Bila dibandingkan dengan target program pada tahun 2023 yakni sebesar 79%, maka persentase capaian kinerja adalah sebesar 98.67% yang berarti pencapaian indikator Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman sangat tinggi.

5) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Pada tahun 2023, pencapaian indikator Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan yang ditunjukkan dengan pencapaian indikator rasio posyandu per 1.000 balita adalah sebesar 4.41 per 1.000 balita. Bila dibandingkan dengan target program pada tahun 2023 yakni sebesar 4.68 per 1.000 balita, maka persentase capaian kinerja adalah sebesar 94.23% yang berarti pencapaian indikator Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Kesehatan sangat tinggi.

3.2 Akuntabilitas Keuangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Kesehatan Kota Dumai pada tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp 157,052,544,027.00 (seratus lima puluh tujuh milyar lima puluh dua juta lima ratus empat puluh empat ribu dua puluh tujuh rupiah) bersumber dari Perubahan APBD Kota Dumai Tahun 2023. Anggaran tersebut terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 143,493.165.605.00 dan Belanja Modal sebesar Rp 13.559.378.422.00. Anggaran tersebut dialokasikan untuk Dinas Kesehatan Kota Dumai sebesar Rp 130,606,311,981.00 (83.16%) dan untuk UPT BLUD Dinas Kesehatan Kota Dumai yang terdiri dari 10 puskesmas se Kota Dumai dan Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A sebesar Rp 26,446,232,046.00 (16.84%).

Anggaran tersebut telah terealisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp 144.396.026.375.59 (seratus empat puluh empat milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta dua puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima koma lima puluh sembilan rupiah) atau sebesar 91.94%. Realisasi anggaran tersebut terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 131,615,192,812.53 (91.72%) dan Belanja Modal sebesar Rp 12,780,833,563,06 (94.26%) .

Tabel 3.15
Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kota Dumai
Berdasarkan Uraian Belanja dan Unit Kerja Tahun 2023

No.	Unit Kerja	URAIAN BELANJA						TOTAL		
		BELANJA OPERASI			BELANJA MODAL			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian			
1	Dinas Kesehatan Kota Dumai	118,789,027,091.00	111,394,639,652.53	93.78	11,817,284,890.00	11,110,852,050.06	94.02	130,606,311,981.00	122,505,491,702.59	93.80
2	UPT BLUD se Kota Dumai	24,704,138,514.00	20,220,553,160.00	81.85	1,742,093,532.00	1,669,981,513.00	95.86	26,446,232,046.00	21,890,534,673.00	82.77
TOTAL		143,493,165,605.00	131,615,192,812.53	91.72	13,559,378,422.00	12,780,833,563.06	94.26	157,052,544,027.00	144,396,026,375.59	91.94

Anggaran Perubahan APBD Kota Dumai untuk Dinas Kesehatan dialokasikan ke dalam 5 program (terdiri dari 1 program penunjang urusan pemerintahan dan 4 urusan pemerintahan wajib bidang kesehatan), dan 24 kegiatan (terdiri dari 9 kegiatan penunjang urusan pemerintahan dan 15 kegiatan urusan pemerintahan wajib bidang kesehatan), seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.16
Pencapaian Realisasi Keuangan Berdasarkan Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan dan UPT Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023

No.	Uraian Program Kegiatan	Keuangan		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		78,207,971,074.00	75,227,175,612.53	96.19
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	78,207,971,074.00	75,227,175,612.53	96.19
1	Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	95,158,206.00	92,837,800.00	97.56
2	Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	51,474,529,624.00	49,643,198,634.00	96.44
3	Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	28,400,000.00	27,800,000.00	97.89
4	Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	323,313,366.00	312,701,214.00	96.72
5	Kegiatan administrasi umum perangkat daerah	1,395,318,832.00	1,322,453,634.00	94.78
6	Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	828,503,500.00	817,095,000.00	98.62
7	Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3,267,870,000.00	3,040,131,502.00	93.03
8	Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	1,916,800,500.00	1,818,942,970.53	94.89
9	Kegiatan peningkatan pelayanan BLUD	18,878,077,046.00	18,152,014,858.00	96.15

No.	Uraian Program Kegiatan	Keuangan		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BIDANG KESEHATAN	78,844,572,953.00	69,168,850,763.06	87.73
I	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	75,298,856,561.00	65,764,723,944.06	87.34
1	Kegiatan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten Kota	21,776,302,893.00	20,619,366,557.06	94.69
2	Kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	42,704,992,978.00	35,740,187,066.00	83.69
3	Kegiatan penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	199,715,590.00	186,304,047.00	93.28
4	Kegiatan penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota	10,617,845,100.00	9,218,866,274.00	86.82
II	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	864,829,200.00	818,758,053.00	94.67
1	Kegiatan pemberian izin praktek tenaga kesehatan di wilayah kabupaten kota	84,500,000.00	84,032,400.00	99.45
2	Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	650,600,800.00	610,033,173.00	93.76
3	Kegiatan perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten/kota	129,728,400.00	124,692,480.00	96.12
III	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	964,820,492.00	910,412,127.00	94.36
1	Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	283,860,000.00	260,862,000.00	91.90
2	Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	152,595,000.00	151,745,676.00	99.44
3	Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	190,485,892.00	185,838,166.00	97.56
4	Kegiatan Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	96,234,600.00	93,743,285.00	97.41
5	Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	241,645,000.00	218,223,000.00	90.31
IV	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1,716,066,700.00	1,674,956,639.00	97.60
1	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	891,839,500.00	880,009,400.00	98.67
2	Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kab/Kota	174,998,400.00	170,576,350.00	97.47
3	Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	649,228,800.00	624,370,889.00	96.17
DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI		157,052,544,027.00	144,396,026,375.59	91.94

Dari total Rp 130,606,311,981.00 anggaran untuk Dinas Kesehatan Kota Dumai telah terealisasi sebesar Rp 122,447,591,702.59 atau dengan persentase capaian sebesar 93.75%. Anggaran Dinas Kesehatan terdiri dari anggaran Penunjang Urusan Pemerintahan sebesar Rp 59,329,894,028.00 (45.43%) dengan penyerapan anggaran sebesar Rp 57,075,160,754.53 atau 96.20% dan anggaran urusan pemerintahan wajib bidang kesehatan sebesar Rp 71,276,417,953.00 (54.57%) dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 65,372,430,948.06 atau 91.72%.

Dari 5 program, penyerapan anggaran terendah adalah program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan persentase penyerapannya sebesar 91.48%. disusul dengan Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman dengan persentase penyerapannya sebesar 94.36% dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan persentase penyerapannya sebesar 94.67%. Uraian pencapaian realisasi keuangan berdasarkan program dan kegiatan pada Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.17
Pencapaian Realisasi Keuangan Berdasarkan Program dan Kegiatan
Pada Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023

No.	Uraian Program Kegiatan	Keuangan		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		59,329,894,028.00	57,075,160,754.53	96.20
1	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>59,329,894,028.00</i>	<i>57,075,160,754.53</i>	<i>96.20</i>
1	Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	95,158,206.00	92,837,800.00	97.56
2	Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	51,474,529,624.00	49,643,198,634.00	96.44
3	Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	28,400,000.00	27,800,000.00	97.89
4	Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	323,313,366.00	312,701,214.00	96.72
5	Kegiatan administrasi umum perangkat daerah	1,395,318,832.00	1,322,453,634.00	94.78
6	Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	828,503,500.00	817,095,000.00	98.62
7	Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3,267,870,000.00	3,040,131,502.00	93.03
8	Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	1,916,800,500.00	1,818,942,970.53	94.89

No.	Uraian Program Kegiatan	Keuangan		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BIDANG KESEHATAN	71,276,417,953.00	65,372,430,948.06	91.72
I	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	67,862,651,561.00	62,081,579,129.06	91.48
1	Kegiatan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten Kota	21,776,302,893.00	20,619,366,557.06	94.69
2	Kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	35,268,787,978.00	32,057,042,251.00	90.89
3	Kegiatan penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	199,715,590.00	186,304,047.00	93.28
4	Kegiatan penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota	10,617,845,100.00	9,218,866,274.00	86.82
II	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	864,829,200.00	818,758,053.00	94.67
1	Kegiatan pemberian izin praktek tenaga kesehatan di wilayah kabupaten kota	84,500,000.00	84,032,400.00	99.45
2	Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	650,600,800.00	610,033,173.00	93.76
3	Kegiatan perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten/kota	129,728,400.00	124,692,480.00	96.12
III	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	964,820,492.00	910,412,127.00	94.36
1	Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	283,860,000.00	260,862,000.00	91.90
2	Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	152,595,000.00	151,745,676.00	99.44
3	Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	190,485,892.00	185,838,166.00	97.56
4	Kegiatan Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	96,234,600.00	93,743,285.00	97.41
5	Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	241,645,000.00	218,223,000.00	90.31
IV	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1,584,116,700.00	1,561,681,639.00	98.58
1	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	891,839,500.00	880,009,400.00	98.67
2	Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kab/Kota	174,998,400.00	170,576,350.00	97.47
3	Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	517,278,800.00	511,095,889.00	98.80
DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI		130,606,311,981.00	122,447,591,702.59	93.75

Realisasi anggaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023 kurang dari 100% disebabkan beberapa hal antara lain adanya sisa anggaran belanja seperti sisa belanja honorarium Tenaga Kontrak Dengan Perjanjian Kinerja (TKPK) karena yang bersangkutan telah lulus seleksi tenaga PPPK (P3K) di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Dumai, sisa belanja makanan minuman pertemuan, sisa belanja penyediaan gaji dan tunjangan ASN, sisa belanja perjalanan dinas dan sisa pengadaan barang dan jasa baik melalui pengadaan/pemilihan langsung maupun lelang. Selanjutnya, adanya pengalihan kepesertaan PBPU dan BP Pemda Kota Dumai menjadi peserta PBI JK (Pusat) sebanyak 10.571 jiwa, yang berdampak pada berkurangnya pembayaran iuran peserta PBPU dan BP Pemda Kota Dumai.

Sedangkan dari total Rp 26,446,232,046.00 anggaran untuk UPT BLUD Dinas Kesehatan Kota Dumai yang terdiri dari 10 puskesmas se Kota Dumai dan Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A telah terealisasi sebesar Rp 21,948,434,673.00 atau dengan persentase capaian sebesar 82.99%. Uraian pencapaian realisasi keuangan berdasarkan uraian UPT BLUD Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.18
Pencapaian Realisasi Keuangan Berdasarkan Uraian UPT
Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023

No.	Uraian Program Kegiatan	Keuangan		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		18,878,077,046.00	18,152,014,858.00	96.15
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	18,878,077,046.00	18,152,014,858.00	96.15
	Kegiatan peningkatan pelayanan BLUD	18,878,077,046.00	18,152,014,858.00	96.15
	BLUD Puskesmas Dumai Kota	2,224,213,000.00	1,987,863,476.00	89.37
	BLUD Puskesmas Dumai Barat	1,550,000,000.00	1,547,704,069.00	99.85
	BLUD Puskesmas Bukit Kapur	1,700,000,000.00	1,622,157,970.00	95.42
	BLUD Puskesmas Sungai Sembilan	2,973,471,944.00	2,958,086,280.00	99.48
	BLUD Puskesmas Medang Kampai	1,296,706,000.00	1,278,197,026.00	98.57
	BLUD Puskesmas Bumi Ayu	1,671,206,452.00	1,635,368,306.00	97.86
	BLUD Puskesmas Bukit Timah	920,000,000.00	892,936,650.00	97.06
	BLUD Puskesmas Jaya Mukti	3,150,000,000.00	3,045,813,179.00	96.69
	BLUD Puskesmas Purnama	1,482,588,000.00	1,450,964,932.00	97.87
	BLUD Puskesmas Bukit Kayu Kapur	1,754,082,650.00	1,600,420,637.00	91.24
	BLUD Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A	155,809,000.00	132,502,333.00	85.04
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BIDANG KESEHATAN		7,568,155,000.00	3,796,419,815.00	50.16
I	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	7,436,205,000.00	3,683,144,815.00	49.53
1	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7,436,205,000.00	3,683,144,815.00	49.53
	Puskesmas Dumai Kota	868,701,000.00	491,348,764.00	56.56
	Puskesmas Dumai Barat	566,934,000.00	354,096,203.00	62.46
	Puskesmas Bukit Kapur	596,860,000.00	249,770,181.00	41.85
	Puskesmas Sungai Sembilan	1,030,195,000.00	454,748,757.00	44.14
	Puskesmas Medang Kampai	537,555,000.00	270,939,348.00	50.40
	Puskesmas Bumi Ayu	788,279,000.00	467,200,809.00	59.27
	Puskesmas Bukit Timah	510,392,000.00	369,291,369.00	72.35
	Puskesmas Jaya Mukti	1,137,406,000.00	375,480,119.00	33.01
	Puskesmas Purnama	704,120,000.00	308,760,127.00	43.85
	Puskesmas Bukit Kayu Kapur	695,763,000.00	341,509,138.00	49.08
II	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	131,950,000.00	113,275,000.00	85.85
1	Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	131,950,000.00	113,275,000.00	85.85
	Puskesmas Dumai Kota	20,350,000.00	18,850,000.00	92.63
	Puskesmas Dumai Barat			
	Puskesmas Bukit Kapur	13,100,000.00	9,800,000.00	74.81
	Puskesmas Sungai Sembilan	35,625,000.00	30,975,000.00	86.95
	Puskesmas Medang Kampai	9,000,000.00	5,175,000.00	57.50
	Puskesmas Bumi Ayu	9,700,000.00	9,700,000.00	100.00
	Puskesmas Bukit Timah	12,975,000.00	12,975,000.00	100.00
	Puskesmas Jaya Mukti	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00
	Puskesmas Purnama			
	Puskesmas Bukit Kayu Kapur	16,200,000.00	10,800,000.00	66.67
UPT DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI		26,446,232,046.00	21,948,434,673.00	82.99

Dari tabel di atas menunjukkan penyerapan anggaran pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat yang bersumber APBN yakni Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik bidang kesehatan hanya terserap sebesar 49.53%. Sementara penyerapan anggaran pada Program Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan yang bersumber APBN yakni Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik bidang kesehatan hanya terserap sebesar 85.85%. Dengan demikian total penyerapan anggaran bersumber APBN yakni Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik bidang kesehatan sebesar 50.16%. Sedangkan total penyerapan anggaran bersumber BLUD sebesar 98.10%.

Persentase penyerapan DAK Non Fisik di Puskesmas bervariasi dengan penyerapan tertinggi sebesar 73.04% di Puskesmas Bukit Timah dan penyerapan terendah sebesar 33.88% di Puskesmas Jaya Mukti. Tidak optimalnya penyerapan DAK Non Fisik di Puskesmas karena adanya perubahan regulasi di Kementerian Kesehatan yakni adanya Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023 yang baru ditetapkan pada tanggal 26 Juli 2023.

Berdasarkan sumber anggaran, APBD Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023 bersumber dari berbagai sumber antara lain APBD Kota Dumai, APBN (DAK Fisik dan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan) dan BLUD, dengan alokasi pagu dan realisasi seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.19
Pencapaian Realisasi Keuangan Berdasarkan Sumber Anggaran
Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023

No.	Sumber Anggaran	Pagu	Realisasi	% Realisasi
1.	APBD Kota Dumai	123,476,435,081.00	116,414,221,195.59	94.28
2.	APBN (DAK Fisik dan & Non Fisik Kesehatan)	14,698,039,900.00	9,829,790,322.00	66.88
3.	BLUD	18,878,077,046.00	18,152,014,858.00	96.15
	TOTAL	157,052,552,027.00	144,396,026,375.59	91.94

Sedangkan berdasarkan unit kerja, terdiri dari anggaran Dinas Kesehatan Kota Dumai sebesar Rp 130,606,311,981.00 dengan penyerapan anggaran

sebesar Rp 122,447,591,702.59 atau 93.75%, anggaran puskesmas (10 puskesmas) sebesar Rp 26,290,423,046.00 dengan penyerapan anggaran sebesar Rp 21,815,932,340.00 atau 82.98%, dan anggaran Laboratorium Kesehatan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A sebesar Rp 155,809,000.00 dengan penyerapan anggaran sebesar Rp 132,502,333.00 atau 85.04%. Dari 12 unit kerja, hanya ada Dinas Kesehatan Kota Dumai yang realisasi anggarannya di atas 90%, sedangkan sebanyak 11 unit kerja lain realisasi anggarannya berkisar antara 79.18% s.d 89.84%. Uraian pencapaian realisasi keuangan berdasarkan unit kerja tahun 2023 adalah sebagai berikut

Tabel 3.20
Pencapaian Realisasi Keuangan Berdasarkan Unit Kerja
Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023

No.	Unit Kerja	Keuangan		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Dinas Kesehatan Kota Dumai	130,606,311,981.00	122,447,591,702.59	93.75
2	BLUD Puskesmas Dumai Kota	3,113,264,000.00	2,498,062,240.00	80.24
3	BLUD Puskesmas Dumai Barat	2,116,934,000.00	1,901,800,272.00	89.84
4	BLUD Puskesmas Bukit Kapur	2,309,960,000.00	1,881,728,151.00	81.46
5	BLUD Puskesmas Sungai Sembilan	4,039,291,944.00	3,443,810,037.00	85.26
6	BLUD Puskesmas Medang Kampai	1,843,261,000.00	1,554,311,374.00	84.32
7	BLUD Puskesmas Bumi Ayu	2,469,185,452.00	2,112,269,115.00	85.55
8	BLUD Puskesmas Bukit Timah	1,443,367,000.00	1,275,203,019.00	88.35
9	BLUD Puskesmas Jaya Mukti	4,302,406,000.00	3,436,293,298.00	79.87
10	BLUD Puskesmas Purnama	2,186,708,000.00	1,759,725,059.00	80.47
11	BLUD Puskesmas Bukit Kayu Kapur	2,466,045,650.00	1,952,729,775.00	79.18
12	BLUD Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A	155,809,000.00	132,502,333.00	85.04
TOTAL		157,052,544,027.00	144,396,026,375.59	91.94

Secara keseluruhan, efisiensi belanja operasi sebesar Rp 11,862,804,792.47,00 atau sebesar 8.27% dari total belanja operasi. Sedangkan efisiensi belanja modal sebesar Rp 793,712,858.94 atau sebesar 5.85% dari total belanja modal. Dengan demikian efisiensi anggaran Dinas Kesehatan Kota Dumai pada tahun 2023 menunjukkan 8.06% atau Rp 12,656,517,651.41. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Tabel 3.21
Efisiensi Kinerja dan Anggaran Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023

No	Tujuan/Sasaran Strategis		Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Program Wajib	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Tingkat Efisiensi (%)
										Rp	% Capaian	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=7-11
Visi : Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri Yang Unggul dan Bertumpu pada Budaya Melayu												
Misi 2 Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berjati Diri Melayu												
	Tujuan Perangkat Daerah	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Dumai	Indeks Kesehatan	Indeks	0.789-0790	0.778	98.61					
	Sasaran Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	71.29-71.33	71.67	100.00					
		Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Dumai	%	97.0	100.02	100.00					
	Sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU)		1. Menurunnya Mortalitas (Angka Kematian)	%	100	99.45	99.45					
			1.1 Angka Kematian Bayi per 1.000 KH	per 1.000 KH	17	11.36	100	1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	78,207,971,074.00	75,227,175,612.53	96.19	
			1.2 Angka Kematian Balita per 1.000 KH	per 1.000 KH	24	13.42	100					
			1.3 Angka Kematian Ibu per 100.000 KH	per 100.000 KH	101	103.23	97.79	2 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	75,298,856,561.00	65,764,723,944.06	87.34	
			1.4 Umur Harapan Hidup	Tahun	71.29-71.33	71.67	100.00					
			2. Menurunnya Morbiditas (Angka Kesakitan)	%	100	30.44	30.44	3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	864,829,200.00	818,758,053.00	94.67	
			2.1 Angka Kesakitan Malaria (API) per 1.000 penduduk	per 1.000 penduduk	0.8	0.01	100					
			2.2 Persentase Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA +	%	88	72.00	81.82	4 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	964,820,492.00	910,412,127.00	94.36	
			2.3 Prevalensi Penderita HIV Terhadap Penduduk Beresiko	%	1	0.18	100					
			2.4 Angka Kesakitan Demam Berdarah (DBD)	per 100.000 penduduk	55	198.03	-160.06	5 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1,716,066,700.00	1,674,956,639.00	97.60	
			3. Meningkatnya Status Gizi Balita	%	100	100	100					
			3.1 Persentase Balita dengan Gizi Buruk	%	1	0.07	100					
			3.2 Persentase Balita Dengan Gizi Kurang	%	3	1.10	100					
			4. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Dumai	%	97.0	100.02	100.00					
Capaian Rata-Rata							74.50	TOTAL	157,052,544,027.00	144,396,026,375.59	91.94	-17.44

Prestasi/Penghargaan

Selama tahun 2023 Dinas Kesehatan Kota Dumai mendapatkan 7 penghargaan pada tingkat propinsi Riau, seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.22
Prestasi dan Penghargaan Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023

No	Jenis Penghargaan	Prestasi	Tingkat	Diberikan Oleh
1.	Prestasi Capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Pada Program Tuberkulosis Seratus Persen Tahun 2022		Provinsi Riau	Gubernur Riau
2.	Pencapaian Tertinggi Pemeriksaan Hepatitis B Pada Ibu Hamil (72%) Tahun 2022		Provinsi Riau	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau
3.	Apresiasi Pencapaian Status Desa/Kelurahan Open Defecation Free (ODF) Di atas Target 80% Sebagai Prasyarat Utama Kabupaten Kota Sehat Tahun 2023		Provinsi Riau	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau
4.	Penghargaan Terbaik 2 Pencapaian Treatment Coverage Tuberkulosis Tahun 202	Terbaik 2	Provinsi Riau	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau
5.	Penghargaan Terbaik 1 Kategori Kab & Kota Dengan Progres Penginputan Capaian di Aplikasi ASIK Terbaik	Terbaik 1	Provinsi Riau	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau
6.	Penghargaan Kategori Kelengkapan Laporan Pemetaan Resiko Penyakit Infeksi Emerging Tahun 2023		Provinsi Riau	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau
7.	Penghargaan Terbaik 1 Kabupaten dengan Kinerja Program Malaria Terbaik Semester I Tahun 2023	Terbaik 1	Provinsi Riau	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau



B A B IV
P E N U T U P

BAB IV PENUTUP

Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kota Dumai merupakan perwujudan kewajiban Dinas Kesehatan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Perencanaan Strategis, Dinas Kesehatan telah melaksanakan program-program yang merupakan penjabaran dari Visi Misi pembangunan kesehatan Kota Dumai dalam rangka menunjang tercapainya Visi Kota Dumai.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan dapat dilihat dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan beserta uraiannya dievaluasi pencapaian kerja di atas. Dari 11 Indikator Kinerja Utama (IKU), ada sebanyak 9 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang nilai pencapaian kerjanya sangat tinggi ($\geq 90\%$), dan sebanyak 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang nilai pencapaian kerjanya tinggi. Namun, masih ada sebanyak 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang nilai pencapaian kerjanya sangat rendah yakni Persentase Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang pencapaian kerjanya sangat rendah tersebut merupakan tantangan bagi Dinas Kesehatan Kota Dumai pasca pandemik COVID 19. Keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat dilihat dari pemenuhan indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk masing-masing sasaran tersebut. Dari 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan, Dinas Kesehatan Kota Dumai berhasil mewujudkan hampir seluruh sasaran tersebut. Perumusan keberhasilan pencapaian sasaran jika indikator keberhasilannya dapat diwujudkan adalah 74.50% (kategori nilai sedang). Dengan demikian, secara umum Dinas Kesehatan telah mampu melaksanakan tugasnya yaitu membantu Walikota dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang kesehatan.

Permasalahan

Dengan keterbatasan alokasi APBD untuk Dinas Kesehatan Kota Dumai tahun 2023, keberhasilan pelaksanaan kegiatan dapat dilihat dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan beserta uraiannya. Namun demikian, masalah-masalah kesehatan yang dihadapi terasa semakin kompleks, sehingga kedepannya Dinas Kesehatan mempunyai tugas yang lebih berat dalam

melaksanakan upaya-upaya di bidang kesehatan agar tetap mencapai target kinerja.

Adapun permasalahan yang masih dijumpai dalam pelaksanaan kinerja dinas Kesehatan Kota Dumai antara lain adalah :

1. Meskipun pencapaian kinerja Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita masih dibawah target Kota Dumai, namun kecendrungan kasus kematian bayi dan kematian balita menunjukkan peningkatan di Kota Dumai. Demikian juga kasus kematian ibu menunjukkan peningkatan bahkan telah melebihi target Kota Dumai. Kematian bayi dan kematian ibu sangat erat keterkaitannya. Sebagian besar kematian bayi diakibatkan kelainan pada kehamilan, lahir prematur dan berat badan lahir rendah, pada saat persalinan, maupun di minggu pertama kehidupan (akibat gangguan pernafasan, infeksi, kongenital, dan lainnya). Hal ini mengindikasikan belum optimalnya kualitas pelayanan maternal dan neonatal sebagai dampak pandemi COVID 19, dimana masih ada ibu-ibu yang tidak mau memeriksakan kehamilannya ke fasilitas pelayanan kesehatan atau ke praktek bidan karena takut tertular COVID 19. Isu “tiga terlambat” masih menjadi masalah utama layanan kesehatan maternal, yaitu terlambat mengambil keputusan, terlambat sampai ke tempat rujukan, dan terlambat mendapat pelayanan yang dibutuhkan di fasilitas kesehatan.
2. Kota Dumai masih menjadi daerah rawan terjadinya penularan penyakit DBD dan Malaria, karena kota Dumai merupakan daerah dengan mobilisasi penduduk yang sangat tinggi dan daerah endemis DBD dan Malaria. Hal tersebut didukung oleh kondisi kesehatan lingkungan dan sosial budaya penduduk kota Dumai dimana \pm 80% penduduk Kota Dumai dalam memenuhi kebutuhan air bersih menggunakan bak penampungan air yang potensial sebagai tempat berkembangbiaknya nyamuk vektor Demam Berdarah. Kondisi ini menjadikan Kota Dumai sebagai daerah endemis penyakit Demam Berdarah dan Malaria dan bila tidak dilakukan upaya-upaya secara intensif dapat terjadi peningkatan kasus dan potensial menimbulkan KLB.
3. HIV-AIDS merupakan fenomena gunung es, artinya kasus yang ditemukan saat ini hanya sebagian kecil, belum menggambarkan keadaan yang

sebenarnya karena masih adanya stigma dan diskriminasi terhadap HIV-AIDS di masyarakat. Sejak tahun 2006 s/d 2018 Dinas Kesehatan secara kontinyu melakukan surveilans secara aktif melalui layanan VCT (*Voluntary Counseling Testing*)/konseling testing sukarela yang ada di 10 (sepuluh) Puskesmas di Kota Dumai, 1 KKP (Kantor kesehatan pelabuhan) dan RSUD Kota Dumai untuk melakukan penjangkauan dan pemeriksaan/tes HIV secara sukarela baik secara mobile maupun statis di masyarakat. Namun sejak tahun 2019 sampai tahun 2022 kegiatan tersebut sempat vakum karena tidak aktifnya lagi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) akibat tidak adanya dukungan dana dari Global Fund. Pada tahun 2023 melalui dana Hibah, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) mulai kembali aktif. Namun karena keterbatasan anggaran, pelaksanaan kegiatan di Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) belum optimal, bahkan ada kegiatan yang tetap dilaksanakan meskipun tidak ada anggaran. Selain itu petugas kesehatan dan KPA sering mengalami kesulitan dalam melakukan pemeriksaan kesehatan (skrining) HIV pada hotspot tempat-tempat hiburan seperti karaoke, hotel/penginapan, panti pijat dan tempat hiburan malam lainnya.

4. Permasalahan penduduk pendatang atau illegal merupakan permasalahan terbesar dalam pelaksanaan program kesehatan di Kota Dumai. Apabila permasalahan penduduk pendatang atau illegal ini tidak ditangani secara serius oleh Pemerintah Kota Dumai, maka dapat berdampak pada kegagalan pencapaian pelaksanaan program kesehatan yang diukur melalui indikator Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita, Angka Kematian Ibu Melahirkan, serta persentase balita dengan gizi buruk dan gizi kurang. Pada umumnya permasalahan kesehatan yang ada banyak merupakan kontribusi dari penduduk pendatang (illegal) tersebut karena mereka jarang mengakses pelayanan kesehatan dasar karena status mereka yang illegal yang otomatis tidak mempunyai kartu identitas seperti KTP. Berdasarkan data dari puskesmas, selama tahun 2023 ada sebanyak 736 orang bukan penduduk Kota Dumai yang mengakses pelayanan kesehatan dasar di puskesmas atau sebesar 0.25% dari total kunjungan rawat jalan puskesmas. Angka tersebut turun dibandingkan dengan tahun 2022 dimana ada sebanyak 1.479 orang

bukan penduduk Kota Dumai yang mengakses pelayanan kesehatan dasar di puskesmas. Penduduk pendatang tersebut terbanyak berdomisili di Kecamatan Dumai Selatan (203 orang), Kecamatan Dumai Kota (140 orang), dan Kecamatan Dumai Timur (110 orang).

Solusi

1. Penyebab kematian bayi dapat dicegah dengan meningkatkan kualitas pelayanan pemeriksaan kehamilan salah satunya dengan meningkatkan cakupan kunjungan enam kali pemeriksaan kehamilan (K6) di fasilitas kesehatan. Penyebab kematian ibu sebagian besar dapat dicegah (seperti hipertensi dalam kehamilan, perdarahan, komplikasi, dan infeksi) apabila cakupan pelayanan disertai mutu pelayanan yang baik. Disamping itu perlu penguatan edukasi ke masyarakat tentang deteksi ibu hamil resiko tinggi, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan khususnya bidan dalam penanganan kasus ibu hamil dengan resiko tinggi dan komplikasi, peningkatan antenatal care berkualitas dan jaminan kesehatan bagi ibu yang bertujuan untuk menekan angka kematian ibu dan bayi serta penguatan manajemen kesehatan ibu dan anak.
2. Permasalahan DBD baru bisa teratasi apabila tersedianya sarana dan prasarana sanitasi yang layak juga tersedianya sarana air bersih yang layak dan diterapkannya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) oleh seluruh masyarakat. Permasalahan DBD tidak bisa diselesaikan hanya oleh Dinas Kesehatan sendiri, tapi memerlukan kolaborasi dan koordinasi dengan OPD terkait lainnya seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Pemukiman dan Dinas Lingkungan Hidup.
3. Permasalahan HIV/AIDS memerlukan dukungan dari berbagai pihak seperti Kantor Kesehatan Pelabuhan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan pihak swasta (pengusaha karaoke, hotel/penginapan, panti pijat dan tempat hiburan malam lainnya). Sehingga perlu dukungan dari Pemerintah Kota Dumai berupa anggaran dan regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan skrining HIV/AIDS di tempat-tempat hiburan dan hotel/penginapan. Serta, dukungan dari aparat penegak hukum sangat diperlukan agar petugas kesehatan dapat mengakses hotspot dimaksud.
4. Permasalahan penduduk pendatang atau illegal sejak lama belum ada solusinya sampai sekarang. Kolaborasi dan koordinasi antar Dinas terkait

yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan pihak kelurahan beserta Rt/Rw dalam mengawasi dan mengontrol penduduk pendatang atau penduduk tanpa KTP sangat diperlukan. Demikian juga dukungan dari aparat penegak hukum untuk melaksanakan razia KTP secara kontinyu sangat diperlukan. Mungkin diperlukan strategi baru untuk menjangkau penduduk Kota Dumai yang tidak memiliki KTP melalui pelayanan KTP mobile oleh dinas terkait.

Pembangunan kesehatan itu sendiri adalah proses yang panjang dan bersifat investasi, sehingga pada akhirnya dapat menciptakan masyarakat sehat, kreatif dan produktif dalam lingkungan dan perilaku sehat. Oleh karena itu, pembangunan kesehatan akan selalu membutuhkan perhatian besar dari seluruh kalangan, baik pemerintah sendiri maupun masyarakat sebagai subyek dan objek pembangunan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023 ini kami susun sebagai laporan sekaligus pertanggungjawaban kepada Bapak Walikota Dumai.

Kota Dumai, 22 Januari 2024

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA DUMAI**

Dr. SYAIFUL, MKM
Pembina Utama Muda/IV c
NIP. 197107242001121004



LAMPIRAN 1

**MATRIK RENCANA STRATEGIS
DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI
TAHUN 2021 - 2026**

VISI : Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu
MISI 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berjati Diri Melayu
SASARAN 1 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai

TUJUAN										SASARAN										CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN			KETERANGAN
URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET					URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET					STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Dumai	Indeks Kesehatan	Rumus: $\frac{AHH - AHH\ Min}{AHH\ Maks - AHH\ Min}$ Salah satu Indeks IPM adalah Indeks Kesehatan (Angka Harapan Hidup/AHH). Cara menghitung Indeks Kesehatan adalah dengan menggunakan standar global (UNDP), dimana nilai maksimum, adalah 85 dan nilai minimum adalah 25	0.77	0.77	0.788	0.789-0.790	0.790-0.791	0.790-0.791	0.791-0.792	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Adalah angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka Harapan Hidup dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)	70.93 tahun	70.98 tahun	71.25 tahun	71.29-71.33 tahun	71.34-71.37 tahun	71.38-71.42 tahun	71.42-71.46 tahun	1. Meningkatkan kemampuan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat sesuai standar	1. Meningkatkan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat sesuai standar	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
																			2. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	2. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		
																			2. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	3. Peningkatan kualitas, kuantitas dan pendayagunaan tenaga kesehatan	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		
																			3. Meningkatkan ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar	4. Peningkatan pengendalian dan pengawasan perizinan dan penerbitan sertifikat sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman		



LAMPIRAN 2



PEMERINTAH KOTA DUMAI
DINAS KESEHATAN

Jl. Tuanku Tambusai, Komplek Perkantoran Walikota Dumai, Riau 28882
Telepon 0811 7771 256 Laman: dinkesdumaikota@gmail.com
DUMAI

**KEPUTUSAN
WALIKOTA DUMAI
NOMOR: 11/DINKES/2024**

**TENTANG
PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI
TAHUN 2022 - 2026**

- Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026, maka perlu melakukan penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021-2026 yang selaras dengan Indikator Kinerja Utama Daerah.
- b. bahwa untuk membantu kelancaran dalam pelaksanaan, monitoring dan evaluasinya maka perlu ditetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2022-2026.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Dumai.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 2 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis tentang Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

- 8 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024;
- 9 Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D)
- 10 Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 1 Seri E),
- 11 Peraturan Walikota Dumai Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 3 Seri D)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI TENTANG PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI TAHUN 2022 – 2026

KESATU : Perubahan Indikator kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2022-2026 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2022-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di Dinas Kesehatan Kota Dumai untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2021-2026;
- KETIGA : Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2022-2026 dan cara perhitungannya tercantum sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Dumai

Pada Tanggal : 12 Januari 2024

a.n. Walikota Dumai
Kepala Dinas Kesehatan


Dr. SYAIFUL, MKM
Pembina Utama Muda/IV c
NIP. 197107242001121004

Lampiran Surat Keputusan
Walikota Dumai
Nomor : 11/DINKES/2024
Tanggal : 12 Januari 2024

**PERUBAHAN DEFENISI OPERASIONAL
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI
TAHUN 2022-2026**

1. Menurunnya Mortalitas (Angka Kematian)

1) Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah bayi (berumur < 1 th) yang meninggal di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun}}{\text{Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada tahun yang sama}} \times 1.000$$

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi pada bayi sebelum mencapai usia satu tahun. Kelahiran hidup adalah suatu kelahiran seorang bayi tanpa memperhitungkan lamanya di dalam kandungan, dimana bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan, misal: bernafas, ada denyut jantung atau gerakan otot.

2) Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah anak berumur < 5 th yang meninggal di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun}}{\text{Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada tahun yang sama}} \times 1.000$$

Kematian balita adalah kematian yang terjadi pada anak sebelum mencapai usia lima tahun. Kelahiran hidup adalah suatu kelahiran seorang bayi tanpa memperhitungkan lamanya di dalam kandungan, dimana bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan, misal: bernafas, ada denyut jantung atau gerakan otot.

3) Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun}}{\text{Jumlah kelahiran hidup di wilayah dan pada tahun yang sama}} \times 100.000$$

Kematian ibu adalah kematian yg terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan, persalinan dan masa nifas. Kematian ibu dimaksud adalah yang disebabkan karena kehamilannya atau penanganannya (penyebab langsung), bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan dan terjatuh (penyebab tidak langsung).

4) Umur harapan hidup

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah tahun kehidupan dari kohort}}{\text{Jumlah kohort}}$$

Umur Harapan Hidup adalah suatu perkiraan rata-rata lamanya hidup per penduduk (dalam tahun) sejak lahir yang akan dicapai oleh penduduk dalam suatu wilayah dan waktu tertentu yang dihitung berdasarkan angka kematian menurut kelompok umur dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.. Umur Harapan Hidup dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

2. Menurunnya Morbiditas (Angka Kesakitan)

1) Angka kesakitan (API) malaria per 1000 penduduk

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah penderita positif malaria (dengan pemeriksaan sediaan darah) di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun}}{\text{Jumlah penduduk di wilayah dan pada tahun yang sama}} \times 1.000$$

Penderita malaria positif adalah kasus dengan gejala klinis malaria (demam tinggi disertai menggigil) dengan pemeriksaan sediaan darah di laboratorium

2) Angka kesembuhan Penderita TB Paru BTA+

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah pasien TB Paru BTA + yang sembuh di suatu wilayah selama periode tertentu}}{\text{Jumlah pasien TB Paru BTA + yang diobati di wilayah dan pada kurun waktu yang sama}} \times 100\%$$

BTA (+) diobati adalah pasien baru Tuberkulosis BTA positif yang mendapatkan pengobatan dengan Obat Anti Tuberkulosis . BTA (+) diobati merupakan kohort yang sama dari kasus yang dinilai kesembuhan dan pengobatan lengkap. Kesembuhan adalah pasien yang telah menyelesaikan pengobatan secara lengkap dan hasil pemeriksaan apusan dahak ulang (*follow-up*) dengan hasil negatif pada akhir pengobatan dan pada satu pemeriksaan sebelumnya.

3) Prevalensi Penderita HIV terhadap penduduk beresiko

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah kasus HIV (baru dan lama) di suatu wilayah tertentu selama 1 th}}{\text{Jumlah penduduk dewasa (umur 15 – 49 tahun) di wilayah dan pada tahun yang sama}} \times 100\%$$

Penderita HIV adalah penderita yang menurut hasil pemeriksaan laboratorium dinyatakan positif HIV.

Penduduk beresiko HIV yaitu penduduk yang pekerjaannya atau gaya hidupnya menyebabkan mereka menghadapi kemungkinan/resiko lebih tinggi untuk ketularan dan menularkan HIV seperti :

- a. Ibu hamil, yaitu perempuan yang sedang hamil
- b. Pasien TBC, yaitu pasien yang terbukti terinfeksi TBC dan sedang mendapat pelayanan terkait TBC.
- c. Pasien Infeksi Menular Seksual (IMS), yaitu pasien yang terbukti terinfeksi IMS selain HIV dan sedang mendapat pelayanan terkait IMS.
- d. Penjaja seks, yaitu seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan orang lain sebagai sumber penghidupan utama maupun tambahan, dengan imbalan tertentu berupa uang, barang atau jasa.

- e. Lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL) yaitu lelaki yang pernah berhubungan seks dengan lelaki lainnya, sekali, sesekali atau secara teratur apapun orientasi seksnya (heteroseksual, homoseksual atau biseksual).
- f. Transgender/waria, yaitu orang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan jenis kelamin atau seksnya yang ditunjuk saat lahir, kadang disebut juga transeksual.
- g. Pengguna napza suntik (penasun), yaitu orang yang terbukti memiliki riwayat menggunakan narkotika dan atau zat adiktif suntik lainnya.
- h. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), yaitu orang yang dalam pembinaan pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dan telah mendapatkan vonis tetap.

4) Angka kesakitan demam berdarah dengue (DBD) per 100.000 penduduk

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah penderita demam berdarah dengue}}{\text{Jumlah penduduk pada tempat dan waktu yang sama}} \times 100.000$$

Penderita DBD adalah penderita demam tinggi mendadak berlangsung 2-7 hari, disertai manifestasi pendarahan (antara lain uji tourniquet positif, petekie, ekimosis, epitaksis, perdarahan gusi, hematesemis dan/atau melena dsb) ditambah trombositopenia (trombosit $\leq 100.000/\text{mm}^3$) dan hemokonsentrasi (peningkatan hematokrit $\geq 20\%$).

3. Meningkatnya Status Gizi Balita

1) Persentase balita dengan gizi buruk

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah balita yang berstatus gizi buruk di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun}}{\text{Jumlah balita yang diukur/ditimbang di wilayah dan pada tahun yang sama}} \times 100\%$$

Kasus balita gizi buruk adalah balita dengan status gizi berdasarkan indeks berat badan (BB) menurut panjang badan (BB/PB) atau berat badan (BB) menurut tinggi badan (BB/TB) dengan Z-score < -3 SD (sangat kurus) dan/atau terdapat tanda-tanda klinis gizi buruk lainnya (marasmus, kwashiorkor, marasmus-kwashiorkor)

2) Persentase balita dengan gizi kurang

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah balita yang berstatus gizi kurang di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun}}{\text{Jumlah balita yang diukur/ditimbang di wilayah dan pada tahun yang sama}} \times 100\%$$

Balita gizi kurang adalah status gizi menurut berat badan (BB) dan umur (U) dengan $-2 > Z\text{-score} > -3$

4. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Dumai

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan (BPJS) di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah penduduk di wilayah dan kurun waktu tahun yang sama}} \times 100\%$$

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berupa jaminan perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Peserta JKN terdiri dari:

- Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN : Masyarakat miskin dan tidak mampu yang iurannya dibiayai oleh Pemerintah Pusat melalui APBN
- Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD : Peserta JKN yang iurannya dibiayai oleh Pemerintah Daerah melalui APBD.
- Pekerja Penerima Upah (PPU) : Peserta JKN yang terdiri dari PNS, TNI/ POLRI, Pejabat Negara, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang iurannya dibiayai oleh pemberi kerja dan peserta yang bersangkutan.
- Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/Mandiri : Peserta JKN yang bekerja mandiri dan iurannya dibiayai oleh peserta yang bersangkutan.
- Bukan Pekerja (BP) : Peserta JKN yang terdiri dari investor, pemberi pajak, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan dan bukan pekerja lainnya yang iurannya dibiayai oleh peserta yang bersangkutan.

a.n. Walikota Dumai

Kepala Dinas Kesehatan



DM SYAIFUL, MKM

Pembina Utama Muda/IV c

NIP. 19710724200112100

**PERUBAHAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI
TAHUN 2022-2026**

No	Sasaran Strategis	Sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1 Menurunnya Mortalitas (Angka Kematian)	%	100	100	100	100	100
		1.1 Angka Kematian Bayi per 1.000 KH	per 1.000 KH	17.5	17	8	8	7.8
		1.2 Angka Kematian Balita per 1.000 KH	per 1.000 KH	24.5	24	11	10	10
		1.3 Angka Kematian Ibu per 100.000 KH	per 100.000 KH	101.5	101	100.5	100	100
		1.4 Umur Harapan Hidup	Tahun	71.25	71.29-71.33	71.34-71.37	71.38-71.42	71.42-71.46
		2 Menurunnya Morbiditas (Angka Kesakitan)	%	100	100	100	100	100
		2.1 Angka Kesakitan Malaria (API) per 1.000 penduduk	per 1.000 penduduk	0.9	0.8	0.1	0.1	0.1
		2.2 Persentase Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA +	%	88	88	88	88	88
		2.3 Prevalensi Penderita HIV Terhadap Penduduk Beresiko	%	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
		2.4 Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk	per 100.000 penduduk	55	55	54	54	54
		3 Meningkatkan Status Gizi Balita	%	100	100	100	100	100
		3.1 Persentase Balita dengan Gizi Buruk	%	1	1	1	1	1
		3.2 Persentase Balita dengan Gizi Kurang	%	3	3	2	2	2
		2	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	4 Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Dumai	%	92.2	97	100

a.n. Walikota Dumai
Kepala Dinas Kesehatan



SYAIFUL, MKM

Pembina Utama Muda/IV c
NIP. 19710724200112100



LAMPIRAN 3



PEMERINTAH KOTA DUMAI

DINAS KESEHATAN

Komplek Perkantoran Walikota Jl. Tuanku Tambusai,
Website: <http://dinkes.dumaikota.go.id>
DUMAI

KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI NOMOR : 106 /DINKES/2023

TENTANG PENETAPAN PETA PROSES BISNIS PADA DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI TAHUN 2023

Menimbang :

- a. bahwa penataan ketatalaksanaan merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan struktur organisasi yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses;
- b. bahwa untuk ketertiban penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, berdaya guna, serta meningkatkan kualitas dan kinerja yang terukur dalam pelayanan publik, perlu disusun peta proses bisnis pada Dinas Kesehatan Kota Dumai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Dumai tentang Penetapan Peta Proses Bisnis Pada Dinas Kesehatan Kota Dumai;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kotamadya Dumai Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 73. Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
7. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 1 Seri D)
13. Peraturan Walikota Dumai Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 28 Seri E)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI TENTANG PENETAPAN PETA PROSES BISNIS PADA DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI**
- KESATU** : Menetapkan Peta Proses Bisnis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Penetapan Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini, merupakan bagian yang digunakan untuk mengidentifikasi secara jelas alur yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses bisnis di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Dumai.
- KETIGA** : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud diktum KESATU menjadi acuan gambaran hubungan kerja yang efektif dan efisien dalam mencapai kinerja sesuai dengan tujuan dasar dan pedoman untuk menyusun peta proses bisnis Dinas Kesehatan Kota Dumai.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal : 21 September 2023

a.n Walikota Dumai
Kepala
Dr. SYAIFUL, MKM
PEMBAWA Utama Muda /IVc
NIR.197107242001121004



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI
 NOMOR : /DINKES/2023 TENTANG PENETAPAN
 PETA PROSES BISNIS PADA DINAS KESEHATAN
 KOTA DUMAI

A. IDENTIFIKASI KODE PETA PROSES BISNIS DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI

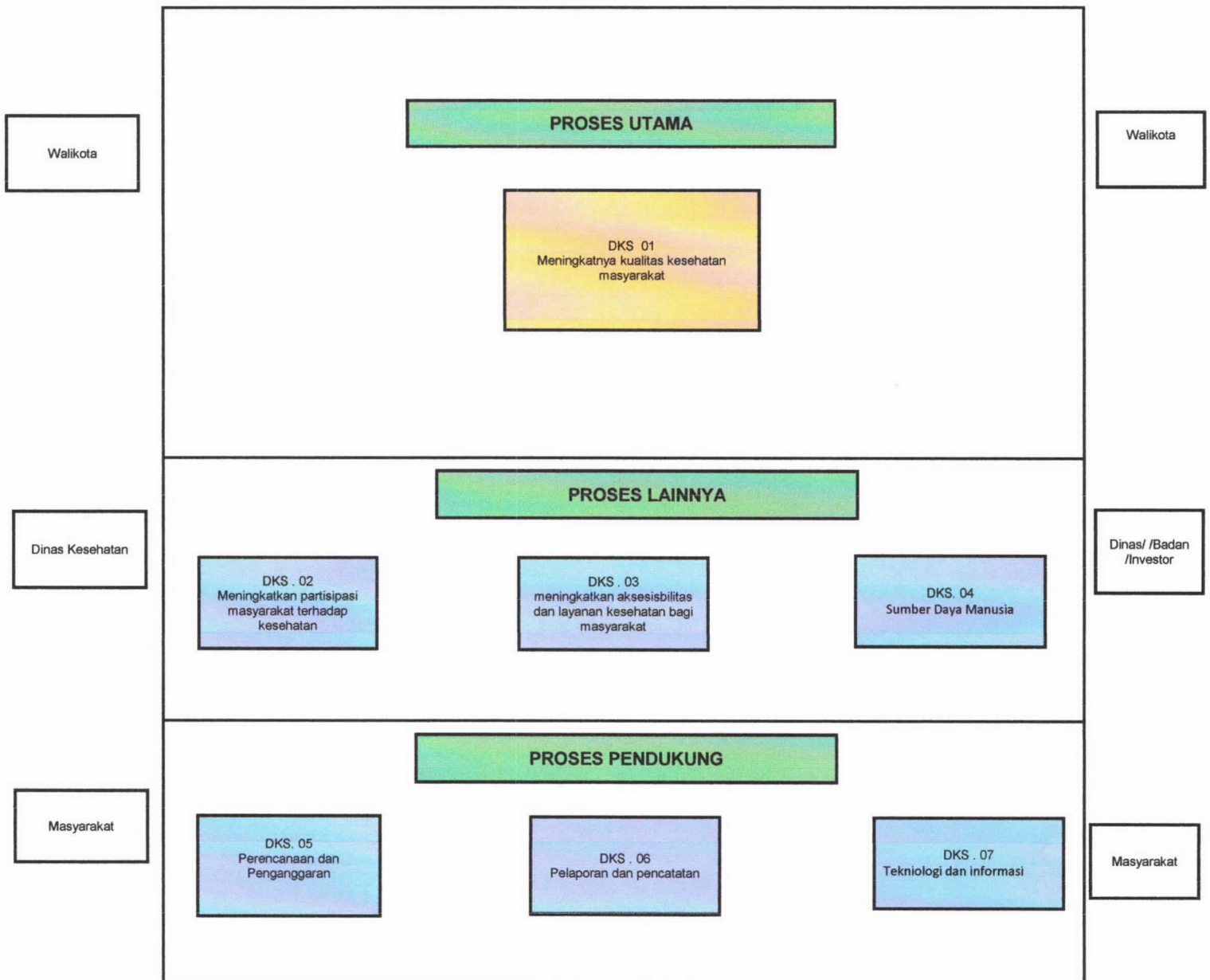
PROSES BISNIS/ Sasaran		SUB PROSES BISNIS /Strategi		Peta Lintas Fungsi / Arah Kebijakan	
1		2		3	
Kode	PROSES UTAMA	Kode		Kode	
DKS 01	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	DKS 01.01	Meningkatnya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat sesuai standar	DKS 01.01.01	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
				DKS 01.01.02	Penyediaan layanan kesehatan menggunakan siklus hidup (continue of care)
		DKS 01.02	Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	DKS 01.02.01	Peningkatan kualitas, kuantitas dan pendayagunaan tenaga kesehatan
		DKS 01.03	Meningkatkan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman sesuai standar	DKS 01.03.01	Peningkatan pengendalian dan pengawasan perizinan dan penerbitan sertifikat sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman
DKS 02	Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kesehatan	DKS 02.01	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan gerakan masyarakat hidup sehat serta pembangunan berwawasan kesehatan	DKS 02.01.01	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan melalui kemitraan dan partisipasi lintas sektor, lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan swasta dan pemangku kepentingan terkait lainnya
		DKS 02.02	Meningkatkan aksesibilitas dan layanan kesehatan bagi masyarakat	DKS 02.02.01	Peningkatan cakupan Universal Health Coverage(UHC)

B. TABEL PROSES BISNIS PADA PETA PROSES BISNIS

PROSES BISNIS			
No	Proses/Sasaran	Jenis proses	Kode
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Utama	DKS 01
2	Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kesehatan	Lainnya	DKS 02
3	Meningkatkan aksesibilitas dan layanan kesehatan bagi masyarakat	Lainnya	DKS 03
4	Sumber Daya Manusia	Lainnya	DKS 04
5	Perencanaan dan Penganggaran	Pendukung	DKS 05
6	Pelaporan dan Pencatatan	Pendukung	DKS 06
7	Teknologi dan Informasi	Pendukung	DKS 07

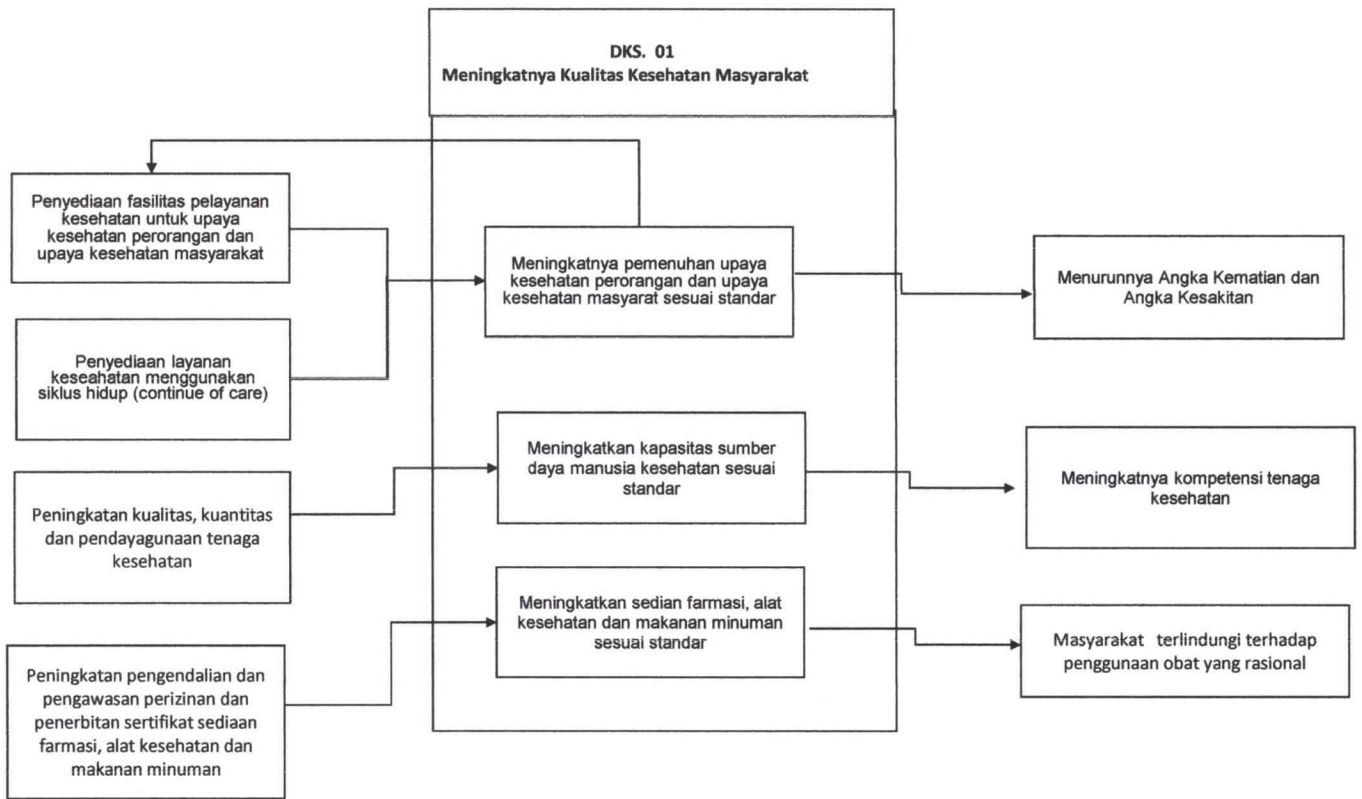
C. PETA PROSES PADA PETA PROSES BISNIS DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI

PETA PROSES BISNIS DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KOTA DUMAI

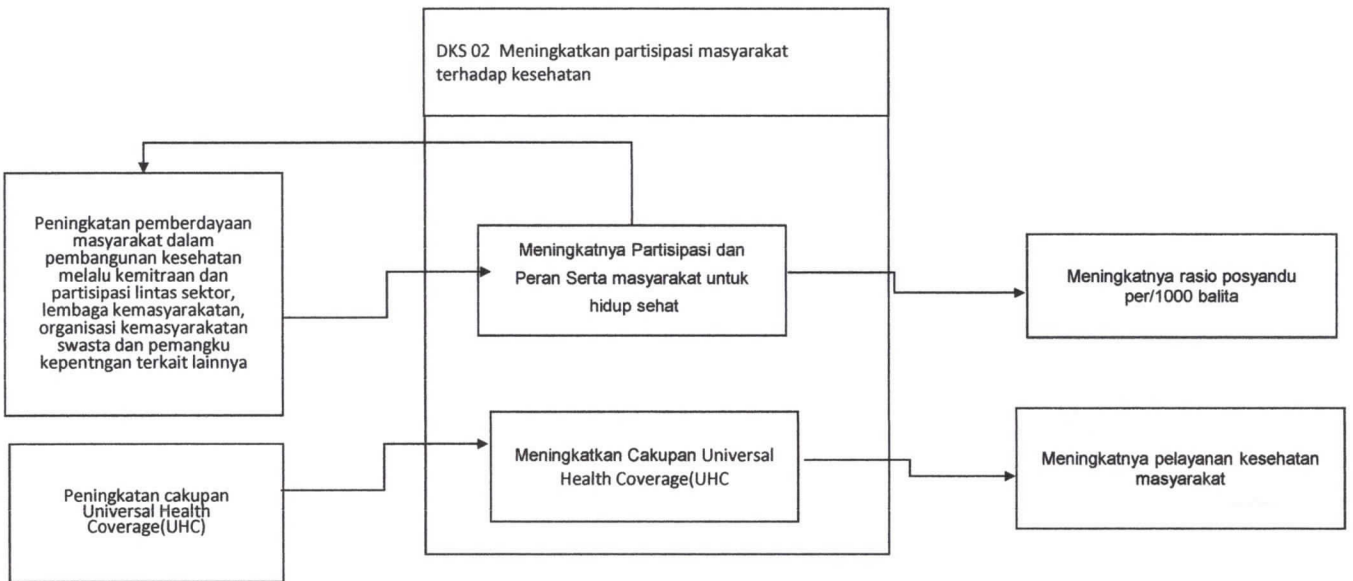


D. PETA SUB PROSES PADA PETA PROSES BISNIS

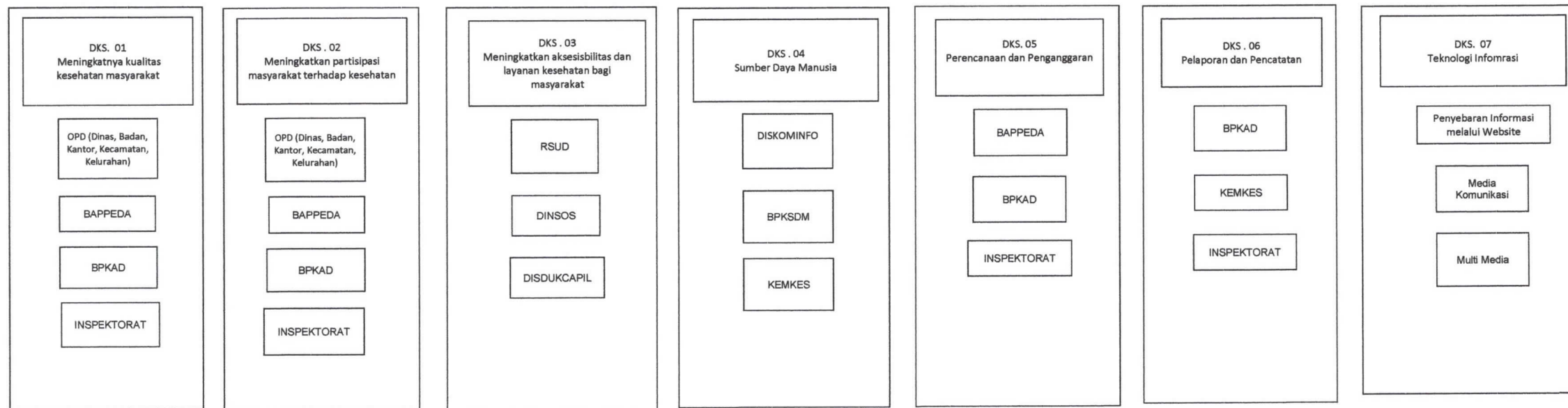
PETA SUB PROSES



PETA SUB PROSES



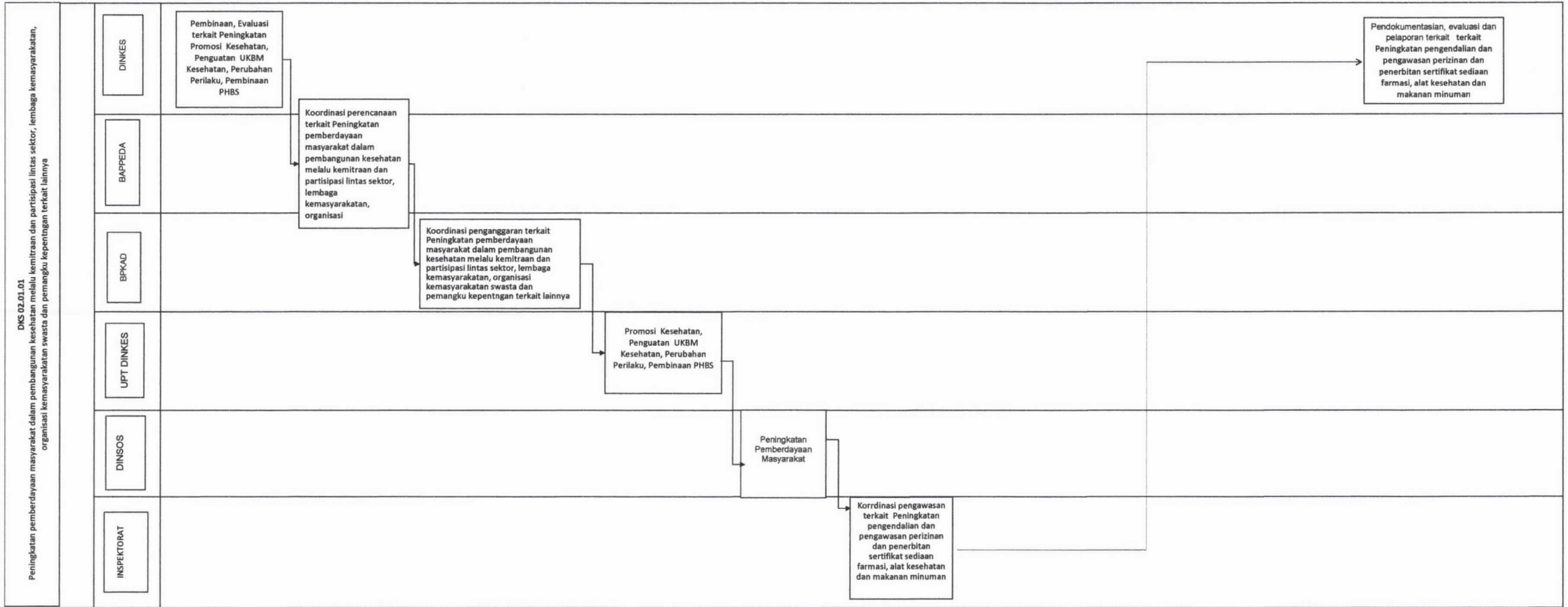
E. PETA RELASI PADA PETA PROSES BISNIS



PETA LINTAS FUNGSI

DKS 02.01.01

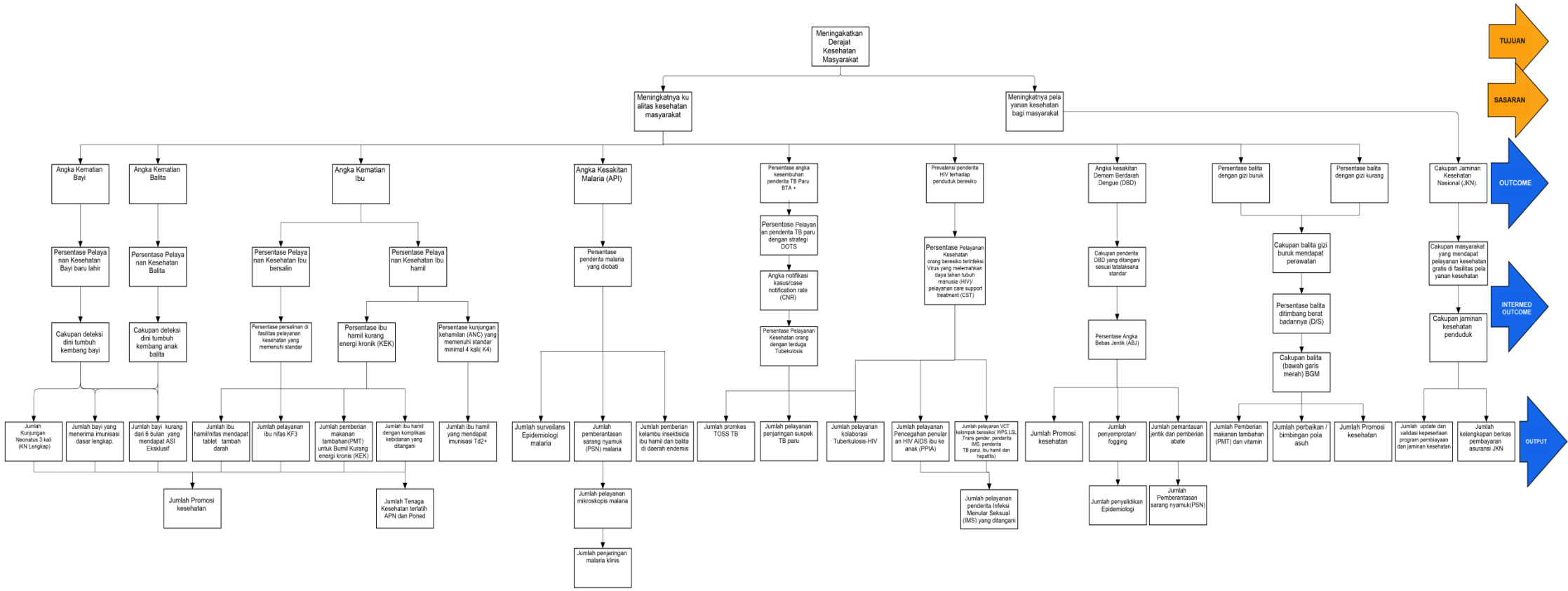
Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan melalui kemitraan dan partisipasi lintas sektor, lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan swasta dan pemangku kepentingan terkait lainnya



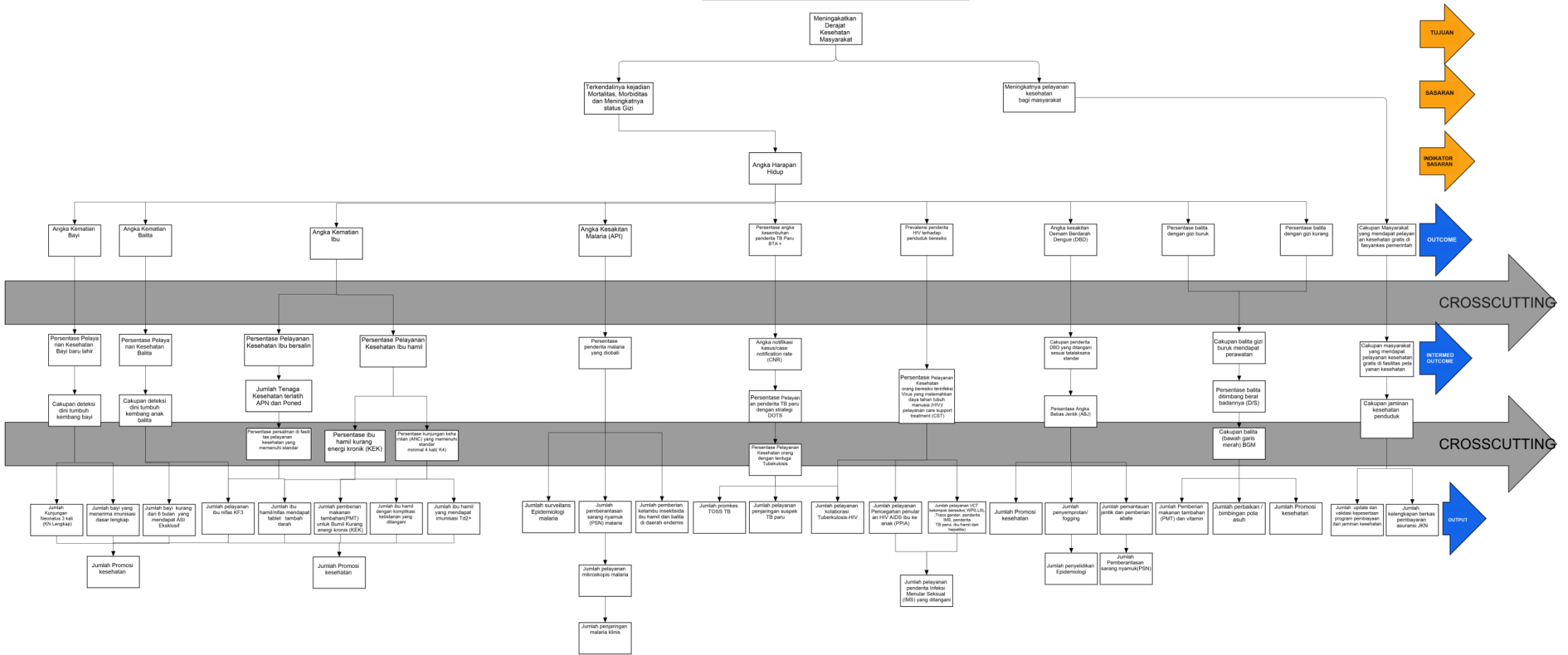


LAMPIRAN 4

POHON KINERJA



POHON KINERJA





LAMPIRAN 5

TABEL 3.13
KERANGKA PENDANAAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/ Berkurang (Rp)	Keterangan
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan (Dinas Kesehatan)	100%	54,975,933,466	100%	59,329,894,028	4,253,960,562	
1.02.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	28 dokumen	95,158,206	28 dokumen	95,158,206	-	
1.02.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7 dokumen	49,007,856	7 dokumen	49,007,856	-	
1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	1,503,600	2 dokumen	1,503,600	-	
1.02.01.2.01.03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	1,503,600	2 dokumen	1,503,600	-	
1.02.01.2.01.04	Koordinasi dan penyusunan dokume DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	1,809,850	2 dokumen	1,809,850	-	
1.02.01.2.01.05	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	1,809,850	2 dokumen	1,809,850	-	
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	16,708,950	4 laporan	16,708,950	-	
1.02.01.2.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 laporan	22,814,500	9 laporan	22,814,500	-	Pergeseran uraian belanja sub kegiatan
1.02.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	2 laporan	50,657,810,062	2 laporan	51,474,529,624	816,719,562	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	456 orang/bulan	50,604,760,062	539 orang/bulan	51,383,229,624	778,469,562	Penambahan Gaji, tunjangan dan TPP Tenaga P3K sebanyak 41 orang
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	53,050,000	2 Laporan	91,300,000	38,250,000	Penambahan anggaran pelaksanaan FGD aspek hukum dalam pengelolaan keuangan
1.02.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4 dokumen	28,400,000	4 dokumen	28,400,000	-	
1.02.01.2.03.01	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	13,400,000	2 dokumen	13,400,000	-	
1.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	15,000,000	2 laporan	15,000,000	-	
1.02.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah	461 orang	329,931,866	539 orang	323,313,366	(6,618,500)	
1.02.01.2.05.05	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	165,071,770	1 dokumen	158,453,270	(6,618,500)	Ada pengurangan honor tim penilai angka kredit dan penambahan honor tim penilai e-kinerja serta penambahan anggaran perjalanan dinas dalam kota.
1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 orang	164,860,096	9 orang	164,860,096	-	
1.02.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	899,477,832	12 bulan	1,395,318,832	495,841,000	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/ Berkurang (Rp)	Keterangan
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1.02.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor	1 paket	18,788,700	5 paket	39,564,100	20,775,400	Penambahan anggaran penyediaan komponen instalasi listrik, penambahan anggaran pemeliharaan jaringan internet dan pemindahan penyediaan komponen instalasi listrik dari sub kegiatan pengadaan obat dan vaksin
1.02.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	223,374,600	6 paket	390,587,400	167,212,800	Ada penambahan ATK dan penambahan anggaran untuk kegiatan HKN
1.02.01.2.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 paket	19,999,000	3 paket	34,851,200	14,852,200	Ada penambahan anggaran peralatan rumah tangga dan pemindahan anggaran peralatan rumah tangga dari sub kegiatan pengadaan obat dan vaksin
1.02.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	55,395,000	4 paket	139,186,500	83,791,500	Penambahan makan minum HKN dan pemindahan anggaran makan minum dari sub kegiatan pengadaan obat dan vaksin
1.02.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	59,995,532	4 paket	149,824,632	89,829,100	Ada penambahan anggaran cetak dan penggandaan, pengadaan cetak kegiatan HKN
1.02.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	3,052,000	1 dokumen	3,052,000	-	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	490,137,000	1 laporan	590,137,000	100,000,000	Penambahan anggaran SPPD
1.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	28,736,000	1 dokumen	48,116,000	19,380,000	Penambahan anggaran honorarium operator pengelola e-office/website dan penambahan anggaran perjalanan dinas ke luar kota Dumai
1.02.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13 unit	225,208,000	121 unit	828,503,500	503,295,500	
1.02.01.2.07.01	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	125,208,000	1 unit	125,208,000	-	
1.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			54 unit	149,196,000.00	149,196,000	Ada penambahan DBH. Ada penambahan anggaran pengadaan mebel dan pemindahan anggaran pengadaan mebel dari sub kegiatan pengadaan obat dan vaksin
1.02.01.2.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 unit	100,000,000	66 unit	554,099,500.00	454,099,500	Ada penambahan DBH. Penambahan anggaran peralatan dan mesin lainnya dan pemindahan anggaran pengadaan peralatan dan mesin lainnya dari sub kegiatan pengadaan obat dan vaksin
1.02.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	2,045,200,000	12 bulan	3,267,870,000	1,222,670,000	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	379,600,000	1 laporan	445,600,000	66,000,000	Ada penambahan DBH. Ada Pergeseran uraian belanja sub kegiatan dan penambahan anggaran belanja jasa publikasi artikel (koran), jasa adventorial dan galeri
1.02.01.2.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	448,400,000	1 laporan	619,970,000	171,570,000	Penambahan honor pengelola keuangan, penghapusan aset dan kegiatan HKN, penambahan perjalanan dinas dalam kota
1.02.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1,217,200,000	1 laporan	2,202,300,000	985,100,000	Ada penambahan DBH. Penambahan anggaran jasa pelayanan umum kantor untuk 5 bulan karena baru dianggarkan sebanyak 7 bulan, penambahan tenaga kebersihan 1 orang dan pengadaan pakaian seragam petugas kebersihan, supir dan petugas keamanan kantor
1.02.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	19 unit	694,747,500	22 unit	1,916,800,500	1,222,053,000	
1.02.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 unit	494,747,500	21 unit	741,800,500	247,053,000	Ada penambahan DBH. Ada penambahan biaya pemeliharaan ambulans puskesmas

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/ Berkurang (Rp)	Keterangan
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	200,000,000	1 unit	1,175,000,000	975,000,000	Ada penambahan DBH. Ada penambahan anggaran untuk penggantian atap, pemeliharaan taman dan halaman kantor, rehab lantai kantor, pembuatan rumah genset dan pemeliharaan genset
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan)	82%	26,585,381,009	82%	67,900,151,561	41,314,770,552	
1.02.02.2.01	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah untuk UKM dan UKP	12 sarana	3,559,944,497	12 sarana	21,788,802,893	18,228,858,396	
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang dibangun			1 unit	4,551,394,000	4,551,394,000	Ada penambahan DBH. Ada penambahan anggaran konsultan perencana pembangunan puskesmas Dumai Kota, penambahan anggaran makan minum rapat FGD, penambahan anggaran honor Tim FGD dan penambahan perjalanan dinas pendampingan BPKP Pembangunan Puskesmas Bukit Kayu Kapur (Relokasi) dan penambahan perjalanan dinas luar kota
1.02.02.2.01.03	Pembangunan fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun			1 unit	1,234,624,000	1,234,624,000	Ada penambahan DBH. Penambahan anggaran FGD Pustu Kampung Sejati
1.02.02.2.01.06	Pengembangan puskesmas	Jumlah puskesmas yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar			5 unit	705,000,000	705,000,000	Ada penambahan DBH
1.02.02.2.01.07	Pengembangan fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar	1 unit	250,000,000	9 unit	1,611,000,000	1,361,000,000	Ada penambahan DBH. Ada penambahan anggaran untuk pengadaan sumur bor pkm BKK, rumah genset dan instalasi serta perbaikan jembatan polindes Santa Hulu
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan pemeliharaan puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas			5 unit	1,145,000,000	1,145,000,000	Ada penambahan DBH. Penambahan anggaran untuk rehab puskesmas Medang Kampai dan rehab puskesmas Sungai Sembilan
1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 unit	200,000,000	7 unit	1,095,000,000	895,000,000	Ada penambahan DBH. Ada penambahan kegiatan rehab faskes lainnya yakni rehab poskeskel Batu Teritip II dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal (KHIDMAT KESEHATAN)
1.02.02.2.01.13	Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	5 unit	235,200,000	7 unit	1,524,331,000	1,289,131,000	Ada penambahan DBH dan DAK Fisik. Ada penambahan kegiatan pengadaan prasarana dan pendukung fasyankes yakni pengadaan ambulans dan pembuatan sumur bor poskeskel batu teritip dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal (KHIDMAT KESEHATAN), serta sewa mobil operasional
1.02.02.2.01.14	Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	150 unit	280,075,000	117 unit	3,006,495,000	2,726,420,000	Ada penambahan DBH dan DAK Fisik. Ada penambahan kegiatan pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik di fasyankes dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal
1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance	280 unit	100,000,000	285 unit	100,000,000	-	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan obat, vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	1 paket	1,000,000,000	1 paket	2,437,624,860	1,437,624,860	Ada penambahan DBH. Penambahan anggaran pengadaan obat, vaksin
1.02.02.2.01.17	Pengadaan bahan habis pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	3 paket	1,394,669,497	3 paket	4,278,334,033	2,883,664,536	Ada penambahan DBH dan DAK Non Fisik. Penambahan anggaran pengadaan bahan habis pakai

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/ Berkurang (Rp)	Keterangan
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	10 unit	100,000,000	10 unit	100,000,000	-	
1.02.02.2.02	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP	10 puskesmas	16,687,016,522	10 puskesmas	35,293,787,978	18,606,771,456	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9.486 orang	88,499,900	9.486 orang	274,348,900	185,849,000	Ada penambahan DBH dan DAK Non Fisik (BOK). Penambahan kegiatan HKN
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9.055 orang	82,354,000	9.055 orang	84,604,000	2,250,000	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK)
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8.623 orang	69,607,400	8.623 orang	110,157,402	40,550,002	Ada penambahan DBH
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	35.820 orang	73,832,300	35.820 orang	271,832,300	198,000,000	Penambahan kegiatan HKN
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	60.363 orang	30,887,400	60.363 orang	30,887,400	-	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	207.024 orang	16,200,000	207.024 orang	77,200,000	61,000,000	Ada penambahan DBH. Ada Pergeseran uraian belanja sub kegiatan
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15.189 orang	13,115,500	15.189 orang	82,115,500	69,000,000	Penambahan kegiatan HKN
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	71.775 orang	15,000,000	71.775 orang	15,000,000	-	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.777 orang	30,749,900	3.777 orang	308,970,900	278,221,000	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK)
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah pelaksanaan pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	498 orang	25,858,000	498 orang	25,858,000	-	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	8.044 orang	20,422,500	8.044 orang	947,422,500	927,000,000	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK)
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	9.136 orang	292,782,500	9.136 orang	412,782,500	120,000,000	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK). Ada Pergeseran uraian belanja sub kegiatan
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 dokumen	1,000,000,000	1 dokumen	1,355,712,000	355,712,000	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK). Penambahan anggaran honor tim koordinasi vaksinasi, tim verifikasi data covid 19 dan vaksinasi serta tim verifikator insentif vaksinasi covid 19 dan pergeseran anggaran KLB
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 dokumen	295,499,900	1 dokumen	641,679,000	346,179,100	Ada penambahan DBH dan DAK Non Fisik (BOK). Penambahan pengadaan PMT Ibu hamil KEK dan PKMK balita gizi buruk/stunting. Pergeseran anggaran perjalanan dinas luar kota Dumai
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga			1 dokumen	29,100,000	29,100,000	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK)
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 dokumen	659,152,800	5 dokumen	1,082,502,800	423,350,000	Ada penambahan DBH dan DAK Non Fisik (BOK). Penambahan anggaran untuk kegiatan pertemuan pemucuan STBM dan percepatan ODF, penambahan anggaran kegiatan EHRA dan penambahan anggaran perjalanan dinas luar kota Dumai
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 dokumen	46,308,255	1 dokumen	255,291,030	208,982,775	Ada penambahan DBH dan DAK Non Fisik (BOK)
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan surveilans kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 dokumen	116,300,000	1 dokumen	469,331,000	353,031,000	Ada penambahan DBH dan BOK Non Fisik (BOK). Ada Pergeseran uraian belanja sub kegiatan

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/ Berkurang (Rp)	Keterangan
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang Dengan Masalah Kesehatan Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			821 orang	53,800,000	53,800,000	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK)
1.02.02.2.02.25	Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 dokumen	167,040,000	1 dokumen	1,006,015,000	838,975,000	Ada penambahan DBH dan BOK Non Fisik. Ada penambahan anggaran karena terjadi peningkatan kasus DBD
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 dokumen	13,235,505,563	1 dokumen	26,951,877,142	13,716,371,579	Ada penambahan DBH. Penambahan iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPJ dan BP kelas 3 untuk 3 bulan karena baru teranggarkan selama 9 bulan, penambahan anggaran perjalanan dinas luar kota
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 dokumen	29,999,704	1 dokumen	29,999,704	-	Pergeseran uraian belanja sub kegiatan
1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan pengelolaan sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 unit	377,900,900	1 unit	725,300,900	347,400,000	Penambahan gaji TKPK PSC untuk 5 bulan karena baru dianggarkan sebanyak 7 bulan dan penambahan anggaran perjalanan petugas pengantar pasien rujukan pasien rawat jalan ke RS rujukan di Pekan Baru (Program Inovasi Khidmat Kesehatan: OPLET SIPAI)
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Malaria			2 orang	52,000,000	52,000,000	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK)
1.02.02.2.03	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah sarana fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan SIK secara terintegrasi	11 sarana	199,715,590	11 sarana	199,715,590	-	
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan data dan informasi kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	8 dokumen	177,829,300	8 dokumen	177,829,300	-	Pergeseran uraian belanja sub kegiatan
1.02.02.2.03.03	Pengadaan alat/perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	2 unit	21,886,290	2 unit	21,886,290	-	
1.02.02.2.04	Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana rumah sakit, puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	103 sarana	6,138,704,400	103 sarana	10,617,845,100	4,479,140,700	
1.02.02.2.04.01	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	17 unit	36,424,000	17 unit	36,424,000	-	Pergeseran uraian belanja sub kegiatan
1.02.02.2.04.02	Peningkatan tata kelola rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	75 unit	83,493,400	75 unit	83,493,400	-	
1.02.02.2.04.03	Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	11 unit	5,994,487,000	11 unit	10,473,627,700	4,479,140,700	Ada penambahan DBH. Penambahan gaji TKPK 5 bulan karena baru teranggarkan sebanyak 7 bulan dll
1.02.02.2.04.04	Penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	2 dokumen	24,300,000	2 dokumen	24,300,000	-	Pergeseran uraian belanja sub kegiatan
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase ketersediaan tenaga kesehatan di puskesmas dan jaringannya sesuai standar	83%	66,633,400	83%	864,829,200	798,195,800	
1.02.03.2.01	Kegiatan Pemberian izin praktek tenaga kesehatan di wilayah kabupaten Kota	Jumlah tempat praktek tenaga kesehatan yang memenuhi persyaratan perizinan	25 tempat	22,500,000	25 tempat	84,500,000	62,000,000	
1.02.03.2.01.01	Pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 dokumen	22,500,000	1 dokumen	84,500,000	62,000,000	Ada penambahan anggaran untuk belanja pengadaan software atau aplikasi SIP untuk memudahkan pengurusan perizinan tenaga kesehatan agar lebih efisien dan efektif.
1.02.03.2.02	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah puskesmas yang menerapkan aplikasi SDMK	10 puskesmas	44,133,400	10 puskesmas	129,728,400	85,595,000	
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2 dokumen	44,133,400	2 dokumen	129,728,400	85,595,000	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK).

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/ Berkurang (Rp)	Keterangan
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1.02.03.2.03	Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan			9 kegiatan	650,600,800	650,600,800	
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya			400 orang	650,600,800	650,600,800	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK)
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotik dan toko obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	49%	285,151,692	79%	977,320,492	692,168,800	
1.02.04.2.01	Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah apotik, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, dan UMOT yang memenuhi persyaratan perizinan	116 sarana	25,200,000	116 sarana	283,860,000	258,660,000	
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	3 dokumen	25,200,000	3 dokumen	283,860,000	258,660,000	Ada penambahan DBH dan DAK Non Fisik (BOK)
1.02.04.2.03	Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah industri rumah tangga pangan (IRTP) yang memenuhi persyaratan perizinan	50 sarana	25,710,000	50 sarana	152,595,000	126,885,000	
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 dokumen	25,710,000	1 dokumen	152,595,000	126,885,000	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK)
1.02.04.2.04	Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah dokumen pelaksanaan pengawasan kualitas air minum dan air bersih, pelaksanaan pengawasan TTU dan TP2M	4 dokumen	116,249,892	4 dokumen	202,985,892	86,736,000	
1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penertiban sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	4 dokumen	116,249,892	4 dokumen	202,985,892	86,736,000	Ada penambahan DBH. Penambahan anggaran untuk kegiatan pelatihan penjamah makanan dan penambahan anggaran perjalanan dinas luar kota Dumai
1.02.04.2.05	Kegiatan Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah dokumen pelaksanaan penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	1 dokumen	96,241,800	1 dokumen	96,234,600	(7,200)	
1.02.04.2.05.01	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penertiban stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1 dokumen	96,241,800	1 dokumen	96,234,600	(7,200)	Ada pergeseran dan pengurangan anggaran uraian sub kegiatan
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah dokumen pelaksanaan pemeriksaan post market pada produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	1 dokumen	21,750,000	1 dokumen	241,645,000	219,895,000	
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan post market pada produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	30 unit	21,750,000	30 unit	241,645,000	219,895,000	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK)
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rasio posyandu per 1000 balita	4.68	316,417,700	4.68	1,584,116,700	1,267,699,000	

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/ Berkurang (Rp)	Keterangan
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1.02.05.2.01	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kelurahan siaga aktif	36 kelurahan	98,639,500	36 kelurahan	891,839,500	793,200,000	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	6 dokumen	98,639,500	6 dokumen	891,839,500	793,200,000	Penambahan anggaran kegiatan kampung GERMAS, jambore kader posyandu, dan kegiatan stunting,
1.02.05.2.02	Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang melaksanakan PHBS	34.439 rumah tangga	174,998,400	34.439 rumah tangga	174,998,400	-	
1.02.05.2.02.02	Pertumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	Jumlah keluarga yang mengikuti pertumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	34.439 keluarga	174,998,400	34.439 keluarga	174,998,400	-	
1.02.05.2.03	Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah posyandu mandiri	195 posyandu	42,779,800	195 posyandu	517,278,800	474,499,000	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3 dokumen	42,779,800	3 dokumen	517,278,800	474,499,000	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK)
				82,229,517,267		130,656,311,981	48,326,794,714	

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
 Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 Puskesmas Dumai Kota

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/ Berkurangnya (Rp)	Justifikasi
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan (Dinas Kesehatan)	100%	1,873,243,500.00	100%	2,224,213,000.00	350,969,500.00	
1.02.01.2.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah unit kerja yang melaksanakan kegiatan peningkatan pelayanan BLUD	1 unit kerja	1,873,243,500.00	1 unit kerja	2,224,213,000.00	350,969,500.00	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Puskesmas Dumai Kota	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1,873,243,500.00	1 unit kerja	2,224,213,000.00	350,969,500.00	Ada penambahan pendapatan BLUD puskesmas karena pemberlakuan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan dan penambahan kapitasi peserta BPJS
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan)			82%	889,051,000.00	889,051,000.00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP			1 unit kerja	889,051,000.00	889,051,000.00	Ada penambahan DAK Non Fisik (BOK Puskesmas bersumber APBN)
			TOTAL	1,873,243,500.00		3,113,264,000.00	1,240,020,500.00	

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
 Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 Puskesmas Dumai Barat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/ Berkurangnya (Rp)	Justifikasi
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan (Dinas Kesehatan)	100%	1,100,000,000.00	100%	1,550,000,000.00	450,000,000.00	
1.02.01.2.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah unit kerja yang melaksanakan kegiatan peningkatan pelayanan BLUD	1 unit kerja	1,100,000,000.00	1 unit kerja	1,550,000,000.00	450,000,000.00	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Puskesmas Dumai Barat	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1,100,000,000.00	1 unit kerja	1,550,000,000.00	450,000,000.00	Ada penambahan pendapatan BLUD puskesmas karena pemberlakuan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan dan penambahan kapitasi peserta BPJS
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan)			82%	566,934,000.00	566,934,000.00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP			1 unit kerja	566,934,000.00	566,934,000.00	
			TOTAL	1,100,000,000.00		2,116,934,000.00	1,016,934,000.00	

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
 Sub Unit Organisasi: : 1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas Bukit Kapur

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/ Berkurangnya (Rp)	Justifikasi
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan (Dinas Kesehatan)	100%	1,400,000,000.00	100%	1,700,000,000.00	300,000,000.00	
1.02.01.2.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah unit kerja yang melaksanakan kegiatan peningkatan pelayanan BLUD	1 unit kerja	1,400,000,000.00	1 unit kerja	1,700,000,000.00	300,000,000.00	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Puskesmas Bukit Kapur	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1,400,000,000.00	1 unit kerja	1,700,000,000.00	300,000,000.00	Ada penambahan pendapatan BLUD puskesmas karena pemberlakuan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan dan penambahan kapitasi peserta BPJS
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan)			82%	609,960,000.00	609,960,000.00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP			1 unit kerja	609,960,000.00	609,960,000.00	
			TOTAL	1,400,000,000.00		2,309,960,000.00	909,960,000.00	

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
 Sub Unit Organisasi: : 1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Sungai Sembilan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/ Berkurangnya (Rp)	Justifikasi
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan (Dinas Kesehatan)	100%	2,361,598,960.00	100%	2,973,471,944.00	611,872,984.00	
1.02.01.2.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah unit kerja yang melaksanakan kegiatan peningkatan pelayanan BLUD	1 unit kerja	2,361,598,960.00	1 unit kerja	2,973,471,944.00	611,872,984.00	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Puskesmas Sungai Sembilan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	2,361,598,960.00	1 unit kerja	2,973,471,944.00	611,872,984.00	Ada penambahan pendapatan BLUD puskesmas karena pemberlakuan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan dan penambahan kapitasi peserta BPJS
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan)			82%	1,065,820,000.00	1,065,820,000.00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP			1 unit kerja	1,065,820,000.00	1,065,820,000.00	
			TOTAL	2,361,598,960.00		4,039,291,944.00	1,677,692,984.00	

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
 Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Medang Kampai

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/ Berkurangnya (Rp)	Justifikasi
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan (Dinas Kesehatan)	100%	922,500,000.00	100%	1,296,706,000.00	374,206,000.00	
1.02.01.2.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah unit kerja yang melaksanakan kegiatan peningkatan pelayanan BLUD	1 unit kerja	922,500,000.00	1 unit kerja	1,296,706,000.00	374,206,000.00	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Puskesmas Medang Kampai	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	922,500,000.00	1 unit kerja	1,296,706,000.00	374,206,000.00	Ada penambahan pendapatan BLUD puskesmas karena pemberlakuan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan dan penambahan kapitasi peserta BPJS
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan)			82%	546,555,000.00	546,555,000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP			1 unit kerja	546,555,000.00	546,555,000	
			TOTAL	922,500,000.00		1,843,261,000.00	920,761,000	

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
 Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Bumi Ayu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/ Berkurangnya (Rp)	Justifikasi
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan (Dinas Kesehatan)	100%	1,105,404,000.00	100%	1,671,206,452.00	565,802,452.00	
1.02.01.2.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah unit kerja yang melaksanakan kegiatan peningkatan pelayanan BLUD	1 unit kerja	1,105,404,000.00	1 unit kerja	1,671,206,452.00	565,802,452.00	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Puskesmas Bumi Ayu	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1,105,404,000.00	1 unit kerja	1,671,206,452.00	565,802,452	Ada penambahan pendapatan BLUD puskesmas karena pemberlakuan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan dan penambahan kapitasi peserta BPJS serta penggunaan SILPA TA 2022
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan)			82%	797,979,000.00	797,979,000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP			1 unit kerja	797,979,000.00	797,979,000	
			TOTAL	1,105,404,000.00		2,469,185,452.00	1,363,781,452	

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
 Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas Bukit Timah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/ Berkurangnya (Rp)	Justifikasi
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan (Dinas Kesehatan)	100%	551,536,356.00	100%	920,000,000.00	368,463,644.00	
1.02.01.2.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah unit kerja yang melaksanakan kegiatan peningkatan pelayanan BLUD	1 unit kerja	551,536,356.00	1 unit kerja	920,000,000.00	368,463,644.00	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Puskesmas Bukit Timah	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	551,536,356.00	1 unit kerja	920,000,000.00	368,463,644	Ada penambahan pendapatan BLUD puskesmas karena pemberlakuan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan dan penambahan kapitasi peserta BPJS
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan)			82%	523,367,000.00	523,367,000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP			1 unit kerja	523,367,000.00	523,367,000	
			TOTAL	551,536,356.00		1,443,367,000.00	891,830,644	

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
 Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0009 Puskesmas Purnama

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/ Berkurangnya (Rp)	Justifikasi
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan (Dinas Kesehatan)	100%	1,048,195,000.00	100%	1,482,588,000.00	434,393,000.00	
1.02.01.2.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah unit kerja yang melaksanakan kegiatan peningkatan pelayanan BLUD	1 unit kerja	1,048,195,000.00	1 unit kerja	1,482,588,000.00	434,393,000.00	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Puskesmas Purnama	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1,048,195,000.00	1 unit kerja	1,482,588,000.00	434,393,000	Ada penambahan pendapatan BLUD puskesmas karena pemberlakuan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan dan penambahan kapitasi peserta BPJS
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan)			82%	704,120,000.00	704,120,000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP			1 unit kerja	704,120,000.00	704,120,000	
			TOTAL	1,048,195,000.00		2,186,708,000.00	1,138,513,000	

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
 Sub Unit Organisasi: : 1.02.0.00.0.00.01.0010 Puskesmas Jaya Mukti

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/ Berkurangnya (Rp)	Justifikasi
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan (Dinas Kesehatan)	100%	2,380,000,000.00	100%	3,150,000,000.00	770,000,000	
1.02.01.2.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah unit kerja yang melaksanakan kegiatan peningkatan pelayanan BLUD	1 unit kerja	2,380,000,000.00	1 unit kerja	3,150,000,000.00	770,000,000	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Puskesmas Jaya Mukti	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	2,380,000,000.00	1 unit kerja	3,150,000,000.00	770,000,000	Ada penambahan pendapatan BLUD puskesmas karena pemberlakuan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan dan penambahan kapitasi peserta BPJS serta penggunaan SILPA TA 2022
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan)			82%	1,152,406,000.00	1,152,406,000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP			1 unit kerja	1,152,406,000.00	1,152,406,000	
			TOTAL	2,380,000,000.00		4,302,406,000.00	1,922,406,000	

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
 Sub Unit Organisasi: : 1.02.0.00.0.00.01.0011 Puskesmas Bukit Kayu Kapur

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/ Berkurangnya (Rp)	Justifikasi
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan (Dinas Kesehatan)	100%	1,754,082,650.00	100%	1,754,082,650.00	-	
1.02.01.2.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah unit kerja yang melaksanakan kegiatan peningkatan pelayanan BLUD	1 unit kerja	1,754,082,650.00	1 unit kerja	1,754,082,650.00	-	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Puskesmas Bukit Kayu Kapur	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	1,754,082,650.00	1 unit kerja	1,754,082,650.00	-	Pergeseran uraian belanja sub kegiatan
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan)			82%	711,963,000.00	711,963,000	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP			1 unit kerja	711,963,000.00	711,963,000	
			TOTAL	1,754,082,650.00		2,466,045,650.00	711,963,000	

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0012 UPT. Laboratorium Kesehatan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Bertambah/ Berkurangnya (Rp)	Justifikasi
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan (Dinas Kesehatan)	100%	167,200,000.00	100%	155,809,000.00	(11,391,000.00)	
1.02.01.2.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah unit kerja yang melaksanakan kegiatan peningkatan pelayanan BLUD	1 unit kerja	167,200,000.00	1 unit kerja	155,809,000.00	(11,391,000.00)	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Laboratorium kesehatan pemeriksaan kualitas air kelas A	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	167,200,000.00	1 unit kerja	155,809,000.00	(11,391,000)	Ada pengurangan pendapatan BLUD laboratorium karena terkendala alat kesehatan yang rusak sehingga ada pelayanan pemeriksaan kualitas air yang tidak dapat dilakukan dan penggunaan SILPA TA 2022
			TOTAL	167,200,000.00		155,809,000.00	(11,391,000)	
			TOTAL BLUD (II)	14,663,760,466.00		26,446,232,046.00	11,782,471,580	
			TOTAL I + II	96,893,277,733.00		157,102,544,027.00	60,209,266,294	



LAMPIRAN 6

Lampiran Perubahan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

**PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahun 2023
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Indeks	0.789-0.790
		1. Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	71.29-71.33
		1.1. Angka Kematian Bayi	per 1.000 Kelahiran Hidup	17
		1.2. Angka Kematian Balita	per 1.000 Kelahiran Hidup	24
		1.3. Angka Kematian Ibu	per 100.000 Kelahiran Hidup	101
		1.4. Umur harapan hidup	Tahun	71.29-71.33
		1.5. Angka Kesakitan Malaria (API)	per 1.000 Penduduk	0.8
		1.6. Persentase Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA +	%	88
		1.7. Prevalensi Penderita HIV Terhadap Penduduk Beresiko	%	1
		1.8. Angka kesakitan demam berdarah (DBD)	per 100.000 Penduduk	55
		1.9. Persentase Balita Dengan Gizi Buruk	%	1
1.10. Persentase Balita Dengan Gizi Kurang	%	3		
2	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	2. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Dumai	%	97

Dumai, 25 September 2023





LAMPIRAN 7



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **dr. SYAIFUL, MKM**

Jabatan : **KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI**

selanjutnya disebut ***pihak pertama***

Nama : **H. PAISAL, SKM, MARS**

Jabatan : **WALI KOTA DUMAI**

selaku atasan ***pihak pertama***, selanjutnya disebut ***pihak kedua***

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, Januari 2023



Pihak Kedua,

H. PAISAL, SKM, MARS



Pihak Pertama,

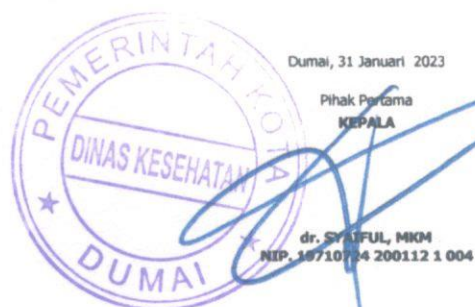
dr. SYAIFUL, MKM

NIP. 197107242000112 1 004

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023
DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI**

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Sasaran	satuan	Target Tahunan 2022
1	2	3	4	5
		Indeks Kesehatan	Indeks	0.786
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	1 Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	71.15
		1.1 Angka Kematian Bayi	Per 1.000 Kelahiran Hidup	17
		1.2 Angka Kematian Balita	Per 1.000 Kelahiran Hidup	24
		1.3 Angka Kematian Ibu	Per 100.000 Kelahiran Hidup	101
		1.4 Umur Harapan hidup	Tahun	71.15
		1.6 Angka Kesakitan Malaria (APt)	Per 1.000 Penduduk	0.8
		1.7 Persentase Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA +	%	88
		1.8 Prevalensi Penderita HIV Terhadap Penduduk Beresiko	%	<1
		1.9 Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD)	Per 100.000 Penduduk	55
		1.10 Persentase Balita dengan Gizi Kurang	%	1
		1.11 Persentase Balita dengan Gizi Buruk	%	3
2	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat	2 Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Dumai	%	92.4

1 Sasaran 1 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp.	26,585,381,009
2 Sasaran 2 Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp.	66,633,400
	3 Program Sedlaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Rp.	285,151,692
	4 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp.	316,417,700
	Jumlah	Rp.	27,253,583,801



Dumai, 31 Januari 2023

Pihak Pertama
KEPALA

dr. SYAFUL, MKM
NIP. 19710124 200112 1 004



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. SYAIFUL, MKM

Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : H. PAISAL, SKM, MARS

Jabatan : WALIKOTA DUMAI

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 25 September 2023

Pihak Kedua,
WALIKOTA DUMAI



H. PAISAL, SKM, MARS

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA DUMAI



dr. SYAIFUL, MKM
NIP. 19710724 200112 1 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahun 2023
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Indeks	0.788-0.789
		Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	71.31
		1.1. Angka Kematian Bayi	per 1.000 Kelahiran Hidup	17
		1.2. Angka Kematian Balita	per 1.000 Kelahiran Hidup	24
		1.3. Angka Kematian Ibu	per 100.000 Kelahiran Hidup	101
		1.4. Umur harapan hidup	Tahun	71.31
		1.5. Angka Kesakitan Malaria (API)	per 1.000 Penduduk	0.8
		1.6. Persentase Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA +	%	88
		1.7. Prevalensi Penderita HIV Terhadap Penduduk Beresiko	%	1
		1.8. Angka kesakitan demam berdarah (DBD)	per 100.000 Penduduk	55
2	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	2.1. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Dumai	%	97
		2.2. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Dumai	%	97

1 Sasaran 1 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp	75,298,856,561.00
2 Sasaran 2 Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp	864,829,200.00
	3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Rp	964,820,492.00
	4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp	1,716,066,700.00
Jumlah			Rp 78,844,572,953.00

Dumai, 25 September 2023





LAMPIRAN 8

Pengukuran Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan	Realisasi Tahunan	% Capaian	Program	Keuangan		
								Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1. Menurunnya Mortalitas (Angka Kematian)	%	100	99.45	99.45	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman 5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	78,207,971,074.00	75,227,175,612.53	96.19
		1.1 Angka Kematian Bayi per 1.000 KH	per 1.000 KH	17	11.36	100				
		1.2 Angka Kematian Balita per 1.000 KH	per 1.000 KH	24	13.42	100				
		1.3 Angka Kematian Ibu per 100.000 KH	per 100.000 KH	101	103.23	97.79				
		1.4 Umur harapan hidup	Tahun	71.29-71.33	71.67	100.00				
		2. Menurunnya Morbiditas (Angka Kesakitan)	%	100	30.44	30.44				
		2.1 Angka Kesakitan Malaria (API) per 1.000 penduduk	per 1.000 penduduk	0.8	0.01	100				
		2.2 Persentase Angka Kesembuhan Penderita TB Paru BTA +	%	88	72.00	81.82				
		2.3 Prevalensi Penderita HIV Terhadap Penduduk Beresiko	%	1	0.18	100				
		2.4 Angka kesakitan demam berdarah (DBD)	per 100.000 penduduk	55	198.03	-160.06				
		3. Meningkatnya Status Gizi Balita	%	100	100	100				
		3.1 Persentase balita dengan gizi buruk	%	1	0.07	100				
		3.2 Persentase balita dengan gizi kurang	%	3	1.10	100				
2	Meningkatnya pelayanan kesehatan baai masvarakat	4. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Dumai	%	97.0	100.02	100.00				
Rata-rata Capaian						74.50	Total	157,052,544,027.00	144,396,026,375.59	91.94



LAMPIRAN 9

REKAPITULASI PAGU DAN REALISASI ANGGARAN DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI TAHUN 2023

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI
1	2	3	4	5
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	59,329,894,028.00	57,075,160,754.53	96.20
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95,158,206.00	92,837,800.00	97.56
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	49,007,856.00	48,007,550.00	97.96
2	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	1,503,600.00	1,503,600.00	100.00
3	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1,503,600.00	1,503,600.00	100.00
4	Koordinasi dan penyusunan dokume DPA-SKPD	1,809,850.00	1,809,850.00	100.00
5	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1,809,850.00	1,809,850.00	100.00
6	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	16,708,950.00	16,708,950.00	100.00
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22,814,500.00	21,494,400.00	94.21
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	51,474,529,624.00	49,643,198,634.00	96.44
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	51,383,229,624.00	49,558,986,134.00	96.45
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	91,300,000.00	84,212,500.00	92.24
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	28,400,000.00	27,800,000.00	97.89
10	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	13,400,000.00	13,400,000.00	100.00
11	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	15,000,000.00	14,400,000.00	96.00
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	323,313,366.00	312,701,214.00	96.72
12	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	158,453,270.00	150,075,000.00	94.71
13	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	164,860,096.00	162,626,214.00	98.64
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,395,318,832.00	1,322,453,634.00	94.78
14	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	39,564,100.00	35,447,700.00	89.60
15	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	390,587,400.00	348,381,700.00	89.19
16	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	34,851,200.00	30,779,000.00	88.32
17	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	139,186,500.00	132,833,500.00	95.44
18	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	149,824,632.00	143,693,250.00	95.91
19	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,052,000.00	2,340,000.00	76.67
20	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	590,137,000.00	582,599,320.00	98.72
21	Dukung pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	48,116,000.00	46,379,164.00	96.39
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	828,503,500.00	817,095,000.00	98.62
22	Pengadaan kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	125,208,000.00	125,160,000.00	99.96
23	Pengadaan Mebel	149,196,000.00	146,995,000.00	98.52
24	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	554,099,500.00	544,940,000.00	98.35
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,267,870,000.00	3,040,131,502.00	93.03
25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	445,600,000.00	338,352,752.00	75.93
26	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	619,970,000.00	606,978,750.00	97.90
27	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,202,300,000.00	2,094,800,000.00	95.12
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,916,800,500.00	1,818,942,970.53	94.89
28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	741,800,500.00	646,413,369.00	87.14
29	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,175,000,000.00	1,172,529,601.53	99.79
II	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	67,862,651,561.00	62,081,579,129.06	91.48
9	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	21,776,302,893.00	20,619,366,557.06	94.69
30	Pembangunan Puskesmas	4,538,894,000.00	3,962,284,616.28	87.30
31	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1,234,624,000.00	1,157,546,223.54	93.76
32	Pengembangan Puskesmas	705,000,000.00	702,800,000.00	99.69
33	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1,611,000,000.00	1,578,272,900.24	97.97
34	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	1,145,000,000.00	1,143,557,000.00	99.87
35	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1,095,000,000.00	1,091,718,000.00	99.70
36	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1,524,331,000.00	1,495,239,000.00	98.09
37	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3,006,495,000.00	2,753,818,614.00	91.60
38	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	100,000,000.00	93,746,000.00	93.75
39	Pengadaan Obat, Vaksin	2,437,624,860.00	2,369,446,799.00	97.20
40	Pengadaan Bahan Habis Pakai	4,278,334,033.00	4,176,637,404.00	97.62
41	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100,000,000.00	94,300,000.00	94.30
10	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	35,268,787,978.00	32,057,042,251.00	90.89
42	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	274,348,900.00	249,260,520.00	90.86
43	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	84,604,000.00	79,461,000.00	93.92
44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	110,157,402.00	109,669,100.00	99.56
45	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	271,832,300.00	266,635,500.00	98.09
46	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	30,887,400.00	30,484,400.00	98.70
47	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	77,200,000.00	75,670,830.00	98.02
48	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	82,115,500.00	80,390,500.00	97.90
49	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	15,000,000.00	14,076,900.00	93.85
50	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	308,970,900.00	294,915,000.00	95.45
51	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	25,858,000.00	25,398,000.00	98.22
52	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	947,422,500.00	410,607,387.00	43.34
53	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	412,782,500.00	401,138,660.00	97.18
54	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1,343,212,000.00	1,323,896,978.00	98.56

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI
1	2	3	4	5
55	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	641,679,000.00	631,849,360.00	98.47
56	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	29,100,000.00	28,200,000.00	96.91
57	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1,082,502,800.00	1,060,117,245.00	97.93
58	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	255,291,030.00	249,645,200.00	97.79
59	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	469,331,000.00	458,482,932.00	97.69
60	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kejiwaan	53,800,000.00	50,008,500.00	92.95
61	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1,006,015,000.00	971,013,247.00	96.52
62	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	26,939,377,142.00	24,480,143,203.00	90.87
63	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	29,999,704.00	25,737,300.00	85.79
64	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	725,300,900.00	693,385,989.00	95.60
65	Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria	52,000,000.00	46,854,500.00	90.10
11	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	199,715,590.00	186,304,047.00	93.28
66	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	177,829,300.00	164,654,047.00	92.59
67	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	21,886,290.00	21,650,000.00	98.92
12	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10,617,845,100.00	9,218,866,274.00	98.75
68	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	36,424,000.00	35,970,000.00	98.75
69	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	83,493,400.00	79,838,800.00	95.62
70	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	10,473,627,700.00	9,090,457,474.00	86.79
71	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	24,300,000.00	12,600,000.00	51.85
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	864,829,200.00	818,758,053.00	94.67
13	Pemberian izin praktek tenaga kesehatan di wilayah kabupaten Kota	84,500,000.00	84,032,400.00	99.45
72	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	84,500,000.00	84,032,400.00	99.45
14	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	650,600,800.00	610,033,173.00	93.76
73	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	650,600,800.00	610,033,173.00	93.76
15	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	129,728,400.00	124,692,480.00	96.12
74	Pembiayaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	129,728,400.00	124,692,480.00	96.12
IV	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	964,820,492.00	910,412,127.00	94.36
16	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	283,860,000.00	260,862,000.00	91.90
75	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	283,860,000.00	260,862,000.00	91.90
17	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Dinroduksi oleh Industri Rumah Tangga	152,595,000.00	151,745,676.00	99.44
76	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang dapat Dinroduksi oleh Industri Rumah Tangga	152,595,000.00	151,745,676.00	99.44
18	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	190,485,892.00	185,838,166.00	97.56
77	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	190,485,892.00	185,838,166.00	97.56
19	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	96,234,600.00	93,743,285.00	97.41
78	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	96,234,600.00	93,743,285.00	97.41
20	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	241,645,000.00	218,223,000.00	90.31
79	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	241,645,000.00	218,223,000.00	90.31
V	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1,584,116,700.00	1,561,681,639.00	98.58
21	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	891,839,500.00	880,009,400.00	98.67
80	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	891,839,500.00	880,009,400.00	98.67
22	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kab/Kota	174,998,400.00	170,576,350.00	97.47
81	Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	174,998,400.00	170,576,350.00	97.47
23	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	517,278,800.00	511,095,889.00	98.80
82	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	517,278,800.00	511,095,889.00	98.80
JUMLAH		130,606,311,981.00	122,447,591,702.59	93.75

REKAPITULASI ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN BLUD SE KOTA DUMAI TAHUN 2023

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI
1	2	3	4	5
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	18,878,077,046.00	18,152,014,858.00	96.15
1	Kegiatan peningkatan pelayanan BLUD	18,878,077,046.00	18,152,014,858.00	96.15
1	BLUD Puskesmas Dumai Kota	2,224,213,000.00	1,987,863,476.00	89.37
2	BLUD Puskesmas Dumai Barat	1,550,000,000.00	1,547,704,069.00	99.85
3	BLUD Puskesmas Bukit Kapur	1,700,000,000.00	1,622,157,970.00	95.42
4	BLUD Puskesmas Sungai Sembilan	2,973,471,944.00	2,958,086,280.00	99.48
5	BLUD Puskesmas Medang Kampai	1,296,706,000.00	1,278,197,026.00	98.57
6	BLUD Puskesmas Bumi Ayu	1,671,206,452.00	1,635,368,306.00	97.86
7	BLUD Puskesmas Bukit Timah	920,000,000.00	892,936,650.00	97.06
8	BLUD Puskesmas Jaya Mukti	3,150,000,000.00	3,045,813,179.00	96.69
9	BLUD Puskesmas Purnama	1,482,588,000.00	1,450,964,932.00	97.87
10	BLUD Puskesmas Bukit Kayu Kapur	1,754,082,650.00	1,600,420,637.00	91.24
11	BLUD Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A	155,809,000.00	132,502,333.00	85.04
II	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	7,436,205,000.00	3,683,144,815.00	49.53
1	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Ruiuikan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7,436,205,000.00	3,683,144,815.00	49.53
1	Puskesmas Dumai Kota	868,701,000.00	491,348,764.00	56.56
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	23,100,000.00	22,400,000.00	96.97
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	2,500,000.00	0.00	-
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	36,350,000.00	34,650,000.00	95.32
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	14,800,000.00	14,800,000.00	100.00
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	13,500,000.00	13,500,000.00	100.00
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	19,000,000.00	19,000,000.00	100.00
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	12,800,000.00	11,600,000.00	90.63
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/ atau Bernpotensi Bencana			
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	367,703,000.00	97,242,998.00	26.45
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	600,000.00	300,000.00	50.00
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	16,600,000.00	16,600,000.00	100.00
13	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	5,850,000.00	5,850,000.00	100.00
14	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	18,000,000.00	14,250,000.00	79.17
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	7,600,000.00	7,600,000.00	100.00
16	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	115,200,000.00	112,800,000.00	97.92
17	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Ruiuikan/Nasional	2,000,000.00	0.00	-
18	Operasional Pelayanan Puskesmas	192,898,000.00	100,555,766.00	52.13
19	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	200,000.00	200,000.00	100.00
20	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00
21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00
2	Puskesmas Dumai Barat	566,934,000.00	354,096,203.00	62.46
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	23,250,000.00	23,250,000.00	100.00
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	400,000.00	100,000.00	25.00
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	31,200,000.00	30,200,000.00	96.79
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	3,200,000.00	3,200,000.00	100.00
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	4,400,000.00	4,400,000.00	100.00
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	9,300,000.00	9,300,000.00	100.00
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/ atau Bernpotensi Bencana			
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	261,315,000.00	99,610,414.00	38.12
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	14,300,000.00	14,300,000.00	100.00
13	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			
14	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	14,100,000.00	6,400,000.00	45.39
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	1,800,000.00	1,700,000.00	94.44
16	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	45,250,000.00	44,450,000.00	98.23
17	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Ruiuikan/Nasional	300,000.00	0.00	-
18	Operasional Pelayanan Puskesmas	138,919,000.00	98,485,789.00	70.89
19	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	400,000.00	400,000.00	100.00
20	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	2,300,000.00	2,300,000.00	100.00
21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	500,000.00	0.00	-
3	Puskesmas Bukit Kapur	596,860,000.00	249,770,181.00	41.85
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	60,500,000.00	25,300,000.00	41.82
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	750,000.00	0.00	-
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	10,300,000.00	10,200,000.00	99.03
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	6,600,000.00	4,100,000.00	62.12

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI
1	2	3	4	5
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	14,100,000.00	12,150,000.00	86.17
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	900,000.00	900,000.00	100.00
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	7,400,000.00	6,800,000.00	91.89
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	5,900,000.00	200,000.00	3.39
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/ atau Bernetensi Bencana			
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	255,445,000.00	32,450,738.00	12.70
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	400,000.00	400,000.00	100.00
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	10,200,000.00	9,000,000.00	88.24
13	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	9,600,000.00	9,150,000.00	95.31
14	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	9,400,000.00	4,300,000.00	45.74
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	1,500,000.00	1,400,000.00	93.33
16	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	50,750,000.00	48,350,000.00	95.27
17	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	800,000.00	50,000.00	6.25
18	Operasional Pelayanan Puskesmas	146,515,000.00	81,719,443.00	55.78
19	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1,000,000.00	500,000.00	50.00
20	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	3,300,000.00	2,800,000.00	84.85
21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	1,500,000.00	0.00	-
4	Puskesmas Sungai Sembilan	1,030,195,000.00	454,748,757.00	44.14
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	45,555,000.00	45,450,000.00	99.77
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	9,000,000.00	1,200,000.00	13.33
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	18,600,000.00	18,600,000.00	100.00
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	4,350,000.00	4,350,000.00	100.00
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	5,400,000.00	5,400,000.00	100.00
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	5,400,000.00	0.00	-
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	33,300,000.00	17,850,000.00	53.60
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/ atau Bernetensi Bencana	900,000.00	525,000.00	58.33
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	459,915,000.00	49,694,393.00	10.81
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1,125,000.00	750,000.00	66.67
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	28,500,000.00	28,500,000.00	100.00
13	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	26,845,000.00	21,675,000.00	80.74
14	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	40,500,000.00	15,225,000.00	37.59
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	6,600,000.00	6,600,000.00	100.00
16	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	103,350,000.00	98,100,000.00	94.92
17	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			
18	Operasional Pelayanan Puskesmas	221,805,000.00	127,779,364.00	57.61
19	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
20	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	7,500,000.00	1,950,000.00	26.00
21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	5,550,000.00	5,100,000.00	91.89
5	Puskesmas Medang Kampai	537,555,000.00	270,939,348.00	50.40
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	17,250,000.00	16,500,000.00	95.65
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	3,750,000.00	1,650,000.00	44.00
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	13,200,000.00	13,200,000.00	100.00
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1,950,000.00	1,950,000.00	100.00
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut			
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1,800,000.00	1,800,000.00	100.00
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	8,700,000.00	7,125,000.00	81.90
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	3,300,000.00	600,000.00	18.18
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/ atau Bernetensi Bencana			
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	223,290,000.00	30,796,134.00	13.79
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	23,550,000.00	14,700,000.00	62.42
13	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			
14	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	16,050,000.00	15,900,000.00	99.07
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00
16	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	79,125,000.00	73,500,000.00	92.89
17	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	2,250,000.00	150,000.00	6.67
18	Operasional Pelayanan Puskesmas	135,390,000.00	86,768,214.00	64.09
19	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1,200,000.00	1,050,000.00	87.50
20	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	5,250,000.00	3,750,000.00	71.43
21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria			
6	Puskesmas Bumi Ayu	788,279,000.00	467,200,809.00	59.27
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	33,900,000.00	32,000,000.00	94.40
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	700,000.00	200,000.00	28.57
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	22,050,000.00	20,250,000.00	91.84

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI
1	2	3	4	5
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	150,000.00	150,000.00	100.00
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	9,600,000.00	9,600,000.00	100.00
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2,700,000.00	2,000,000.00	74.07
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	11,900,000.00	7,600,000.00	63.87
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	9,200,000.00	6,900,000.00	75.00
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/ atau Berpotensi Bencana	800,000.00	0.00	-
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	338,965,000.00	101,570,519.00	29.96
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	300,000.00	0.00	-
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	17,200,000.00	17,200,000.00	100.00
13	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	13,650,000.00	12,600,000.00	92.31
14	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	18,700,000.00	11,800,000.00	63.10
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	2,400,000.00	2,400,000.00	100.00
16	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	127,200,000.00	122,200,000.00	96.07
17	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			
18	Operasional Pelayanan Puskesmas	177,264,000.00	119,730,290.00	67.54
19	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	900,000.00	500,000.00	55.56
20	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	200,000.00	100,000.00	50.00
21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	500,000.00	400,000.00	80.00
7	Puskesmas Bukit Timah	510,392,000.00	369,291,369.00	72.35
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	36,830,000.00	36,830,000.00	100.00
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1,800,000.00	0.00	-
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	13,200,000.00	13,200,000.00	100.00
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	9,750,000.00	9,750,000.00	100.00
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	9,000,000.00	9,000,000.00	100.00
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	5,400,000.00	5,400,000.00	100.00
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3,750,000.00	3,750,000.00	100.00
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	6,300,000.00	6,300,000.00	100.00
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/ atau Berpotensi Bencana			
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	198,695,000.00	90,777,496.00	45.69
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3,600,000.00	3,600,000.00	100.00
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	10,800,000.00	10,800,000.00	100.00
13	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	5,700,000.00	5,250,000.00	92.11
14	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	8,850,000.00	8,550,000.00	96.61
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	1,950,000.00	1,950,000.00	100.00
16	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	57,600,000.00	57,225,000.00	
17	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			
18	Operasional Pelayanan Puskesmas	131,692,000.00	101,433,873.00	77.02
19	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	225,000.00	225,000.00	100.00
20	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	3,750,000.00	3,750,000.00	100.00
21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00
8	Puskesmas Jaya Mukti	1,137,406,000.00	375,480,119.00	33.01
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	17,000,000.00	15,100,000.00	88.82
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	21,500,000.00	16,500,000.00	76.74
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1,600,000.00	1,000,000.00	62.50
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	36,000,000.00	26,550,000.00	73.75
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2,500,000.00	1,900,000.00	76.00
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	24,500,000.00	4,600,000.00	18.78
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	5,800,000.00	2,600,000.00	44.83
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/ atau Berpotensi Bencana			
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	543,420,000.00	33,061,194.00	6.08
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	19,200,000.00	14,200,000.00	73.96
13	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	900,000.00	900,000.00	100.00
14	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	39,250,000.00	28,300,000.00	72.10
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	6,400,000.00	1,900,000.00	29.69
16	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	176,550,000.00	143,900,000.00	81.51
17	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	1,600,000.00	0.00	-
18	Operasional Pelayanan Puskesmas	236,186,000.00	82,068,925.00	34.75
19	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1,000,000.00	0.00	-
20	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	4,000,000.00	2,900,000.00	72.50
21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria			
9	Puskesmas Purnama	704,120,000.00	308,760,127.00	43.85
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	57,075,000.00	40,288,125.00	70.59

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI
1	2	3	4	5
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	29,550,000.00	17,750,000.00	60.07
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	2,300,000.00	2,300,000.00	100.00
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	7,900,000.00	7,900,000.00	100.00
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3,400,000.00	3,400,000.00	
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2,200,000.00	2,200,000.00	100.00
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	20,000,000.00	5,000,000.00	25.00
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/ atau Berpotensi Bencana			
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	305,275,000.00	68,620,919.00	22.48
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	9,900,000.00	5,400,000.00	54.55
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7,600,000.00	6,900,000.00	90.79
13	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	10,200,000.00	3,200,000.00	31.37
14	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	33,800,000.00	22,850,000.00	67.60
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	1,500,000.00	1,350,000.00	90.00
16	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	44,150,000.00	39,400,000.00	89.24
17	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	950,000.00	0.00	-
18	Operasional Pelayanan Puskesmas	161,570,000.00	76,301,083.00	47.22
19	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	350,000.00	0.00	-
20	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00
21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	4,400,000.00	3,900,000.00	88.64
10	Puskesmas Bukit Kayu Kapur	695,763,000.00	341,509,138.00	49.08
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	26,030,000.00	25,130,000.00	96.54
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	7,575,000.00	7,575,000.00	100.00
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	5,700,000.00	5,700,000.00	100.00
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	5,400,000.00	5,400,000.00	100.00
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	37,500,000.00	28,950,000.00	77.20
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3,600,000.00	3,300,000.00	91.67
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	14,100,000.00	14,100,000.00	100.00
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	8,400,000.00	8,400,000.00	100.00
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/ atau Berpotensi Bencana			
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	311,855,000.00	57,765,135.00	18.52
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	7,200,000.00	750,000.00	10.42
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	18,300,000.00	15,150,000.00	82.79
13	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	300,000.00	300,000.00	100.00
14	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	17,250,000.00	11,925,000.00	69.13
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	600,000.00	600,000.00	100.00
16	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	59,700,000.00	50,250,000.00	84.17
17	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	5,250,000.00	450,000.00	8.57
18	Operasional Pelayanan Puskesmas	163,253,000.00	103,214,003.00	63.22
19	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	300,000.00	0.00	-
20	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	3,000,000.00	2,550,000.00	
21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	450,000.00	0.00	-
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	131,950,000.00	113,275,000.00	85.85
1	Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	131,950,000.00	113,275,000.00	85.85
1	Puskesmas Dumai Kota	20,350,000.00	18,850,000.00	92.63
1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	20,350,000.00	18,850,000.00	92.63
2	Puskesmas Dumai Barat			
1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
3	Puskesmas Bukit Kapur	13,100,000.00	9,800,000.00	74.81
1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	13,100,000.00	9,800,000.00	74.81
4	Puskesmas Sungai Sembilan	35,625,000.00	30,975,000.00	86.95
1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	35,625,000.00	30,975,000.00	86.95
5	Puskesmas Medang Kampai	9,000,000.00	5,175,000.00	57.50
1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	9,000,000.00	5,175,000.00	57.50
6	Puskesmas Bumi Ayu	9,700,000.00	9,700,000.00	100.00
1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	9,700,000.00	9,700,000.00	100.00
7	Puskesmas Bukit Timah	12,975,000.00	12,975,000.00	100.00
1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12,975,000.00	12,975,000.00	100.00
8	Puskesmas Jaya Mukti	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI
1	2	3	4	5
1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00
9	Puskesmas Purnama			
1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
10	Puskesmas Bukit Kayu Kapur	16,200,000.00	10,800,000.00	66.67
1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	16,200,000.00	10,800,000.00	66.67
	TOTAL BLUD	26,446,232,046.00	21,948,434,673.00	82.99



LAMPIRAN 10



Piagam Penghargaan

DIBERIKAN KEPADA

KOTA DUMAI

Keputusan Gubernur Riau Nomor 194 / II / 2023

ATAS

PRESTASI CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KESEHATAN
PADA PROGRAM TUBERKULOSIS SERATUS PERSEN
TAHUN 2022

Pekanbaru, 14 Februari 2023
Gubernur Riau

SYAMSUAR



DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
PIAGAM PENGHARGAAN

Diberikan Kepada :

DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI

**ATAS PENCAPAIAN TERTINGGI PEMERIKSAAAN
HEPATITIS B PADA IBU HAMIL (72%) TAHUN 2022**

Pangkalan, 27 Februari 2023
Kepada Dinas Kesehatan
Provinsi Riau.

[Signature]
H. ZAINAL ARIFIN, SKM, M.KES
NIP. 19720405 198912 1 001



DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU

PIAGAM

890/DINKES-2/2023/1634

PENGHARGAAN

APRESIASI PENCAPAIAN STATUS
DESA/KELURAHAN OPEN DEFECATION FREE (ODF)
DIATAS TARGET 80% SEBAGAI PRASYARAT
UTAMA KABUPATEN KOTA SEHAT TAHUN 2023

Diberikan Kepada :

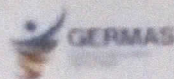
**DINAS KESEHATAN
KOTA DUMAI**

Pekanbaru, 09 Juni 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU



H. ZAINAL ARIFIN, SKM, M.Kes
Pembina Utama Madya
NIP. 19700405 198912 1 001



SERTIFIKAT PENGHARGAAN
TERBAIK 2

DIBERIKAN KEPADA

DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI

Atas Pencapaian Treatment Coverage Tuberkulosis Tahun 2022

Pekanbaru, 03 Juli 2023

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau


H. Zainal Arifin, SKM, M. Kes

NIP. 19700405 198912 1 001



DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU

PIAGAM PENGHARGAAN TERBAIK I

Penghargaan ini diberikan kepada :

Kota Dumai

Kategori Kab & Kota dengan Progres
Penginputan Capaian di Aplikasi ASIK
Terbaik

Pekanbaru, 28 Juli 2023



H. RYAN ARIFIN, SKM, M.Kes
PENBINA UTAMA MADYA/ IV.d
NIP. 19700405 198912 1 001





DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU

PIAGAM PENGHARGAAN

Penghargaan ini diberikan kepada :

Kota Dumai

**Kategori Kelengkapan Laporan Pemetaan
Resiko Penyakit Infeksi Emerging Tahun 2023**

PEKANBARU, 28 JULI 2023
KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI RIAU



H. ZAINAL ARIFIN, SKM, M.KES
PEMBINA UTAMA MADYA/ IV.D
NIP. 19700405 198912 1 001



**DINAS KESEHATAN
PROVINSI RIAU**



PIAGAM PENGHARGAAN

TERBAIK I

Diberikan kepada :

KOTA DUMAI

atas prestasinya sebagai
Kabupaten dengan Kinerja Program Malaria Terbaik Semester I Tahun 2023

Pekanbaru, 28 Juli 2023

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau



W. Zainal Arifin, SKM, M.Kes

Pembina Utama Madya / IV.d

NIP. 19700405 198912 1 001